Jurnal Vol .4 No.3 Desember 2009 ISSN : 1907 - 3941

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Nilai Strategis Sumber Daya Dalam Bidang Keamanan**
  Ani Khoirunnisa

- **Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera**
  Rusdiyanta, Muh. Umar Wirayuda, Doddy Wihardi

- **Tantangan G-20 Dalam Menciptakan Keseimbangan Perekonomian Global**
  Yusran

- **Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam G-20**
  Reinhard P. Hutapea

- **Nuklir Sebagai Ancaman Keamanan Nasional: Studi Kasus Program Nuklir Iran dan Ancaman Hegemoni Amerika Serikat (2003-2007)**
  Shinta Ayudya Putri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab:
Rusdiyanta
(Dekan FISIP)

Pemimpin Redaksi:
Yusran

Dewan Redaksi:
Bambang Pujiono
Arin Fithriana
Emil Radhiansyah
Doddy Wihardi

Editor
Dato' Dr. Junaidi Abubakar
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Dr. Syahrial Syarbaini, MA
(Universitas Indonusa Esa Unggul)
Drs. Afadlal, MA
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Alamat Redaksi:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur, Jln. Ciledug Raya, Petukangan Utara,
Jakarta Selatan 12260 , Telp: (021)5853753 Ext 252

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini mengalami keterlambatan, mengingat minimnya tulisan yang masuk. oleh karena itu, kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Ani Khoirunnisa tentang Nilai Strategis Sumber daya Dalam Bidang Keamanan, Rusdiyanta, Muh. Umar Wirayuda dan Doddy Wihardi tentang Transnasionalisasi Idiologi: Kasus Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera, Yusran tentang Tantangan G-20 Dalam Menciptakan Keseimbangan Global, Reinhard P. Hutapea tentang Tantangan dan Peluang Indonesia dalam G-20, Shinta Ayunda Putri tentang Nuklir Sebagai Ancaman Keamanan Nasional: Studi Kasus Program Nuklir Iran dan Ancaman Hegemoni Amerika Serikat (2003-2007).

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca.
Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Juni 2009

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Ani Khoirunnisa	Nilai Strategis Sumber Daya Dalam Bidang Keamanan	1-12
Rusdiyanta *Muh. Umar Wirayuda* *Doddy Wihardi*	Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera	13-33
Yusran	Tantangan G-20 Dalam Menciptakan Keseimbangan Perekonomian Global	34-48
Reinhard P. Hutapea	Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam G-20	49-67
Shinta Ayunda Putri	Nuklir Sebagai Ancaman Keamanan Nasional: Studi Kasus Program Nuklir Iran dan Ancaman Hegemoni Amerika Serikat (2003-2007)	68-99

Nilai Strategis Sumber Daya Dalam Bidang Keamanan

Ani Khoirunnisa [1]

Abstract

Security is one of important factors that can not be separated from human and nation. Security is a part of national interest which have meaningfull, concept, influence, further change of meaning security itself. This article describe there are two points of view that create conflict between nations, that is scarcity and maldistribution. But it could be happened and increased more directly if there are intervening variable such as power and national interest.

Keywords : Security, scarcity, maldistribution, conflict.

PENDAHULUAN

Konsepsi studi strategis telah mengalami berbagai perkembangan pada abad ini. Perkembangan tersebut lebih merupakan upaya dari studi strategis untuk menjawab dan memberikan penjelasan terhadap semakin kompleksnya sistem internasional. Pergeseran konsepsi strategis ini adalah pergeseran dari dimensi militer menuju kea rah non militer.

Keamanan memiliki makna yang begitu luas, mulai dari pemahaman konsep hingga berbicara mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya, belum lagi dengan perubahan dan pergeseran makna keamanan itu sendiri. Mulai dari ancaman yang hanya sekedar menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut hingga tekanan dan kerusakan secara fisik serta korban jiwa. Lingkup keamananpun merambah bidang-bidang yang tidak hanya berkutat pada persenjataan,tetapi juga memasuki spektrum yang lebih luas seperti perdagangan, lingkungan, energi, budaya dan bidang-bidang sosial lainnya baik domestik/nasional maupun internasional.Intinya adalah keamanan tidak hanya bersentuhan dengan militer tetapi juga non militer.

Dampak yang ditimbulkannyapun menyentuh mulai dari skala yang paling kecil,individu, hingga skala yang lebih luas,negara.Tidak tanggung-tanggung bukan hanya satu negara saja tetapi beberapa

[1] Dosen Ilmu Hubungan International, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

negara bahkan dunia sekalipun, dan sepertinya khalayakpun telah menyadari betapa pentingnya kita memahami masalah keamanan.

Istilah keamanan secara umum sering digunakan dalam hubungan internasional dan juga oleh disiplin ilmu lainnya sebagai suatu central organizing concept baik oleh para praktisi maupun oleh para akademisi. Sejak lahir tahun 1980-an, diskusi mengenai keamananpun telah terjadi pergeseran, keamanan tidak hanya menitikberatkan pada aspek yang berdimensi militer saja tetapi sering dikaitkan dengan dimensi non-militer. Hal tersebut juga menandai adanya suatu kesadaran bahwa militer bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan sebagai ancaman keamanan bagi suatu Negara atau yang dikenal sebagai Non Conventional Threat dalam studi strategis namun juga berhubungan dengan masalah kepentingan kebijaksanaan (policy interest) Negara-negara tertentu. Suatu studi yang mencoba melihat keamanan dalam perspektif yang lebih luas seperti yang disampaikan oleh Neville Brown dalam bukunya The Future Global Challenge : A Predictive Study of World Security, bahwa lingkungan internasional yang telah berubah mengharuskan kita memandang keamanan dalam perspektif yang lebih luas dan tidak memandang keamanan semata-mata dari perspektif militer. Katakanlah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti sumber daya alam dan pemanfaatannya. Seberapa besar nilai strategis sumberdaya dalam bidang keamanan cenderung menjadi sumber konflik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Isu-isu yang bersifat non-konvensional berkembang menjadi isu keamanan melalui suatu proses yang disebut sekuritisasi, yaitu proses memasukkan suatu isu sebagai isu keamanan. Sementara menurut pendekatan the Copenhagen School yang berpandangan bahwa isu keamanan dapat berupa militer atau non-militer, ia dibedakan oleh apakah perkara itu memerlukan tindakan segera atau paling tidak isu ini menjadi perbincangan politik. Dengan kata lain, pengubahan isu-isu low politics menjadi isu keamanan dapat dilihat dari prioritas (priority) dan penting tidaknya (urgency) ancamannya. (Barry Buzan,1998)

Keamanan pada hakekatnya menyangkut nasib kolektivitas umat manusia. Dalam sistem inetrnasional kontemporer, unit standar dari keamanan adalah negara berdaulat yang dibentuk oleh

kolektivitas manusia. Karena struktur sistem internasional bersifat anarki, maka negara dianggap sebagai unit yang dominan dan berarti keamanan nasional merupakan isu sentral dalam setiap pembicaraan mengenai keamanan sebagai konsekuensinya.

Keamanan kolektivitas manusia dipengaruhi beberapa faktor dari lima sektor, yaitu sektor militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan (Barry Buzan, 1991: 19-20) Tiga sektor terakhir yang disebutkan, ekonomi, sosial dan lingkungan, dalam tingkat tertentu akan mempengaruhi dinamika sistem inetrnasional yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi stabilitas sistem internasional. *Keamanan ekonomi* mencakup akses pada sumber-sumber daya, finansial dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara. *Keamanan sosial/masyarakat* mencakup kemampuan untuk mempertahankan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa,kultur, agama dan identitas nasional. *Keamanan Lingkungan* mencakup kemampuan Negara untuk memelihara lingkungannya sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusia.

Pandangan mengenai konsep keamanan mempunyai beberapa pengertian. *Laurence Martin* beranggapan bahwa keamanan itu sendiri mengandung suatu asumsi tiadanya ancaman terhadap nilai-nilai tertentu dari suatu negara dan bahwa keamanan merupakan jaminan akan masa depan yang lebih stabil. Pengertian ini lebih merujuk pada keamanan yang bersifat Non Conventional Threat (seperti dikemukakan terdahulu) atau isu-isu keamanan yang bersifat ancaman non militer seperti lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi, energy dan obat-obatan/drugs, teroris dan kejahatan teroraginsir lainnya. Namun bahasan dalam tulisan ini lebih pada masalah lingkungan hidup, seperti mengenai kelangkaan dan kegagalan distribusi sumber daya.

Dalam pemikiran realis, hubungan antara kekuasaan, keamanan dan konflik sangatlah erat. Keamanan adalah kata yang slalu digunakan dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kaum realis, dalam hubungan internasional, keamanan terkait dengan negara dan sebuah negara kurang lebih akan aman pada tingkatan ketika negara tersebut bisa memastikan keberlangsungan hidupnya dalam sistem internasional (Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009 : 69) Sekali lagi ditegaskan bahwa tulisan ini akan membahas bagaimana masalah kelangkaan dan kegagalan sumber daya, atau boleh juga dikatakan pendistribusian sumberdaya yang tidak merata.

Hal ini tentu akan berpengaruh pada upaya-upaya strategis yang dilakukan suatu negara dalam mengamankan kesejahteraan masyarakat dan kepentingannya, artinya sekaligus menandai suatu perkembangan bahwa semakin luasnya lingkup strategis yang tidak hanya berdimensi bukan saja militer tetapi juga non-militer. Sekalipun dalam konsepsi keamanan seperti yang diungkapkan Buzan bahwa dalam mencapai *security*, negara dan masyarakat (state and society) tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, karena seringkali kebutuhan untuk *state survival*, negara mengorbankan kebebasan masyarakat.

Dalam hubungan internasional dinyatakan bahwa konflik selalu bersifat multikausal, Wallerstein menyebut adanya 4 faktor penyebab konflik yaitu, geopolitik, realpolitik, capital poltik dan ideal politik. Masing-masing bukan merupakan penyebab tunggal dan langsung dari suatu konflik,melainkan keterkaitan dan kombinasi antara keempat hal tersebutlah ataupun keterkaitan dan kombinasi mereka dengan faktor lain di luarnya, yang mampu menjadi sumber suatu konflik. Dalam hal ini terdapat koinsidensi antar sebab atau prinsip yang disebut Kausalitas Sinergetika (Synergetic Causality).

KELANGKAAN DAN DISTRIBUSI YANG TIDAK MERATA

Dalam perspektif konflik , masalah kelangkaan dan maldistribusi atau distribusi sumber daya yang tidak merata dapat memicu konflik antar Negara, atau dengan kata lain memiliki probabilitas untuk menghasilkan perang. Tetapi hubungan antara kedua variable itu lemah, karena konflik akan menjadi nyata apabila terdapat intervening variable atau variable penyela, yang dipicu oleh kelangkaan dan maldistribusi,contoh intervening variable adalah akspansi kolonialisme misalnya.

Populasi

Peningkatan jumlah penduduk di dunia telah menimbulkan berbagai prediksi yang menimbulkan kekhawatiran. Populasi dunia yang terus bertambah dari abad ke abad bersifat eksponensial (kecepatan bertumbuh semakin berlipat ganda), sama seperti yang dikemukakan oleh pendeta *Thomas Robert Malthus dalam An Essay on the Principle of population,* sementara itu pada saat yang sama sumber makanan bersifat fixed (tetap), sehingga ia meramalkan bahwa apabila itu terjadi, pada saat yang sama, penduduk dunia akan

menderita akibat adanya kelaparan, penyakit hingga perang, seperti yang pada saat itu meramalkan Inggris.

Prediksi Malthus masih dianggap premature, karena pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena dengan semakin canggihnya teknologi seperti intensifikasi misalnya, maka persediaan makanan bisa tercukupi. Namun pendapat tersebut didukung oleh *David Ziegler* bahwa meskipun dengan hasil panen bahan makanan yang cukup baik dan teknologi pangan berkembang pesat, cepat atau lambat pertumbuhan penduduk dengan angka eksponensial akan melalmpau persediaan makanan yang tersedia. Itu artinya pendapat/ramalan Malthus bisa jadi akan terbukti benar.

Akan menjadi hal yang premature pula jika menganggap bahwa populasi penduduk tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi politik internasional. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa terdapat variabel antara/intervening variable diantara penduduk dan perang. Contohnya Jepang, meskipun masalah kepadatan penduduk di Jepang tidak mengakibatkan agresi (1960-an), tetapi hal itu tetap mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk akan mengakibatkan kekerasan apabila akses terhadap sumber-sumber alam bagi kebutuhan manusia dihambat oleh Negara lain, seperti yang terjadi pada tahun 1930-an. Atau dengan kata lain pertumbuhan/kepadatan penduduk dapat menimbulkan konflik bila dipengaruhi oleh faktor lain. Pada tahun 1930-an dimana Jepang dianggap bersifat ekspansionis, imperialis dan militeristik, karena pada tahun-tahun tersebut akses Jepang kepada sumber daya eksternal dibatasi, sementara di tahun 1960-an saat kepadatan penduduknya lebih tinggi lagi, ternyata Jepang sangat anti militer. Sehingga nampak bahwa kepadatan penduduk akan mengarah pada kekerasan bila akses sumber daya terhambat/terhalang dan itu artinya terdapat korelasi antara kedua faktor tersebut. Bagaimanapun, bagi beberapa negara, saat ini ukuran dan pertumbuhan populasi menciptakan serangkaian masalah. Manusia perlu makan sehingga menempatkan beban yang terlalu berat bagi sumber daya alam khususnya. Sebuah populasi yang besar merupakan sebuah sumber kelemahan yang besar bagi suatu Negara seperti Bangladesh, bahkan bagi Cina, ukuran populasi yang besar seperti pedang bermata dua.

Pangan (food)

Pangan berkaitan erat dengan memberi makan populasi dunia. Prediksi akurat dalam menyediakan kebutuhan pangan sangat sulit untuk diwujudkan karena elemen penting dalam produksi pangan adalah cuaca. Kita semua tahu bahwa cuaca merupakan sesuatu yang terkenal tidak pasti. Namun kita tidak bisa menyalahkan situasi ini terhadap terjadinya kelaparan. Sebenarnya ada alas an yang sifatnya dapat lebih diantisipasi, yaitu lahan yang diolah untuk bahan pangan itu sendiri. Hanya sekitar 10% tanah di dunia yang diolah. Bila fasilitas-fasilitas pertanian yang ada digunakan secara efisien, maka bumi akan menyediakan bahan pangan bagi jumlah penduduk yang lebih besar.

Selain itu ada masalah krusial dalam penyediaan bahan pangan, yaitu pola konsumsi yang meniru Amerika Serikat dan penyebaran makanan yang tidak merata. Katakan Satu orang Asia Selatan mengkonsumsi sekitar 1900 kalori/hari, sementara satu orang Amerika mengkonsumsi sekitar 3300 kalori/hari. Contoh lain, konsumsi gandum Asia hanya 400 pon setahun, sedangkan Amerika mengkonsumsi 2000 pon/tahun, dimana hanya 150 pon saja yang dikonsumsi secara langsung, 100 pon dari itu untuk bahan alcohol dan sisanya untuk bakan ternak yang setelah itu baru kemudian daging ternaknya dikonsumsi. Celakanya, dengan meningkatnya pendapatan per kapita Negara-negara di Eropa, Uni Soviet dan Asia, maka konsumsi daging juga meningkat dan pola konsumsinya meniru Amerika. Dengan kondisi ini, meskipun bumi menghasilkan 2,5 kali dari jumlah bahan pangan yang dibutuhkan, tetap saja belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia.

Persediaan pangan mungkin dapat ditingkatkan dengan peningkatan dan pembaharuan secara teknis seperti teknologi intensifikasi. Namun pada gilirannya pembaharuan ini akan memiliki side effects yang buruk pada bidang-bidang tertentu seperti penyediaan energi, sumber-sumber mineral dan polusi. Tampak bahwa solusi dari satu masalah hanya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah lainnya, kalau tidak memperburuk masalah lainnya.

Sumber Daya Alam Yang Tidak Dapat Diperbaharui

Argumen yang dikemukakan adalah bahwa manusia tidak saja sedang mengalami penurunan sumber pangan, tetapi secara simultan

telah mencapai batas-batas pada berbagai area seperti tanah yang subur, air bersih, perikanan laut, minyak bumi dan mineral strategis lainnya.

Menurut penelitian Klub Roma (Club of Rome) 1968, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui lagi oleh usaha-usaha manusia. Sumber-sumber ini akan terus berkurang sampai habis dalam waktu 20 tahun. Jika ingin tetap dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi, maka konsumsi akan sumber-sumber ini harus dikurangi hingga 25% untuk 5 tahun berikutnya (1975). Boleh dikatakan makin menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources) akibat penggunaan teknologi. Diramalkan bahwa dengan konsumsi yang ada sekarang, sumber daya akan habis dalam 20-30 mendatang.

Namun dalam kenyataannya sumber daya alam hingga saat ini belumlah habis sehingga penelitian ini dikritik oleh banyak ahli, penyebab utama kekurangan penelitian ini hanya melihat sumber-sumber yang sudah diketahui (known reserves), padahal manusia mempunyai kemampuan untuk mencari dan menciptakan sumber baru. Sebuah laporan dari temuan-temuan para peneliti, di mana dalam laporannya Limits to Growth (1972) menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan dan lajunya pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan populasi telah menghasilkan serangkaian krisis yang saling terkait. Dunia dengan cepat kehabisan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia atau menyediakan bahan mentah bagi industrya. Akhirnya, kemampuan lingkungan hidup untuk sepenuhnya menyerap sisa buangan konsumsi manusia dan limbah industry menjadi semakin berkurang, masyarakat manusia akan hancur sebelum 2100 (Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009: 386). Kemudian *David Ziegler* mengemukakan ada tiga alasan mengapa sumber daya alam masih dapat terus ada, yaitu : *pertama*, perusahaan akan memberikan insentif atau membiayai untuk pencarian sumber-sumber baru. *Kedua,* permintaan akan berkurang karena harga barang tersebut akan meningkat sehingga angka konsumsi juga menurun. *Ketiga*, masyarakat akan memburu barang-barang substitusi yang lebih murah menggantikan barang sumber daya yang langka tersebut (Ziegler, 1984).

Jadi, yang mungkin terjadi adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi atau secara buruknya memperlambat semua kegiatan ekonomi. Dari semua kemungkinan terjadinya hal diatas, tidak ada alasan untuk berfikir bahwa ini berarti akhir dari peradaban.

Polusi Lingkungan

Berangkat dari pemikiran bahwa kelangkaan sumber daya paling tidak secara teoritis dapat diatasi dengan mengurangi atau memperbaiki distribusi dari sumber daya yang tersisa. Tetapi kerusakan lingkungan dapat menghancurkan seluruh umat manusia. Para pihak yang mengkhawatirkan masalah lingkungan menyatakan bahwa kekhawatiran mereka memiliki dasar yang kuat. Bahwa sejumlah produk-produk ciptaan manusia yang sebelumnya tidak terdapat di masa lampau, tidak dapat didaur ulang secara natural/alami oleh lingkungan.

Ketakutan akan hal ini sangat berlebihan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Klub Roma (The Limits to Growth). Elemen yang berhubungan dengan masalah ini antara lain adalah produk. Kebanyakan produk yang menjadi perhatian kita dibuat dari tangan manusia dan belum ada pada masa lalu. Selalu ada kesempatan untuk menciptakan produk baru dengan berbagai inovasi. Dengan adanya produk baru ini, diperkirakan akan merangsang timbulnya bencana yang tak terduga. Contohnya jika persediaan bahan bakar fosil mulai menipis, energi bisa diperoleh dari reactor nuklir, tetapi ancaman bencana reactor nuklir mencapai lebih dari 22.000 tahun, dan dapat menjadi bencana lainnya seperti membuat iklim dunia berubah dan juga dapat dibuat menjadi bom. Itu artinya secara bersamaan, inovasi-inovasi akan memberikan kesempatan pada umat manusia untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, yang merupakan ekspresi popular yang ditawarkan modernitas, sedangkan Enlightment menawarkan ide kemajuan.

Hal mendasar dari masalah lingkungan ini adalah hubungan yang saling berkaitan erat dengan aspek kehidupan yang terlibat di dalamnya. Karena sebagian besar masalah polusi bersifat global, maka solusi yang dihasilkan harus diantisipatif dan secara global pula. Sebenarnya solusi terhadap masalah mungkin saja terjadi, seperti yang telah dikemukakan para ahli, asalkan terjadi kerjasama secara global maka kita tidak yakin sepenuhnya bahwa polusi lingkungan akan menjadi suatu ancaman.

Ada bermacam bukti yang menunjukkan bahwa makhluk hidup sebenarnya siap untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat perubahan yang semakin meningkat. Hal ini memerlukan perubahan yang sangat tidak diduga sebelumnya untuk menghasilkan perubahan manusia secara radikal pada akhirnya.

Pengaruh kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, penipisan ozon tidak akan secara langsung menyebabkan timbulnya kekerasan bahkan konflik, tetapi setelah melewati proses yang panjang bila tidak segera diatasi, sangat mungkin berinteraksi dengan tekanan-tekanan lingkungan hidup dan menambah ketegangan-ketegangan. Di beberapa bagian Asia dan Afrika mulai terjadi kelangkaan kualitas lahan pertanian yang baik, beberapa bagian wilayah di dunia telah menghadapi kelangkaan air sehingga dapat memicu berbagai penyakit akibat kurang tersedianya air bersih.

Kelangkaan sumber daya lingkungan bisa memperburuk perpecahan sosial, meningkatkan konflik antar-kelas maupun antar-etnik, dan pada akhirnya hal tersebut membawa implikasi yang sangat nyata bagi hubungan antar-negara, atau dengan kata lain kelangkaan sumber daya alam dapat menghasilkan konflik antar-negara.

Adanya banyak persoalan yang menghalangi suatu solusi global, antara lain perbedaan prioritas masalah di berbagai Negara, misalnya DDT yang dianggap bahan beracun di berbagai Negara, tetapi di Negara lain masih digunakan untuk membasmi nyamuk malaria yang mengancam jiwa penduduknya. Selain itu perbedaan tingkat kemakmuran antar Negara mempengaruhi kemampuan masing-masing Negara untuk mengatasi masalah polusi. Kenyataan lain dari masalah ini adalah si kaya (Negara-nagara maju dan individu yang relative mampu) yang akan menggunakan kekuasaannya untuk menghindar dari dampak terburuk yang ditimbulkan dari polusi. Sehingga akan menjadi perbedaan kehidupan sosial masyarakat dunia antara si Kaya dan si Miskin bertambah tajam.

The Have versus The Have-Nots : The North-South Conflict.

Saat ini telah terdapat pembagian kondisi hidup antara Negara kaya dan Negara miskin, dimana Negara kaya menempati belahan bumi utara, sementara Negara miskin berada di belahan bumi selatan. Oleh karenanya perbedaan antara kedua golongan tersebut kerap kali disebut sebagai Konflik Utara-Selatan. Selama bertahun-tahun Negara kaya menghindari berbagai implikasi yang ada dalam asumsi bahwa suatu saat negara miskin akan mengejar ketertinggalannya dan menjadi semakmur mereka. Konsep pengembangan dan pembangunan suatu negara adalah negara yang mengembangkan kondisinya sesuai dengan definisi yang ada. Namun dalam kondisi dimana sumber-sumber alam semakin terbatas, mungkin akan

menghadapkan kita kepada pilihan yang mendasar. Apakah kita akan terus meningkatkan atau hanya memelihara standar tinggi yang sudah ada dalam kehidupan di Negara-negara makmur dan kaya?

Ada sebuah penawaran solusi secara teori yang dikemukakan oleh Henry Kissinger setelah pertemuan mentri-mentri UNCTAD yang keempat di Nairobi pada bulan Mei tahun 1976, bahwa perekonomian yang tangguh merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan menjanjikan kerjasama dan bantuan tekonologi. Walaupun begitu, ketegangan hubungan antara Utara-Selatan menurut Ziegler masih akan mendominasi konstelasi politik internasional.

Konsekuensi Terhadap Politik Internasional

Implikasi kelangkaan dan maldistribusi akan mampu menciptakan potensi konflik. Pertama, bisa dilihat dari sisi Negara miskin/berkembang sendiri dan yang kedua, justru dilihat dari kepentingan Negara maju.

Ziegler menentang adanya anggapan bahwa akibat maldistribusi dari Negara berkembang/miskin, maka negara yang relative miskin tersebut akan menyerang/berperang melawan negara maju untuk memperbaiki kondisinya (war of redistribution). Fakta membuktikan bahwa suatu negara yang berada dalam kondisi krisis ekonomi tidak akan mampu untuk memikirkan perang. Contoh Jerman pada masa inflasi besar tahun 1923 tidak berperang, tetapi depresi ekonomi mampu menampilkan tokoh fasis Hitler tahun 1930-an yang memimpin Jerman berperang.

Kemungkin lain yang dapat dilakukan oleh negara miskin dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya adalah bukan melakukan perang tetapi mengembangkan bentuk ancaman lain seperti India dan Korea Utara misalnya, yang telah mengembangkan persenjataan nuklirnya, yang dapat dijadikan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap negara kaya. Tetapi tidak semudah itu karena tindakan semacam ini justru dapat bersifat counter-productive karena akan dijadikan justifikasi bagi negara kaya untuk menghantam balik negara kecil tersebut dengan alasan mengganggu stabilitas dunia. Alasan mempertahankan stabilitas dunia juga membuat negara kaya yang menjadi pemicu perang atau konflik. Sistem internasional dan struktur distribusi yang ada sekarang jelas menguntungkan negara-negara kaya. Usaha-usaha negara miskin untuk mengubah

struktur yang ada akan menghadapi tantangan dari negara-negara kaya.

Kemungkinan yang kedua dari maldistribusi dan kelangkaan adalah justru datang dari negara maju yang ingin mempertahankan kepentingannya dan kemakmuran atas kepemilikan sumber daya alam. Karena merekalah yang memiliki konsumsi sumber daya terbesar di dunia. Contoh Amerika Serikat, penduduknya hanya mewakili 6% dari penduduk dunia, tetapi mengkonsumsi 30% segala bentuk energy dan 50% barang-barang manufaktur total dunia.

Kesimpulan

Setelah melihat kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi, masalah-masalah diatas memiliki nilai validitas yang cukup tinggi untuk terciptanya konflik apalagi bila muncul intervening variable. Non-conventional threat bila dilihat dari perspektif konflik, akan menciptakan pesimisme yang tinggi. Adanya kedua hal tersebut, kelangkaan sumber daya dan perbedaan kekuatan, membuat konflik menjadi inevitable, dan masalah kelangkaan sumber daya menjadikan hal yang mendasari lahirnya sumber konflik.

Dalam situasi seperti tersebut menjadi realita dalam sistem internasional, yang pertama adalah kelangkaan sumber daya yang diidentifikasi dalam empat bagian, yaitu : Meningkatnya populasi, berkurangnya suplay makanan, habisnya sumber daya dan polusi lingkungan hidup. Kedua, adanya perbedaan kekuatan sangat penting artinya dalam penentuan kepemilikan sumber daya yang langka. Negara dengan kapabilitas yang tinggi akan cenderung menguasai porsi dari sumber daya yang ada. Akibatnya konflikpun dapat terjadi antara negara kaya sebagai pihak yang mendominasi sumber daya dan negara miskin yang menuntut adanya redistribusi sumber daya. Namun tetaplah masyarakat merupakan suatu sistem yang ada guna mematahkan dominasi tersebut. Demikian pula negara kaya sebagai pihak yang mendominasi sistem internasional, jelas memperoleh keuntungan yang paling besar dan cenderung akan mempertahankan sistem yang ada.

Masalah berkurangnya sumber daya pangan tidak secara langsung dapat menjadi penyebab konflik karena selama ini dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi, tetapi akan menjadi konflik tergantung pada interaksinya dengan faktor lain. Semakin

tinggi intensitas interaksinya, maka semakin besar kemungkinannya untuk menjadi sumber konflik. Bahkan lebih jauh lagi, dampak teknologi dapat menjadi sumber konflik yang baru. Artinya, penyelesaian suatu masalah bisa jadi merupakan awal dari masalah yang baru/lainnya.

Daftar Pustaka

Buzan, Barry, 1991, *People, States and Fear: An Agenda for Internasional Security Studies In the Post Cold War,* second edition, London: Harvester Wheatsheaf.

_____, 1998,*Security A New Framework for Analysis*, London, Harvester Wheatsheaf.

Gilphin, Robert, 198i, *War and Change in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.

Steans, Jill & Pettiford, Lloyd, 2009, *International Relations: Perspectives and Themes*, Pearson Education Limited, England.

Ziegler, David W, 1984, *War, Peace and International Politics*, Little Brown, Canada.

Transnasionalisasi Ideologi:Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera

Rusdiyanta, Muh. Umar Wirayuda, Doddy Wihardi[1]

Abstract

"The research explains about the Ikhwanul Muslimin influence to the Welfare Justise Party (PKS) in the political ideology dan the behavior. To analyse this problems, we use concepts of transnationalization, spreading of culture, political ideology, party and also relationship between the religion and state. This research used the approach qualitative, with these the datas collecting technique were literature study, interview and survey. The result of this research are found there three especial medium which used by Mid-East society and Indonesia in the ideological interaction or entry of values of Ikhwanul Muslimin to Indonesia like told by Samuel P. Huntington. First, role of Mid-East collegiate. Second, role of institute education of Islam. Third, publication. There are strong indication of equation between the Ikhwanul Muslimin and the Welfare Justice Party in some cases, among others in the education model, the state concept, the image and the forming of cadre".

Key word: transnationalization, political ideology, political party, Ikhwanul Muslimin, Welfare Justice Party.

A. Latar Belakang

Sejak paruh akhir Abad ke-20 kecenderungan politik global dikejutkan hempasan badai politik Islam yang merebak ke hampir seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. (Pribadi:2005:51) Kebangkitan Islam berpengaruh terhadap hampir seluruh masyarakat muslim dimana simbol-simbol Islam semakin dipegang teguh dan didukung oleh satu miliar umat Islam di seluruh dunia yang membentang dari Maroko sampai Indonesia. (Huntington, 2005:188) Dinamika pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran dan gerakan politik dunia Islam, khususnya Timur Tengah sebagai pusat peradaban umat Islam. Pengaruh pemikiran dan gerakan politik itu ditentukan oleh beberapa faktor. Terdapat dua peristiwa penting yang menandai era Kebangkitan Islam global serta pengaruhnya bagi negara-negara lain. *Pertama*, bangkit dan

[1] Semua penulis adalah Dosen Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

berkembangnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir oleh Imam Hasan Al-Banna pada tahun 1928. *Kedua*, keberhasilan Revolusi Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi dan memunculkan tokoh Revolusi Iran yaitu Ayatullah Khomeini. Seiring kemunculannya politik identitas Islam menjadi simbol perlawanan terhadap kepengapan rezim politik otoritarian yang berbasis pemahaman negara-bangsa-partai tunggal, sehingga tak pelak Kebangkitan gerakan-gerakan Islam di negara-negara berpenduduk Islam memunculkan sejumlah isu demokratisasi misalnya menguatnya tuntutan terhadap partisipasi rakyat lebih besar dalam politik. (Damanik, 2002:7)

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia pada rezim otoritarian Soeharto, selama Orde Baru potensi umat yang besar dalam gerakan politik tidak sepenuhnya dapat diakomodir ke dalam organisasi Islam yang ada seperti Muhammadiyah dan Nahdlhatul Ulama (NU). Dibukanya era demokrasi di Indonesia melalui perjuangan yang dikenal dengan perjuangan reformasi oleh mahasiswa, yang diiringi dengan runtuhnya rezim Soeharto. Pelembagaan dari pemikiran Hasan Al-Banna dalam politik melalui gerakan *tarbiyah* itu mentrasformasikan dirinya kedalam partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK). Keputusan gerakan *tarbiyah* melegitimasikan diri menjadi partai politik dilakukan bersamaan dengan munculnya liberalisme politik yang ditandai oleh munculnya partai politik dengan membawa beragam ideologi dan strategi perjuangan, maka timbul keinginan untuk mendirikan partai politik Islam dikalangan aktivis Islam kampus era 80-an, untuk itu dilakukanlah survey terbatas untuk menentukan perlu atau tidaknya mendirikan partai Islam untuk mewadahi aspirasi mereka di bidang politik. Hasilnya, 60 % lebih responden menyatakan setuju berdirinya partai Islam yang kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). (Furqon, :4)

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana transnasionalisasi ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir berpengaruh pada Perilaku Politik Partai Keadilan Sejahtera?Apakah indikasi kesamaan kedua organisasi tersebut?

B. Kerangka Teori

Interaksi transnasional, menurut Richard Folk (Mas'oed, 1994:231) adalah perpindahan barang, informasi dan gagasan melintas batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah. Ciri-cirinya antara

lain: (1) adanya berbagai jenis interaksi yang mem by pass pemerintah negara dan secara langsung mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional; (2) aktor non-negara dapat mempengaruhi politik dunia secara langsung , tidak hanya melalui pengaruh atas negara-bangsa; (3) bukan semata-mata isu militer dan keamanan, tetapi juga ekonomi (ekstensif).

Banyak pakar yang menyimak peran khas dari gerakan sosial. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara utama menata ulang masyarakat modern. Gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk membangun tata kehidupan yang baru (Blummer 1951), gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial (Lang&Lang 1961), gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengubah nilai dan norma (Smelser 1962). Sztompka, 2004:324)

Gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu usaha kolektif untuk meningkatkan atau menentang perubahan dalam masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh kelompok sosial ini lebih merupakan suatu kelompok gerakan yang bersimpati pada pandangan sosial atau doktrin tertentu yang ditampakkan dalam perdebatan sehari-hari dan peran serta mereka, misalnya dalam kegiatan-kegiatan demokrasi (Tuner & Killen, dalam Simamora 1985:296). Keberhasilan jangka panjang gerakan–gerakan sosial itu tergantung pada beberapa kondisi umum. Satu sisi yang paling penting dari gerakan sosial adalah bahwa gerakan-gerakan tersebut harus merumuskan doktrin yang mampu meningkatkan antusiasme dan komitmen untuk kegiatan-kegiatan politis. Doktrin yang berhubungan dengan kemerdekaan nasional, emansipasi wanita atau tujuan umum lainnya yang dirasa penting oleh sebagian besar manusia harus didasarkan atas suatu teori sosial yang dapat memperjelas permasalahan pokok, menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapainya menggaris bawahi bentuk-bentuk alternatif masyarakat.

Aswab Mahasin membuat pemetaan dasar dalam menganalisa anatomi gerakan-gerakan sosial, yaitu berdasarkan (Mahasin, 1989:4) :

1. Basis Massa

Pada tahapan ini Aswab Mahasin mengutip Eric Wolf, Barrington More dan Landsberger, bahwa gerakan massa yang ada lebih banyak diprakarsai oleh golongan menengah. Dalam kasus Indonesia, hal ini berlaku dalam gerakan yang dijalankan oleh aliran ideologis manapun. Banyak organisasi gerakan dimulai dalam lingkungan kecil kelompok mereka sendiri dalam berbagai usaha

swadaya, sebelum akhirnya melebarkan sayap kelompok dan golongan lain kedalam komunitas yang lebih besar dan terstruktur.

2. Ideologi dan Tema

Kecenderungan sebuah gerakan yang dapat melibatkan massa dalam jumlah besar adalah faktor pemersatu yang dapat dijadikan solidaritas bersama. Faktor pemersatu ini bisa berupa Ideologi tertentu. Ideologi penting bagi suatu gerakan sosial. Ideologi berfungsi sebagai jenis perekat yang menyatukan orang-orang dalam suatu kepercayaan bersama dan memantapkan solidaritas.(Zanden, 1990:594) Hal ini terlihat dalam banyaknya gerakan yang dilatarbelakangi oleh ideologi seperti komunis dan Islam.

Ideologi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ideologi bukan seperti yang difahami oleh teori Marxis, dimana ideologi merupakan fungsi dari kepentingan kelas borjuis terhadap proletar, tetapi mengutip apa yang dikemukakan oleh Edward Shils bahwa ideologi adalah produk dan usaha manusia untuk menciptakan suatu tata intelektual tentang dunia dan sebagai suatu intensifikasi kebutuhan manusia akan peta kognitif dan moral yang harus dicapai. Sebagaimana kata Shils pula, ideologi biasanya lahir dalam kondisi krisis dan tumbuh di berbagai sektor masyarakat yang tidak dapat menerima pandangan hidup yang sedang berlaku. (Shils, 1968:66-67)

Seperti halnya Ikhwanul Muslimin menurut Amien Rais jelas mempuyai ideologi yang dinamakan *fikrah*. Islam sebagai ideologi, oleh mereka dipandang mencakup seluruh kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga merupakan doktrin, ibadah, tanah air, kewarganegaraan, agama, negara, spiritualis, aksi, Al-Quran dan militer, semangat Ikhwanul Muslimin adalah kembali ke dasar-dasar Islam hal ini menjadi inti dari doktrin kebangkitan Islamnya.(Rais, 1982:189)

a. Organisasi Strategi dan Taktik

Menurut Aswab Mahasin persoalan yang paling menonjol dari berbagai pengorganisasian gerakan sosial adalah kemajemukan dan faksionalisme antara berbagai aliran dan gerakan itu sehingga membuat kesepakatan dan strategi bersama yang dapat diterima oleh semua anggota. Perubahan yang dikehendaki oleh rakyat negeri ini adalah perubahan dalam kerangka sistem yang telah ada (*a change within the system*) atau biasa dikenal dengan Istilah reformasi bukan perombakan total sistem yang berlaku dari akar-akar bawahnya (*a change of the system it self*) atau revolusi.

Gerakan Sosial memiliki macam tipologi, salah satu bentuk tipologi tersebut adalah gerakan sosial keagamaan. Menurut Stephan K. Sanderson (1993), gerakan sosial keagamaan disebut juga gerakan revitalisasi atau *millenarian*. Revitalisasi berarti sebuah upaya untuk menciptakan eksistensi yang baru atau yang "direvitalisasi" yang disesuaikan dengan keadaan yang lebih baik.

Gerakan revitalisasi atau *millenarian* secara khusus terjadi dalam kondisi ketegangan atau krisis sosial yang ekstrem, dalam suatu masa perubahan sosial yang cepat ketika orang-orang terbangun dan mengalami *dis-orientasi* seperti ketika terjadi penindasan dan eksploitasi dan mencapai batas-batas yang tak dapat ditolerir. Dalam kondisi-kondisi demikian gerakan-gerakan *millenarian c*enderung timbul ketika orang diresahkan oleh apa yang terjadi atas diri mereka.

Gerakan *millenarian* ini mengandung unsur keagamaan maupun unsur politik dalam ideologi dan strategi mereka untuk melakukan perubahan, akan tetapi campuran kedua unsur itu berbeda-beda dari suatu gerakan dengan gerakan lainnya. Ada gerakan yang sangat politis dan radikal secara militian dan dilakukan dengan cara revolusioner yang mendorong dilakukannya perubahan sosial secara cepat seperti *Hizbullah* di Libanon, *Jama'at Islamiyyah* Pakistan dan dengan cara gradualis (bertahap) adaptasionis.

Gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir dan gerakan-gerakan yang berafiliasi kepadanya termasuk kategori gerakan gradualis adaptasionis yaitu gerakan yang mencoba bergerak pada skala yang besar dalam batas-batas legalitas seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena menyadari bahaya-bahaya yang menyertai konfrontasi revolusioner dengan para penguasa, gerakan-gerakan ini mengikuti kebijakan bertahap untuk mempertinggi kesadaran keagamaan dikalangan masyarakat, sementara gerakan ini terus berupaya mendorong pelaksanaan *syari'ah* oleh negara. Dalam upaya mereka untuk menegakkan tatanan Islam pada akhirnya kelompok-kelompok ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan untuk mengadaptasikan ideologi-ideologi dan program-program mereka dengan kondisi modern. (Hunter, 2001:16)

Ikhwanul Muslimin memulai kiprahnya dengan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik di Mesir, walaupun hingga saat ini Ikhwanul Muslimin belum pernah memegang puncak kekuasaan, namun peran Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan mesir cukup signifikan, di Mesir Ikhwanul Muslimin menjadi partai oposisi yang cukup disegani.

Melalui gerakan-gerakan sosial, para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun partisipasi mereka itu bersifat tidak kontinu dan tidak terorganisir jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang. Mereka harus membentuk partai politik atau sekurang-kurangnya mereka bekerjasama atau mendukung suatu partai politik yang ada. Dengan cara demikian, mereka memiliki peluang untuk menata kembali struktur masyarakat, terutama ketika mereka berhasil menduduki kursi kekuatan politik dalam rangka itu diperlukan suatu partai politik yang efektif. (Maran, 2001:81)

Partai politik memiliki definisi yang beragam. Gabriel A Almond menjelaskan jenis-jenis kelompok kepentingan dengan menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik termasuk diantaranya kelompok institusional yakni partai politik yang benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik yakni jabatan politik maupun pemerintahan dan juga merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah. (Mas'oed & Andews, 1978:53).

Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo:2008)

Sedangkan berdasarkan cirinya Gabriel Almond mengklasifikasikan partai politik berdasarkan basis sosial. Menurut basis sosialnya partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu (Surbakti:1992:123-4) :

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah-daerah tertentu.

C. Masuknya Ikhwanul Muslimin ke Indonesia

Dalam konteks diskursus Kebangkitan Islam Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin berperan sebagai *sender* (pengirim) dan Indonesia berperan sebagai *receiver* (penerima), tetapi terlalu *naif* untuk menafikan peran masyarakat Indonesia dalam menjembatani proses tersebut, mengingat kondisi sosial dan politik Indonesia yang sangat plural dan dinamis, didukung dengan penduduk Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia.

Kebangkitan Islam yang terjadi pada tahun 1970-an yang juga memperkuat peradaban Islam di seluruh dunia sebagaimana dinyatakan oleh Samuel P. Huntington adalah sebagai berikut :

> "Sebuah keterikatan yang sangat dalam dengan identitas serta unitas orang Islam dalam konteks yang lebih jauh, distimulir oleh adanya dekolonialisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan perubahan tatanan ekonomi internasional yang diasosiasikan dalam beberapa hal, kekayaan minyak dikalangan negara-negara Islam yang tersimpan dibawah tanah, sarana komunikasi modern tampaknya mampu dan mengelaborasikan ikatan-ikatan yang mempersatukan umat Islam. Terjadinya kenaikan jumlah umat Islam yang melakukan ibadah haji ke Mekkah, menjadi sebab lahirnya "rasa identitas" .....Meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia, Malaysia yang belajar di universitas-universitas Timur Tengah, penyebaran ide-ide dan hubungan personal lintas bangsa melalui pelbagai konferensi dan saling komunikasi yang terjadi dikalangan intelektual Muslim,... melintasi batas-batas antar bangsa dan para da'i pun mampu menjangkau pendengar mereka yang berada jauh di luar wilayah mereka. (Huntington, 2005:321-2)

Dengan demikian, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington masuknya nilai-nilai Ikhwanul Muslimin ke Indonesia melalui tiga sarana utama. *Pertama*, peran alumni Timur Tengah. *Kedua*, peran lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, publikasi umum.

C. 1. Peran Alumni Timur Tengah

Sarana utama masuknya pengaruh Ikhwanul Muslimin ke Indonesia adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar ke beberapa negara di wilayah jazirah Arab seperti Arab Saudi, Suriah, Yordania, Sudan, dan terutama Mesir. Dalam hal

gerakan sosial pelajar atau mahasiswa menjadi saluran kontemporer yang paling penting bagi ide-ide Islami dari Timur Tengah ke Indonesia. Pada tahun 1980-an jumlah mahasiswa Indonesia yang berangkat ke kawasan tersebut berjumlah 700 orang, namun pada tahun-tahun terakhir jumlah mahasiswa yang belajar ke kawasan tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu dikarenakan banyaknya negara-negara jazirah Arab dalam menawarkan beasiswa dan juga bantuan dari organisasi, lembaga dan individu dari jazirah Arab.

Menurut data yang dikeluarkan Departemen Agama RI jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di jazirah Arab pada tahun 2004 berjumlah 20.000 orang dengan pengklasifikasian negara yang dituju seperti Mesir (3.528), Arab Saudi 87 orang, Sudan (120), Yaman (143), Tunisia (12) dan Iran (65). Dan pada tahun 2006-2007 antuasiasme mahasiswa Indonesia semakin bertambah, hal itu ditandai dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di beberapa negara tersebut, Mesir 4100 orang, Iran 150 orang, Arab Saudi 2500 orang, Sudan 450 orang, Pakistan 600 orang, Yaman 650 orang, Yaman 650, Yaman 650 orang, Jordania 95 orang. (Laporan BK-KPPI, 16-17 Juli 2007)

Para mahasiswa menyadari posisi negara jazirah Arab sebagai pusat penyebaran Islam mempunyai peranan yang dominan dalam memberikan warna gerakan keislaman di tanah air, disanalah pusat segala bentuk perkembangan dan pemikiran gerakan Islam di seluruh dunia. Mahasiswa tersebut tidak secara khusus pergi ke negara-negara di kawasan jazirah Arab untuk mempelajari ide-ide atau gagasan-gagasan gerakan Islam akan tetapi untuk memperdalam studi Islam. Namun waktu yang cukup lama selama menempuh masa studi tersebut memberikan ruang dan kesempatan untuk berinteraksi dengan tokoh pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin bentukan Hasan Al-Banna di Mesir. Mahasiswa Indonesia sering bergabung kedalam lingkaran Ikhwanul Muslimin dan secara perlahan mempelajari ide-ide gerakan Ikhwanul Muslimin.

Posisi alumni Timur Tengah menjadi sangat penting dalam proses transfer pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Proses tersebut tidak hanya terjadi di era 80-an tetapi terus berkembang hingga saat ini. Adanya kontak langsung dengan para aktivis Ikhwanul Muslimin membuat sejumlah mahasiswa begitu memahami dengan baik gerakan tersebut dan diperluas ketika berada di Indonesia. Kepulangan mereka ke tanah air pada dasarnya tidak memutuskan hubungan dengan para aktivis muslim sejenis dibelahan dunia Islam yang lain, tetapi justru membuka

pengembangan dan ideologi gerakan. Dan diantara mereka kemudian menjadi pengurus PK-Sejahtera.

C.2. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana yang ikut berperan terhadap penyebaran nilai-nilai Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Pada umumnya penyebaran melalui lembaga pendidikan ini difasilitasi oleh lembaga pendidikan Timur Tengah, baik itu lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Sudan, dan Arab Saudi, lembaga-lembaga non-pemerintah seperti *International Islamic Relief Organization* (IIRO), *World Assembly of Muslim Youth* (WAMY), organisasi Islam *Al-Haramain* serta individu Timur Tengah mempunyai peranan penting dalam perkembangan dakwah di Indonesia.

Menariknya, kontak para aktivis tersebut dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin terjadi melalui mediasi Arab Saudi. Peran kerajaan Arab Saudi sebagai *Khadimul Haramaian* bagi negara-negara muslim lain ikut melatar belakangi kontak ini. Banyak dari para tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mengajar di universitas-unversitas ternama di Arab Saudi dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang disponsori oleh pihak Arab Saudi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA) di Indonesia.

Salah satu deklarator PK-Sejahtera yang juga lulusan LIPIA adalah Anis Matta, Lc yang kini menduduki jabatan sebagai SekJen PK-Sejahtera. Melalui lembaga LIPIA inilah inseminasi gagasan dari gerakan Ikhwanul Muslimin mulai meluas. Warna utama dari produksi pemikiran dalam lembaga LIPIA dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dari tokoh Ikhwanul Muslimin, dimana selanjutnya melalui proses perkembangan intelektual yang berlangsung di lembaga ini embrio PK-Sejahtera mulai terbentuk. (Pribadi, 2005:82)

C.3. Publikasi

Publikasi umum menjadi faktor penting penyebaran nilai-nilai Ikhwanul Muslimin ke Indonesia khususnya dalam pengkristalan ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap PK-Sejahtera. Penyebaran media cetak dari Timur Tengah memiliki akar sejarah yang cukup panjang, dalam proses tersebut publikasi umum seperti buku-buku dan majalah merupakan instrumen yang sangat penting dalam membentuk ideologi, menyatukan keyakinan dan

menyebarkan pesan ideologis. Publikasi umum berfungsi untuk memperluas cakrawala pandangan rakyat melampaui dunia pribadi mereka serta menuju pengalaman kelompok, kelas dan bangsa lain yang berjauhan letak geografisnya. (Fealy, 2003: 331). Pada awalnya publikasi yang diekspor berbahasa Arab kemudian diterjemahkan oleh para alumni Timur Tengah dan alumni LIPIA serta sebagian dari orang-orang yang mampu berbahasa Arab yang memiliki pandangan dan ideologi yang relatif sama.

Buku-buku yang dikarang oleh para tokoh Ikhwanul Muslimin sejak tahun 80-an mendapat permintaan yang cukup pesat, bahkan hingga saat ini buku-buku yang telah diterjemahkan menjadi buku panduan para aktivis dakwah dalam berbagai kegiatannya dan menjadi buku pedoman wajib bagi para kader-kader PK-Sejahtera. Buku-buku tersebut secara khusus diekspor oleh para tokoh Ikhwanul Muslimin ke Indonesia untuk menyampaikan pesan dan ideologinya, sehingga terbentuk sebuah jaringan yang luas. Dalam sistem Ikhwanul Muslimin publikasi umum tersebut diatur oleh Anggaran Dasar pasal 58 oleh Seksi Dakwah, dimana seksi ini berperan dalam penerbitan risalah-risalah atau buku-buku pemikiran para tokoh mereka, karena itu tidak ada sebuah risalah atau buku yang dicetak kecuali setelah diajukan kepada seksi dakwah.

Melalui sarana penerbitan inilah ide-ide dan gagasan Ikhwanul Muslimin yang terdapat dalam PK-Sejahtera mulai terbentuk. Bayang-bayang Ikhwanul Muslimin senantiasa berada dalam partai ini, walaupun dalam AD/ART PK-Sejahtera tidak tertulis keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin namun dengan melihat variabel-variebel tersebut tak jarang PK-Sejahtera disebut sebagai Ikhwanul Muslimin Indonesia. Ideolog Ikhwanul Muslimin Yusuf Al-Qordhowi dalam bukunya berjudul Umat Islam Menyongsong Abad ke 21 mengatakan bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan pembaharuan dan kebangkitan Islam yang berusaha membangunkan umat manusia yang telah eksis di 70 negara di seluruh dunia, disemua negara itu mereka memiliki pengikut yang tidak sedikit, bekerja di bawah naungan berbagai lembaga sebagian diantaranya terbuka dengan nama-nama partai yang disahkan oleh undang-undang di negara setempat, sebagaimana yang terjadi di Jordania, Yaman dan Indonesia. Lebih dalam ia menyatakan PK-Sejahtera merupakan *imtidad* (kepanjangan tangan) dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia dan zamannya. (Qardhawi, 2001:92)

D. Kesamaan Ikhwanul Muslimin dan PKS

Ada beberapa kesamaan antara Ikhwanul Muslimin dan PK-Sejahtera:

D.1. Model Tarbiyah

Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap perilaku politik PK-Sejahtera didasarkan pada kesamaan nilai-nilai Ikhwanul Muslimin dalam PK-Sejahtera setelah terjadinya persentuhan antara kedua gerakan dakwah tersebut. *Harakah Tarbiyah* (gerakan tarbiyah) terhubung erat dengan gerakan dakwah Islam Transnasional Ikhwanul Muslimin. *Harakah Tarbiyah* merupakan sebuah konsep pembinaan yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin, sebuah pembinaan yang kemudian menjadi konstituen PK-Sejahtera.

Urgensi *tarbiyah* dalam *manhaj* (sistem) Ikhwanul Muslimin dan PK-Sejahtera memiliki nilai yang begitu besar dalam membentuk sebuah generasi yang unggul dibawah ridho Allah SWT. Keduanya sangat memahami bahwa *tarbiyah* merupakan langkah yang efektif untuk melakukan proses perbaikan dan pembinaan individu dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya untuk mengantarkannya kepada suatu tujuan yaitu masyarakat muslim, lalu umat muslim dan kemudian negara yang menegakkannya. Secara ideologis model *tarbiyah* ini adalah meyakini Islam secara komperhensif dan menjadikan Nabi dan para sahabat-sahabatnya sebagai model yang harus diikuti dalam kehidupan nyata, karena ditangan merekalah kejayaan Islam diraih.

Tarbiyah dalam *jama'ah* Ikhwanul Muslimin telah mendapatkan bentuknya yang kompherensif karena semenjak kelahirannya hingga saat ini mereka senantiasa mencurahkan perhatiannya terhadap berbagai dimensi fundamental dalam proses *tarbiyah* ini yaitu: *Pertama*, *manhaj* yang benar. *Kedua,* perangkat yang komperhensif. *Ketiga*, pimpinan yang tegas dan terpercaya. (Mahmud, 1997:123)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya dimana PK-Sejahtera muncul dari evolusi gerakan *tarbiyah* yang digerakkan oleh aktivis-aktivis dakwah dan menjadikannya saat ini sebagai *grand design* berpolitik. Sejak awal kemunculannya *tarbiyah* ini merupakan gerakan tertutup dan anggotanya diseleksi secara seksama, di didik dalam suatu program yang didesain untuk memastikan perilaku yang saleh. Penekanannya lebih kepada kesalehan pribadi dan solidaritas kelompok daripada pelibatan massa.(Fealy, 2007 113) Tertutupnya metode *tarbiyah* lebih dikarenakan faktor rezim

Soeharto yang mengebiri segala bentuk aktifitas keagamaan. Para pendiri PK-Sejahtera memaknai itu semua sebagai *sirriyyatu ad-dakwah* (dakwah secara sembunyi-sembunyi) seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekkah, hal itu semata-mata respon dari kondisi represif yang dimunculkan dari lingkungannya. Akan tetapi tatkala kondisi itu sudah dapat diantisipasi maka beliaupun kembali menyiarkan Islam secara terang-terangan dan terbuka (*jahriyyatu dakwah*). (Ismail, 1998:36) Hal itu pulalah yang diyakini oleh PK-Sejahtera dimana *tarbiyah* dewasa ini memasuki tahap *'amul jamaahir* (periode keterbukaan).

PK-Sejahtera menjadikan *tarbiyah* sebagai proses untuk membentuk dan mencetak kader-kader PK-Sejahtera yang mampu memberikan kepribadian yang baik dalam masyarakat dan institusi negara. Selain itu pula sarana *tarbiyah* digunakan sebagai bentuk melaksanakan fungsi partai karena dalam proses *tarbiyah* merupakan sarana untuk melakukan rekruitmen, komunikasi dan sosialisasi politik terhadap nilai-nilai yang ada dalam PK-Sejahtera terhadap kader PK-Sejahtera maupun terhadap masyarakat secara luas.

Pola rekrutmen *tarbiyah* bersifat sukarela, bila memang tertarik individu boleh saja ikut pola *tarbiyah* yang dikembangkan oleh PK-Sejahtera, tetapi jika tidak boleh berhenti kapan saja. Namun stretegi ini terhitung efektif untuk menambah jumlah pengikut, sebab semakin rutin individu tersebut mengikuti pola *tarbiyah* maka semakin antusias dan semangat untuk lebih mendalami pola dan ideologi gerakan serta berpartisipasi dalam kegiatan partai secara umum. Kebanyakan dari khalayak masyarakat mengikuti *tarbiyah* ini diawali ajakan dan bujukan dari anggota lain yang telah terlebih dahulu bergabung (dengan tidak menunjuk tingkatan dan kelompok). Secara tidak tertulis peserta tarbiyah memiliki kewajiban untuk memberitahukan dan mengajak orang lain agar mengikuti model *tarbiyah* ini. Hal tersebut mengindikasikan pola ini dilakukan secara sistematis dan terpola bukan bersifat tidak sengaja.

Tarbiyah dalam implementasinya memiliki tahapan penjenjangan dari sebelumnya bersifat sukarela, umum dan terbuka. Sasaran dakwah tersebut dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, pihak-pihak yang bisa menerima dakwah saja (*qaabil dakwah*) mereka ini pada umumnya merupakan orang awam, pada tahapan ini individu hanya diperkenalkan secara umum mengenai *tarbiyah* baik berupa diskusi, nasihat dan ceramah dalam masjid-masjid materi yang disampaikan pun bersifat nilai-nilai Islam secara umum. *Kedua,*

mereka yang menerima dakwah sekaligus menerima perubahan (*qaabil taghyiir*) artinya setelah menerima materi mereka diharapkan mampu berubah secara perilaku dan pola pikir yang lslami. Materi yang disampaikan pada tingkatan ini diselingi materi mengenai ideologi gerakan dan dilakukan dengan membentuk kelompok kecil dengan jumlah anggota 5-10 orang. *Ketiga*, mereka yang menerima dakwah dan juga siap menjadi agen-agen perubahan dalam lingkungan yang lebih luas dan kompleks (*'anashir taghyir*).

T*arbiyah (halaqah)* menjadi diseminasi ideologi alternative *vis-à-vis* ideologi negara yang dianggap sekuler dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.(Rapi, 2007:144). Dari proses tarbiyah tersebut, sampai kepada penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk tujuan jangka pendek yang disebut sebagai misi pertama adalah ibadah dan melakukan kebajikan. Misi ini meliputi perbaikan individu, keluarga dan membangun masyarakat. Tujuan jangka panjang yang juga disebut sebagai misi kedua adalah jihad untuk menegakkan syariat Islam. Misi ini meliputi perbaikan pemerintahan, mengembalikan kekhalifahan, mencapai kepemimpinan dan kepeloporan.

Gambar 1
Filsafat Tarbiyah

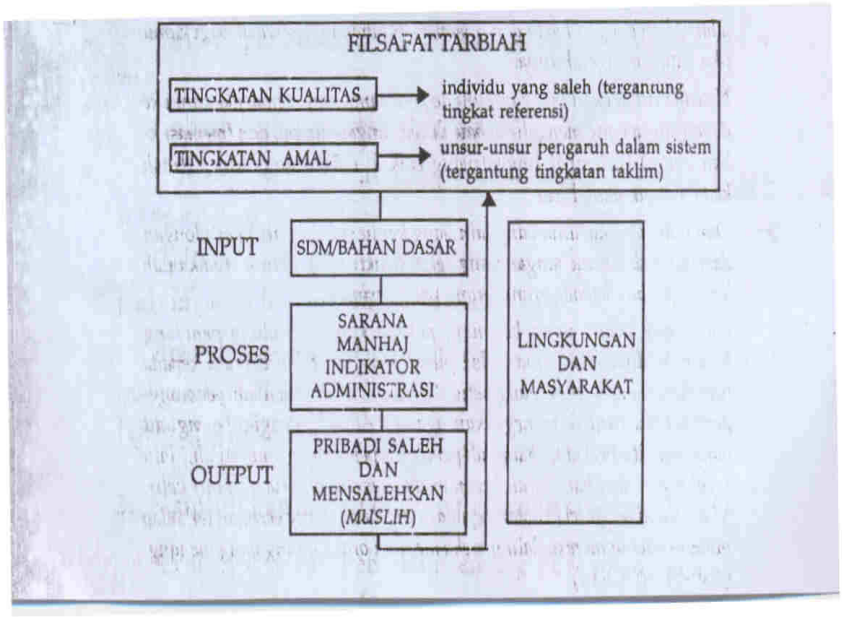

D. 2. Konsep Negara

Landasan konsep Negara bagi PK-Sejahtera memuat dua elemen utama, yakni. *Pertama*, keyakinan akan implementasi ajaran Islam secara menyeluruh (*Syumuliyatul Islam*). Dalam doktrin ini Islam dipandang sebuah *way of life* yang mencakup seluruh bidang kehidupan, dimana antara satu bidang dengan bidang lainnya terintegrasi dalam satu totalitas keislaman. Kesempurnaan ini pada gilirannya mengarah kepada sebuah keyakinan bahwa pandangan segmenter yang memisahkan antara satu bidang kehidupan dengan kehidupan yang lain tidak bisa diterima. *Kedua*, Paradigma bertahap (*gradualism approach*). Kombinasi keduanya dalam "jantung pemikiran" PK-Sejahtera inilah yang pada akhirnya nanti menentukan corak pemikiran politik PK-Sejahtera yang berkomitmen menegakkan sistem Islam secara komprehensif dengan cara-cara toleransi, persuasif dan kontekstual. (Noor, 2007:9)

Seperti halnya konsep Negara yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin, PK-Sejahtera menganggap Islam dan Negara sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, bagi PK-Sejahtera pendirian negara Islam formal di Indonesia bukanlah merupakan perkara yang mendesak dan dicapai dalam waktu dekat. PK-Sejahtera mentransformasikan agenda-agenda Islami kedalam program politik-keagamaan dengan menghindari penggunaan "idiom-idiom politik" yang memperlihatkan keinginan kuat untuk tidak melakukan perubahan melalui pendekatan struktural secara frontal. Pilihan PK-Sejahtera untuk menghindari Islamisasi berdasarkan pendekatan struktural ini agaknya tidak dapat dipisahkan dari geneologi PK-Sejahtera sebagai partai dakwah yang banyak memanfaatkan pelajaran dari induknya yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Dengan mengembangkan pendekatan Ikhwanul Muslimin, tahapan dakwah PK-Sejahtera dilakukan melalui proses yang gradual. Karena itu tahapan perjuangan PK-Sejahtera dimulai dari pembentukan pribadi Islami (*Ishlah an-nafsi*) dengan memiliki nilai-nilai pokok agama yang mendasari semua aktifitas hidupnya, kemudian pembentukan keluarga Islami (*takwin baiti al-muslimi*). Keluarga adalah laboratorium utama dan pertama bagi generasi Islam. dari lingkungan keluarga kemudian mereka keluar untuk membimbing masyarakat menuju arah yang lebih baik (*irsyad al-mujtama'*). Pada tahap inilah aktivis dakwah harus memahamkan kepada masyarakat bahwa Islam merupakan sistem hidup.

Kemudian aktivitas dakwah menuju pada tatanan pemerintahan atau negara (*islahul hukumah*) sehingga pada akhirnya nanti *syariat* Islam akan dapat diaplikasikan dengan sempurna dan masyarakat akan menerima karena telah mempunyai pemahaman terhadap syariat Islam (Fahmi, 2007:175-6)

Gambar 2
Tahapan Dakwah Menurut PK-Sejahtera

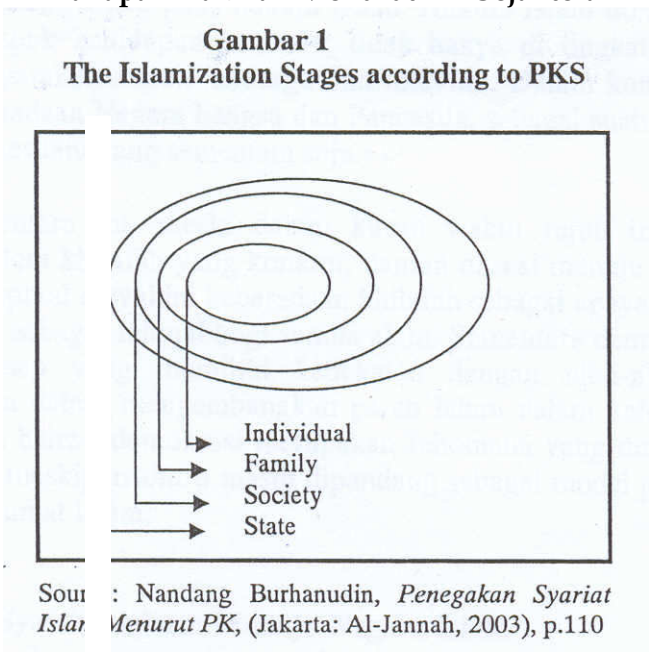

Untuk merealisasikan hal tersebut, menurut Anis Matta ada empat hal yang harus dilewati (Matta, xi)

1. Tahapan *mihwar tandzhimi* yaitu membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid sebagai kekuatan utama yang mengoperasikan dakwah. Karena organisasi ini adalah tulang punggung dakwah, maka ia harus diisi oleh kader-kader yang kuat dan tangguh dalam seluruh aspek kepribadiaan. Untuk mencetak kader-kader umat itu diperlukan proses pembinaan dan kaderisasi yang sistemik, integral, dan waktu yang cukup panjang.
2. Tahapan *mihwar sya'bi* yaitu membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah, yang ingin dicapai pada tahap ini adalah terbentuknya opini publik yang Islami, struktur budaya dan adab-adab sosial yang islami serta dominasi figur dan tokoh islami dalam masyarakat.

3. Tahapan *mihwar muassasi* yaitu membangun berbagai institusi untuk mewadahi pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan diseluruh segmen kehidupan. kalau dalam tahapan pembentukan basis sosial kita (baca; PK-Sejahtera) menyebarkan kader-kader dakwah kedalam masyarakat sosial, dalam tahapan institusi kita menyebar kader ke institusi yang ada. Kader-kader harus mampu mengisi struktur yang ada di lembaga tinggi negaram baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tahapan *mihwar daulah*, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat kompleks. Dakwah harus sampai pada tahapan negara pasalnya institusi negara dibutuhkan dakwah untuk merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah SWT atas kehidupan masyarakat. (Matta, xxi-xxii)Proses gradual yang bertumpu pada *tarbiyah* dan kejelasan langkah dakwah Ikhwanul Muslimin yang diyakini PK-Sejahtera adalah karena Ikhwanul Muslimin dalam setiap dakwahnya melalui fase utama: *Pertama*, tahap perkenalan (*ta'rif*) atau tahap perkenalan, menggambarkan ide (fikrah) dan menyampaikan kepada khalayak ramai dan kepada setiap lapisan masyarakat. Pada masa ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PK-Sejahtera berupa tabligh, ceramah umum, seminar dan pengajian. *Kedua*, tahap pembinanaan (*takwin*) yaitu memilih pendukung menyiapkan personil dan *mujahid-mujahid* dakwah serta mendidiknya. Tahap ini dalam konteks program partai seperti tarbiyah atau *halaqah. Ketiga*, tahap pelaksanaan (*tanfidz*) merupakan tahap pelaksanaan amal menuju produktifitas kerja partai yang optimal dalam mencapai tujuan. (Prayitno, 2003:13)

D.3. Sistem Kaderisasi

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya Partai Kader. PK-Sejahtera memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistemik dan metodik. Sistem dan metode dalam kaderisasi partai diadopsi dari sistem dan metode Ikhwanul Muslimin dimana dalam sistem dan metode tersebut para kader harus mampu menjaga eksistensi kepribadian Islami. Dalam sistem Ikhwanul Muslimin terdapat sistem pemantauan terhadap aktivitas dan pelaksanaan ibadah para kader yang tujuannya untuk menjaga konsistensi kepribadian Islami seperti pelaksanaan puasa sunnah, *qiyamullail* (shalat tahajud) dan membaca Al-quran secara rutin, hal ini pulalah yang membedakan kaderisasi PK-Sejahtera dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia.

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga menjadi partai besar. Departemen kaderisasi sebagai elemen struktural yang bertanggung jawab terhadap masalah pengkaderan merumuskan tujuh karakter (eksternal dan internal) khusus bagi kader PK-Sejahtera. Kapasitas internal meliputi kokoh dan mandiri, dinamis dan kreatif, spesialis dan berwawasan global. Kapasitas eksternal meliputi, murobbi produktif, beramal jama'i, pelopor perubahan dan ketokohan sosial. (DPP-PKS, 2004:xi). Kekhasan kaderisasi partai ini memiliki sejumlah persamaan dengan kaderiasi yang dituangkan oleh Ikhwanul Muslimin hanya saja PK-Sejahtera mencoba untuk memformat ulang penggunaan bahasa namun secara substansi sama.

Kaderisasi ini memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi partai ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Kekuatan utama partai kader ini terletak pada kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM)-nya. Ukuran kualitas SDM terletak pada kapasitas, kapabilitas dan kredibilitasnya. Kualitas yang harus dimiliki SDM partai adalah pemahaman dan komitmen ke-Islaman yang akan menjadi landasan dan kekuatan pendorong bagi seluruh tugas-tugas kerja kepartaian dan diarahkan untuk memahami masalah-masalah politik dan kepartaian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan visi, misi dan program-program partai.(Furqon, 2004:209)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kader dakwah yaitu: *Pertama*, keimanan yang kuat. *Kedua*, keikhlasan dijalan dakwah. *Ketiga, Hamasah* (semangat) yang tinggi. *Keempat*, amal dan *tadlhiah* (pengorbanan)(Ibid) Dalam *manhaj* kaderisasi anggota PK-Sejahtera, sarana kaderisasi yaitu.

1. Sarana kaderisasi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan kepartaian.
2. Sarana kaderisasi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan anggota partai.

Sarana kaderisasi partai dibagi kedalam dua bagian; kaderisasi formal dan informal. Sarana kaderisasi formal kelompok pertama meliputi Training Orientasi Partai (TOP) I dan TOP II, Training Dasar (TD) I dan TD II, Training Lanjutan (TL), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS), Analisa Kapasitas dan Integritas Personal (OPT), Sarana Kaderisasi Kelompok kedua meliputi Taklim Rutin Partai (TRP), Taklim Rutin Kader (TRK), Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISP) dan kegiatan Internal Partai (KIP). Selain sarana kaderisasi yang bersifat formal tersebut, PK-Sejahtera juga melakukan kaderisasi yang bersifat informal. Diantara sarana-sarana yang dilakukan dalam kaderisasi yang menjadi bentuk atau perangkat yang ada dalam *manhaj* Ikhwanul Muslimin antara lain; *halaqah atau taklim rutin*, *usrah*, *daurah*, *mabit, jalsah ruhiyah*, dan *rihlah*.(Romli, 2007:68)

D.4. Pencitraan

Ciri terakhir dari pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam PK-Sejahtera yang merupakan ciri Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang humanis dan moralis dalam berperilaku politik. Ciri terakhir partai ini jarang ditemukan pada partai-partai lain adalah fungsi layanan masyarakatnya. Akibat reputasi ini PK-Sejahtera menangguk reputasi sebagai salah satu dari sedikit partai yang retorikanya atas persoalan-persoalan sosial diwujudkan oleh program-program bantuan atau pendampingan regular masyarakat akar rumput. (Fealy, 2007: 115)

Sejak tampil ke pentas politik di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara *platform* PK dan PK-Sejahtera, tentunya komposisi perubahan tersebut terlihat pada perilaku politik PK-Sejahtera dan platform PK-Sejahtera secara keseluruhan. Karakteristik aktifis yang militan terlihat pada citra PK yang cenderung vokal dalam penegakan *Syariah Islam,* mayoritas para aktifis PK adalah mereka yang pernah merasakan dampak kekerasan dan situasi politik pada era Soeharto, hal itulah salah satu penyebab terbentuknya sikap militansi pada aktifis PK. Dalam hal dukungan pemilu menunjukkan dukungan yang masih terbatas bagi PK. (Ismail, 1998:106)

Konfigurasi PK-Sejahtera saat ini lebih menampakkan warna yang lebih terbuka. Mereka adalah generasi kedua dalam arti generasi yang tidak terlibat langsung dengan pemerintahan Soeharto. Sikap keterbukaan PK-Sejahtera ditujukkan dalam sikap

kerjasama dan dialog konstruktif dengan para kader, simpatisan dan juga partai politik dan ormas-ormas lain, selama hal tersebut tidak keluar dari *khittah* yang telah ditentukan oleh partai. Dalam masa kampanye pun PK-Sejahtera lebih tampil dengan wajah Islam yang humanis dan substantive sehingga kesan partai Islam yang keras hilang dari citra PK-Sejahtera.

E. Kesimpulan

Pengaruh-pengaruh Ikhwanul dalam PK-Sejahtera dapat dilihat dalam beberapa hal.

Pertama, model *tarbiyah*, bagi PK-Sejahtera tarbiyah ini secara umum tidak jauh berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin sebagai induk dari gerakan ini. *Tarbiyah* memiliki dua bentuk internal dan eksternal. Internal adalah *tarbiyah* yang dikhususkan untuk para kader tingkat lanjutan yang telah menerima, memahami dan komitmen terhadap ideologi gerakan dengan materi yang diarahkan kepada pembentukan kader yang loyal. Eksernal dan diperuntukan bagi masyarakat awam, sebatas pengenalan nilai-nilai Islam secara universal. Selain itu PK-Sejahtera menjadikan *tarbiyah* sebagai sarana untuk menjalankan fungsi partai.

Kedua, Konsep Negara yang difahami oleh PK-Sejahtera bersifat gradual yang mencakup empat tahap, individu Islami keluarga Islami, masyarakat Islami dan negara Islami. bahwa proses yang gradual sebagai langkah yang tepat untuk kondisi Indonesia seperti apa yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. PK-Sejahtera meyakini bahwa keluarga merupakan unit terkecil namun penting bagi perubahan. Ideologi ini berkembang lebih terbuka. Jika seseorang mampu memperbaiki keluarga secara Islami, maka ia akan memperbaiki lingkungan dekatnya secara Islami. Jika ia mampu memperbaiki lingkungan dekatnya secara Islami maka akan mampu memperbaiki masyarakat secara Islami demikian seterusnya hingga ia mampu memperbaiki negaranya dan membangun peradaban dunia dengan nilai-nilai yang universal.

Ketiga, kaderisasi merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam jatidiri PK-Sejahtera, sistem kaderisasi yang metodik dan sistemik membuat PK-Sejahtera berbeda dengan partai-partai yang ada di Indonesia, kaderisasi yang dibina melalui metode *tarbiyah* ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual dan ruhani guna mengembangkan dan menumbuhkan syi'ar dakwah dan politik.

Keempat, Pencitraan, pemahaman akan universalitas Islam diterjemahkan oleh PK-Sejahtera untuk peduli terhadap situasi yang

terjadi dalam masyarakat, karena bagi PK-Sejahtera hal tersebut merupakan salah satu inti dari ajaran Islam dan merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Makna dan nilai Ikhwanul Muslimin diimplementasikan dalam perilaku politik PK-Sejahtera, hal ini berdampak positif bagi kehidupan berperilaku politik PK-Sejahtera di Indonesia. PK-Sejahtera berupaya mengintegrasikan nilai keislaman dan keduniawian. Kekuasaan sekedar instrumen dakwah.

Daftar Pustaka

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.

DPP PK-Sejahtera. 2001 *Profil PK-Sejahtera.* Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.

_____, 2007. *Sikap Kami, Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS periode 1998-2005*. Bandung : Harakatuna.

_____, 2004. *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung : Syamil Cipta Media.

_____, 2002. *Sejarah dan jati diri PKS*. Jakarta : Pustaka Tarbiatuna

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. 2007. *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung : Mizan.

Furqon, Aay Muhammad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Bandung : PT.Teraju.

Hunter, T Shireen. 2001. *Politik Kebangkitan Islam Keberagaman dan Kesatuan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Huntington, P. Samuel. 2005. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogjakarta: PT Qalam.

Isma'il, Nurmahmudi. 1998. "*Jati diri Partai Keadilan*". dalam Sahar L, Sahan Dkk.
Memilih Partai Islam Visi, Misi dan Perseps, (eds).Jakarta : Gema Insani Press.

Mahmud, Ali Abdul Hamid. 1997. *Ikhwanul Muslimin, Konsep Gerakan Terpadu*. Jakarta : Gema Insani Press.

_____, 1999. *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*. Solo : Era Intermedia

Mahmudi, Yon. 2006. *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Politik Islam Indonesia*. Bandung : Harakatuna

Matta, Anis. 2006. *Dari Gerakan Ke Negara.* Jakarta : Fitrah Rabbani,

Noor, Firman. 2007. *Memahami Pemikiran dan Aksi Politik Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta : Puslit Politik LIPI.

Prayitno, Irwan. 2003. *Da'i di Tengah Kegalauan Politik, tentang Politik, Sosial dan Islam.* Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.

Pribadi, Airlangga. 2005. "*Kebangkitan Politik Identitas Islam Di Timur Tengah*", dalam Sarjadi & Surdi Rinakit (ed), *Membaca Indonesia,* Jakarta : PT Meta Adi Citra Kreasi,),

Rais, Amien. 1982. *Cakrawala Islam, antara cita dan fakta.* Bandung : PT. Mizan.

Romli, Lili. 2007. *Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Kasus Partai Keadilan Sejahtera*". dalam Sri Nuryati, Edison Muklish dkk (eds). "*Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca–Orde Baru*". Jakarta : Lipi Press.

Ropi, Ismatu. 2007. "*Membangun "Masyarakat Islami" dan Ideologisasi Gerakan Tarbiyah di Indonesia*". dalam Rizal Sukma & Clara Juwono (ed), *Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontempore*r. Jakarta : CSIS.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada.

TANTANGAN G-20 DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Yusran[1]

Abstract

The aim of this research is to explain about G-20's challanges as the new economic forum for handle global economic's problems. The qualitative method used to analys this research. This research has discovered that G-20's existention to pass well between dilemmas and techniq and procedural problems to make global economic balancing. G-20 must be can to manag and create balance conditions of global economy in the middle of crisis and radical global economic's unbalancing. G-20 to continue in the middle global trust crisis to multilateral institutions likes International Monetary Found, World Trade Organization, and World Bank including negative implications and their's failed. But in fact, G-20's communique revert to give recommendation to IMF as arranger global monetary flow. But actually the case is IMF yet success to solve moneter's problems, instead to speak ill of dependence conditions especially for developing and under developing countries. That is way, leader of G-20's coutries must be punctilious and wise when making regulation to manag and rise global ecomomic balancing so that useless. Global economic's regulation must be fair for all countries in the world.

Key words: G-20, economic globalization, and multilateralism.

Latar Belakang

Terciptanya sebuah bentuk kesimbangan perekonomian global, adalah kehendak bersama setiap negara di dunia. Dengan adanya keseimbangan perekonomian dunia, jurang pemisah antara negara industri maju dan negara berkembang serta terkebelakang tidak terlalu lebar. Standar hidup di antara negara-negara itu pun tidak terpaut terlalu tinggi. Dengan begini, setiap negara di dunia akan merasakan keadilan sistem global yang mau atau tidak, dan suka atau tidak, telah mereka hadapi. Oleh karenanya, membuat formulasi tepat adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh negara-negara di dunia agar keseimbangan perekonomian dunia dapat terwujud.

Bukanlah hal yang mudah untuk menciptakan keseimbangan perekonomian global di tengah kompleksnya persoalan

[1] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

internasional dewasa ini. Perbedaan tingkat pendapatan serta tingkat kesejahteraan negara-negara di dunia merupakan kendala yang sulit untuk dipecahkan. Tingkat pendidikan dan pembangunan yang kontras antara negara maju dan berkembang turut memperlambat usaha ini, karena merupakan masalah yang krusial. Demikian juga dengan realita eksplisitnya perbedaan di bidang inovasi dan teknologi yang semakin memposisikan negara maju sebagai *leader* dunia. Selain itu perbedaan kepemilikan sumber daya alam juga memberikan kontribusi terhadap sulitnya menata dan menyeimbangakan perekonomian dunia.

Kenyataan inilah yang membuat usaha menyeimbangkan perekonomian dunia berjalan di antara harapan dan keinginan. Entah kapan akan mencapai tujuan. Namun, usaha-usaha yang digagas oleh pemimpin-pemimpin negara dunia yang berkeinginan untuk mencapai tujuan ini, setidaknya memberikan secercah harapan. Menciptakan ekonomi dunia yang seimbang dalam waktu cepat dapat dikatakan sebagai keinginan yang penuh keniscayaan.

Adalah G-20 yang beritikad baik untuk mewujudkan hal ini. G-20 memberikan harapan mewujukan sebuah bentuk ekonomi global. G-20 memposisikan diri sebagai forum ekonomi dunia yang akan menciptakan kesesuaian ekonomi global. Forum ini akan membawa dunia untuk mengakhiri krisis dan mengatasi kemungkinan krisis datang lagi.[2]

Untuk mencapai tujuannya, G-20 merumuskan berbagai langkah dan kerangka kerja. Diantara kerangka kerja yang dimaksud adalah penguatan kembali eksistensi lembaga-lembaga multilateral seperti *International Monetary Found* (IMF), Bank Dunia dan *World Trade Organization* (WTO). Hal inilah yang melahirkan wacana bahwa "G-20 adalah forum baru dengan sifat lama".[3]

Pada poin ke-tiga komunike G-20 yang diumumkan pada 7 November 2009, menyebutkan, "…*We will be assisted in our assessment by IMF and World Bank analyses and the input of other international organisations as appropriate, including the FSB, OECD, MDBs, ILO, WTO and UNCTAD*…".[4]

Jika dianalisa lebih lanjut, fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi G-20 dalam mengusahakan terciptanya keseimbangan ekonomi global tidak bekerja secara sendiri. G-20 masih dipengaruhi

---

[2] Ashraf Swelam, "The G-20: Exceeding Expectations, Yet Falling Short", dalam Jurnal *Egypt's International Economic Forum*, Edisi April, 2009, hal. 1.
[3] Laura Tadesco dan Richard Youngs, Jurnal *FRIDE*, No. 18, Edisi September 2009, hal. 3.
[4] Poin ke-3 dalam Komunike G-20.

oleh lembaga-lembaga internasional lain yang membawa mandatnya masing-masing dalam mengatur arus globalisasi dunia. Lebih jauh lagi, G-20 akan memperkuat kerjasamanya dengan lembaga-lembaga itu. Dengan begini secara otomatis lembaga-lembaga ini kian memiliki pengaruh dan arti penting dalam sistem perekonomian global. Disinilah letak persoalannya. Keadaan inilah yang menuai pro dan kontra dari keberadaan G-20. Oleh karenanya, G-20 harus berusaha mewujudkan tujuannya di tengah kekecewaan sebagian besar negara berkembang atas kinerja, kegagalan, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga multilateral yang dimaksud dalam komunike G-20 ini terutama IMF, Bank Dunia dan WTO.

Tulisan ini difokuskan untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh G-20 dalam usahanya menciptakan keseimbangan perekonomian global. Hasil kesepakatan G-20 yang dapat diindikasikan memperkuat kembali peranan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia dan WTO merupakan awal mula tantangan itu.

Globalisasi Ekonomi sebagai *Framework* G-20

Kerangka kerja G-20 dalam usahanya untuk membawa dunia keluar dari krisis global adalah melalui integrasi ekonomi global. Fakta ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang dikenal dunia sebagai globalisasi. Selain itu, dalam hubungan ekonomi politik internasional secara sistemik saat ini, tidak dapat dilepaskan dari terminologi globalisasi. Era globalisasi di berbagai bidang yang tengah bergulir dan menjadi isu utama dalam hubungan antar negara dewasa ini, menjadi faktor penting munculnya keinginan untuk menyatukan ekonomi global.

Globalisasi ekonomi dapat mengintegrasikan ekonomi negara-negara di dunia dengan lancarnya aliran barang dan jasa, modal dan tenaga kerja. Dengan begitu diharapkan terciptanya keseimbangan standar kehidupan di dunia, karena dengan globalisasi negara miskin memiliki akses untuk mengembangkan pasar mereka. Selain itu investasi dapat membuat biaya produksi barang menjadi lebih murah, sehingga dapat dibeli dengan harga yang murah pula. Dengan globalisasi batasan-batasan negara tidak lagi menjadi kendala, dan setiap orang dapat menemukan usaha baru.[5]

---

[5] Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, (London, Penguin Books, 2006), hal.4.

Globalisasi merupakan proses menjadikan dunia sebagai suatu bentuk yang universal dan tanpa batas melalui teknologi global. Batasan wilayah teritorial tidak lagi menjadi kendala, serta adanya intergrasi modal dan orang dalam jaringan global yang dinamis.[6] Globalisasi menjadi pemikiran yang penting semenjak berakhirnya Perang Dingin. Pembicaraan mengenai globalisasi tidak terlepas dari istilah liberalisasi dan kapitalisme.[7] Globalisasi membuka peluang bagi terciptanya suatu bentuk interdependensi global yang memungkinkan terjadinya integrasi ekonomi global.[8]

Globalisasi adalah fenomena yang dalam perjalanannya pada saat bersamaan mendapat pujian dan cercaan. Secara mendasar globalisasi adalah penyatuan yang semakin dekat antara negara-negara dan masyarakat-masyarakat di dunia yang disebabkan oleh pengurangan biaya transportasi dan komunikasi yang begitu besar, dan meruntuhkan berbagai penghalang artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan, dan perbatasan. Globalisasi diikuti oleh penciptaan berbagai lembaga baru yang telah tergabung dengan lembaga yang sudah ada untuk bekerja malampaui batas-batas wilayah. Globalisasi didorong penuh oleh perusahaan-perusahaan internasional, yang tidak hanya menggerakkan modal dan barang melewati batas-batas wilayah, tetapi juga teknologi. Globalisasi diatur oleh tiga lembaga utama yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO, serta sejumlah organisasi-organisasi PBB.[9] Dari penjelasan-penjelasan yang bersifat konseptual ini, dapat dicermati bahwasanya G-20 kerangka kerja G-20 tidak dapat dipisahkan dari globalisasi ekonomi yang menjadi kecenderungan mutakhir dunia dewasa ini.

Terbentuknya G-20

G-20 adalah forum ekonomi dunia terbaru menggantikan G-8. Sebelum menjadi G-8, awal mulanya adalah G-6 yang dibentuk pada tahun 1970 sebagi respon negara ekonomi besar Barat untuk menghadapi krisis finansial kala itu. Selanjutnya G-6 berkembang menjadi G-7 dengan masuknya Jepang. Setelah runtuhnya Uni Soviet, formulasinya berkembang menjadi G-8 dengan

---

[6] Philip Mc.Michael, *Globalization, Trend or Project*, dalam *Global Political Economy Contemporary Theories, edited by Ronen Palan*, (London: Routledge, 2000), hal. 100.

[7] J.E. Spence, *Dictionary of International Relations*, (England: Penguin Books, 1998), hal.202.

[8] Martin Griffiths dan Terry O' Callaghan, *International Relations: The Key Concept*, (New York: Routledge, 2002), hal.127.

[9] Joseph Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*¸ (Jakarta: P.T. Ina Publikatama, 2003), hal. 12-13.

bergabungnya Rusia. Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia. Disinilah wacana membentuk G-20 mulai digulirkan oleh negara maju anggota G-8. Kondisi itu terus menerus berlanjutnya hingga akhirnya dunia mengalami krisis finansial global di awal tahun 2008. Barulah pada November 2008 Presiden Amerika George Wolker Bush mengundang 20 kepala negara yang nantinya akan menjadi anggota G-20. Pertemuan puncak G-20 yang pertama itu diberi nama "*The Summit on Financial Markets and the World Economy*" dan bertempat di Washington. Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada 2 April 2009 yang bertempat di London, dan diberi nama "*The London Summit 2009*". Barulah pada akhirnya di pertemuan ke-tiga yang diselenggarakan pada 24-25 September 2009, forum G-20 diumumkan secara resmi sebagai forum ekonomi dunia terbaru menggantikan G-8 dalam pertemuan yang bernama "*The Pittsburg Summit*". Pertemuan ke-tiga G-20 diusulkan ketika terjadinya pertemuan G-8 pada Juli 2009 di Itali.[10]

Secara khusus, terbentuknya G-20 adalah pada 15 Desember 1999 di Berlin, Jerman. G-20 memiliki mandat sebagai sebuah forum informal yang mempromosikan keterbukaan dan pembangunan antara industri dan pasar-pasar sebagai isu utama untuk mencapai stabilitas ekonomi global. Dengan kontribusi dan aturan arsitektur finansial internasional diharapkan dapat membuka dialog dan kerjasama internasional, dan institusi finansial internasional, G-20 mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara-negara di dunia.[11]

Negara-negara anggota G-20 terdiri dari: Argentina; Australia; Brazil; Kanada; China; Prancis; Jerman; India; Indonesia; Italia; Jepang; Meksiko; Rusia; Saudi Arabia; Afrika Selatan; Korea Selatan; Turki; Inggris; Amerika Serikat; dan Uni Eropa. G-20 mewakili 85 persen *Gross Domestic Product* dalam perekonomian dunia. G-20 dirancang khusus sebagai langkah awal untuk keluar dari krisis finansial global yang dihadapi dunia saat ini. Krisis finansial global saat ini diindikasikan terjadi akibat ketidakseimbangan makroekonomi secara global yang dipicu oleh menurunnya suku bunga dan kelebihan konsumsi dan kredit macet perumahan di Amerika Serikat, semakin meningkatnya tabungan di

---

[10] Colin Bradford, "Mobilize the G-20 to Respond to the Global Economic Crisis, Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, hal. 14-15. diperoleh dari http://www.brookings.edu/global , diakses 18 November 2009.

[11] Ashraf Swelam, "The G-20: Exceeding Expectations, Yet Falling Short", dalam Jurnal *Egypt's International Economic Forum*, Edisi April, 2009, hal. 2.

China, dan munculnya pasar di negara-negara lain yang semakin memperkuat ketidakseimbangan makroekonomi global.[12]

Ini adalah tantangan utama G-20. Untuk mencoba keluar dari krisis ini, dan sebagai langkah untuk mengantisipasi krisis finansial global di masa mendatang, G-20 mencoba untuk membangun berbagai kerangka kerja. Sekalipun tidak bersifat mengikat, organisasi ini diharapkan akan sangat berpengaruh mendorong peluncuran kebijakan multilateral dalam meloloskan agenda pemulihan perekonomian global. G-20 mengubah kelompok elite dunia dari dominasi negara-negara kaya menjadi kelompok elite hasil gabungan negara kaya dan berkembang.

Tantangan-Tantangan yang Dihadapi G-20 dalam Menciptakan Keseimbangan Perekonomian Global

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kerangka kerja G-20 dalam usahanya menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi global, dilakukan dengan membangun sinerji yang kuat bersama tiga lembaga multilateral agen globalisasi (IMF, WTO dan Bank Dunia). Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan. G-20 mencoba untuk membuat lembaga-lembaga ini begitu penting dalam mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi global.

Kondisi semacam ini merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi G-20 dalam meneruskan keberlangsungan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. G-20 memiliki tantangan berat dimana harus berjalan dalam kondisi krisis kepercayaan sebagaian besar masyarakat dunia atas kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam mengatur sistem perkonomian global. Belum lagi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga itu dalam operasinya, semakin menambah berat tantangan G-20 dalam mencapai tujuannya. Selain itu kekhawatiran negara-negara berkembang akan dominasi negara-negara maju juga merupakan tantangan kerja G-20 ke depan.

IMF, Bank Dunia dan WTO merupakan para pemain utama dalam pentas ekonomi global. Mereka dikatakan sebagai "rejim internasional" yang berfungsi sebagai *surveillance system* dalam bentuk multilateralisme. Eksistensi dari rezim internasional itu bertujuan untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas

---

[12] Eswar Prasad, "Stimulate, Reform, Coordinate: A Macroeconomic Agenda for the G-20", Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, hal. 5, diperoleh dari http://www.brookings.edu/global , diakses 18 November 2009.

secara global. Institusi-institusi internasional ini akan terus-menerus memantau negara-negara di seluruh dunia.[13] Mereka bekerja dalam suatu sistem yang sama untuk dan melaksanakan agenda yang sama pula, yakni meliberalisasikan segala sektor yang memiliki nilai-nilai ekonomis di dunia.[14]

Sebenarnya dalam G-20 terdapat sebuah hasil kesepakatan yang setidaknya memberikan penghargaan kepada negara berkembang sebagai bagian dari ekonomi global. Dalam butir kesepakatan mengatakan bahwa "Negara-negara berkembang akan menerima atau menanggung sedikitnya lima persen dari hak suara pada Dana Moneter Internasional (IMF)".[15] Kesepakatan ini merupakan suatu langkah maju dan strategi G-20 untuk mengembalikan kepercaan negara-negara berkembang yang notabene berjumlah mayoritas dalam perekonomian global.

Kendati demikian, rapor merah kinerja IMF selama ini masih menjadi ganjaran utama untuk mengembalikan kepercayaan sebagian besar negara berkembang. "Resep-resep" pemulihan dan penyehatan ekonomi yang digagas dan digulirkan IMF selama ini belum mampu untuk mengangkat keterpurukan ekonomi negara-negara berkembang. Malah, kondisi negara berkembang semakin parah dengan meningkatnya ketergantungan dan beban utang mereka kepada IMF.

Banyak kinerja IMF yang berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Selama ini IMF adalah salah satu aktor paling berpengaruh dalam ekonomi global. Sebagai lembaga multilateral IMF meminjamkan miliaran dolar ke negara-negara yang dilanda ketidaseimbangan ekonomi yang parah dan pada saat yang bersamaan IMF memobilisir miliaran dolar kepada negara kreditor dari bunga pinjaman yang digulirkan. Bila negara-negara debitor menginginkan keringanan pembayaran, maka negara tersebut harus bersedia menerima campur tangan IMF dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan domestiknya yang mempengaruhi penananam modal maupun utang. Dengan demikian, IMF menjadi semakin leluasa.

---

[13] Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 216-219.

[14] Kavaljit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan*, (Jakarta: Yakoma PGI, 1998) hal. 27.

[15] Redaksi, "G-20 Jadikan RI Lebih Strategis", diperoleh dari http://antaranews.com/berita/1253936980/perjanjian-utama-ktt-g20 , diakses 18 November 2009.

Kekuasaan IMF sangat terasa di negara-negara miskin dan berkembang yang masuk dalam kategori *emerging market*. Perencanaan kebijakan maupun pengambilan keputusan IMF dikuasai oleh negara-negara kaya yang mengendepankan kepentingan dan agenda pasar dan industri mereka. Dengan andil suara yang dominan, negara-negara kreditor kaya dapat memaksakan kepentingan ekonomi globalnya terhadap negara-negara debitor. Kekuasaan IMF semakin besar dengan jangkauan yang makin luas ketika lembaga tersebut mulai menjamah sistem keuangan dan perbankan, *good governance*, termasuk masalah reformasi hukum dan pembelanjaan sosial. Hal itu dilakukan dengan dalih untuk mempermudah dan membuka lebar peluang investasi, karena dengan semakin tingginya investasi, maka negara peminjam akan semakin cepat dapat melunasi pinjaman mereka.[16]

Setelah campur tangan IMF semakin sistematis di negara peminjam, pinjaman mereka tidak kunjung bisa dilunasi karena kalkulasi bunganya yang sedemikian besar. Yang terjadi adalah negara debitor semakin bergantung pada pinjaman-pinjaman itu. Sebagai konsekuensinya adalah petambahan utang yang semakin signifikan. Kesulitan pembayaran yang dialami negara debitor menjadi peluang besar bagi IMF untuk semakin memperkuat posisinya terhadap negara yang bersangkutan.

Program penyesuain struktural merupakan paket kebijakan utama yang dirancang IMF dan Bank Dunia untuk membantu pembangunan di negara-negara miskin dan berkembang. Namun pada kenyataannya formulasi kebijakan ini semakin memperparah kondisi mereka. Dasar IMF dalam menyusun program penyesuaian struktural meliputi beberapa hal: Pelaksanaan kebijakan anggaran yang ketat termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya; Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan; Pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan; dan Pelaksanaan privatisasi BUMN. Program penyesuain struktural dilaksanakan melalui beberapa langkah yang terdiri dari: Pembukaan keran impor sebebas-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas; Devaluasi mata uang; dan Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, dan peningkatan pajak.[17]

Dengan semakin parahnya kondisi akibat capur tangan IMF ini, banyak negara-negara berkembang yang memutuskan untuk

---

[16] Carol Welch, *Panduan Mengenai IMF*, (Jakarta: Infid, 2000), hal. 1-2.

[17] Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 112.

mengakhiri hubungannya dengan IMF. Namun di tengah kehilangan kepercayaan sebagian besar masyarakat dunia ini, G-20 malah melakukan gebrakan-gebrakan untuk mereposisi kembali IMF sebagai pemain kunci dalam perekonomian global.

Seperti beberapa kesepakatan G-20 yang menyatakan bahwa, G-20 Sepakat menambah dana cadangan IMF sebesar 500 miliar dolar AS, dari 250 miliar dolar AS yang telah dialokasikan sebelumnya. Tambahan dana itu untuk membantu negara-negara terparah akibat krisis. G-20 berkomitmen memperkuat lembaga multilateral dengan menambah dana cadangan IMF dan Bank Dunia sebesar satu triliun dolar AS. IMF bakal mendapat suntikan dana tambahan 500 miliar dolar AS, dari alokasi awal 250 miliar dolar AS, sehingga menjadi 750 miliar dolar AS. Tambahan dana itu untuk membantu negara-negara yang terdampak parah akibat krisis. IMF juga mendapat tambahan dana dalam bentuk *Special Drawing Rights* (mata uang IMF) sebesar 250 miliar dolar AS.[18]

Keputusan ini berarti memperjelas kerangka kerja G-20 yang semakin memperkuat kinerja IMF dalam mengatur perekonomian global. Ini merupakan tantangan berat karena G-20 harus mampu untuk mengembalikan kepercayaan sebagian besar masyarakat dunia akibat rapor merah IMF.

Sungguhpun begitu, langkah yang ditempuh G-20 ini tentunya berdasarkan perimbangan-pertimbangan mendasar. G-20 menganggap IMF adalah lembaga dunia yang kredibel untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan nerca pembayaran – penyebab krisis – internasional. Jika dilakukan reformasi, G-20 menganggap IMF mampu untuk menciptakan stabilitas makroekonomi global. G-20 juga meyakini bahwa aturan-aturan yang dirumuskan IMF akan membantu perkembangan *emerging market.* [19]

Demikian juga halnya dengan World Bank yang merupakan "saudara kembar" IMF dalam melaksanakan program penyesuaian struktural. Untuk Bank Dunia terdapat butir kesepakatan yang berbunyi:

> "*…Mobilization of significant additional resources for the World Bank and the regional development banks to provide financing for the poorer developing countries to shield them from dramatic reductions in social and environmental investments; this*

---

[18] Redaksi, "G-20 Perkuat Peran IMF", *Republika*¸ 3 April 2009.

[19] Colin Bradford, "Mobilize the G-20 to Respond to the Global Economic Crisis, Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, hal. 16. diperoleh dari http://www.brookings.edu/global , diakses 18 November 2009.

should be linked to governance reform in the World Bank and other development banks to give a greater role and responsibility to developing countries…[20]

Dengan butir ini, Bank Dunia merupakan perioritas utama dalam usaha pemulihan kondisi ekonomi dunia bersama IMF. Bukan hanya IMF dan Bank Dunia, lembaga internasional lainnya seperti WTO juga merupakan bagian penting dari langkah dan tidakan yang akan ditempuh G-20 dalam menciptakan keseimbangan perekonomian global. Padahal saat ini WTO masih menemui kegagalan dalam menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam Putaran Doha.

Terdapat beebrapa indikasi penyebab kegagalan Putaran Doha. Pertama, putaran Doha mengalami kegagalan akibat ketidaksetaraan posisi atau perbedaan '*level of playing field*' negosiasi antara negara maju dan berkembang.[21] Ketidaksetaraan posisi ini menjadi penyebab terjadinya praktek diskriminasi antara negara-negara anggota yang diukur dari tingkat ekonomi. Diskriminasi dilakukan oleh negara maju yang merupakan *small group* di WTO, namum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi untuk menguasai negara-negara miskin dan berkembang lainnya. Diskriminasi itu menyebabkan terjadinya ketimpangan negosiasi di antara mereka. Inilah yang akhirnya berujung pada kekecewaan dan memunculkan resistensi dari negara berkembang untuk tidak lagi secara serta merta mau mengikuti berbagai keinginan negara maju untuk menguasai perekonomian dunia sekehendak hatinya.

Di WTO, pengendali kuasa seolah terletak di tangan negara maju. Negara-negara maju selalu berusaha memasukkan isu-isu baru ke WTO karena pertumbuhan industri dan ekonomi mereka yang tinggi, di mana sektor-sektor ekonomi baru bertambah banyak, ekspansif dan perlu mencari pasar-pasar baru. [22] Dalam kenyatannya, WTO dan berbagai perjanjiannya tidak melayani kepentingan negara berkembang, tetapi kepentingan negara industri maju, khususnya Amerika Serikat beserta sekutunya.[23] Oleh karena itu dalam setiap perundingan yang dilaksanakan, egosentris dari

---

[20] *Ibid.*.

[21] Joseph Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Jakarta: Ina Publikatama, 2003), hal. 20.

[22] Bonnie Setiawan, *Antara Doha dan Cancun: Cengkraman Neoliberal pada tubuh WTO*, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 87.

[23] Walden Bello, "WTO, Menghamba Pada Negara Kaya", dalam *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 95.

Amerika Serikat selalu berperan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.

Permasalahan kedua yang menjadi indikasi penyebab kegagalan Putaran Doha dalam mendapatkan ratifikasi dari negara anggota adalah praktek diskriminasi dan distorsi perdagangan yang dilakukan oleh negara maju. Secara teoritis, setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum WTO bersifal *legal binding* atau mengikat secara hukum. Namun sayangnya ternyata *legal binding* WTO belum mampu untuk mengikat dan memberikan sanksi kepada negara maju yang semakin protektif dan masif dalam melakukan distorsi perdagangan serta menjalankan standar ganda dalam melakukan aktifitas perdaganangannya.[24]

Ketiga, kegagalan Putaran Doha disebabkan kebuntuan perundingan ketika membahas isu menganai pertanian. Pertanian merupakan komoditas vital dalam perekonomian negara berkembang. Selain itu, pertanian juga merupakan keuntungan komparatif yang dimiliki negara berkembang ketika berhubungan dagang dengan negara maju. Jika diliberalisasi, negara berkembang tidak lagi memiliki komoditas yang dapat dinegosiasikan.[25] Inilah yang membuat negara berkembang menolak untuk meratifikasi kesepakatan WTO.

Akan tetapi di tengah peliknya permasalahan yang melingkupi WTO, G-20 malah memperkuat kesepakatan WTO dalam mengatur perdagangan global. Butir kesepakatan G-20 yang memperkuat keberadaan WTO adalah sebagai berikut:

> *We remain committed to further trade liberalization. We are determined to seek an ambitious and balanced conclusion to the Doha Development Round in 2010, consistent with its mandate, based on the progress already made, including with regard to modalities. We understand the need for countries to directly engage with each other, within the WTO bearing in mind the centrality of the multilateral process, in order to evaluate and close the remaining gaps. We note that in order to conclude the negotiations in 2010, closing those gaps should proceed as quickly as possible. We ask our ministers to take stock of the situation no later than early 2010, taking into account the results of the work program agreed to in Geneva following the Delhi Ministerial, and seek*

---

[24] Bonnie Setiawan, *Antara Doha dan Cancun: Cengkraman Neoliberal pada tubuh WTO*, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 94.

[25] Bonnie Setiawan, "Krisis Putaran Doha WTO dan Krisis Global", dalam Jurnal *Global Justice Update*, Tahun ke-6, Edisi Khusus, November 2008, hal. 1.

progress on Agriculture, Non-Agricultural Market Access, as well as Services, Rules, Trade Facilitation and all other remaining issues. We will remain engaged and review the progress of the negotiations at our next meeting. [26]

Keputusan itu muncul dari pertimbangan G-20 yang menurutnya WTO adalah aktor penting dan terbaik untuk mengatasi masalah-masalah perdagangan. WTO dapat menjalankan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dengan tujuan akhir untuk menciptakan integrasi ekonomi global kedepan. Dengan integrasi ekonomi global, maka keseimbangan pertumbuhan global dapat pula dicapai.[27]

Dari butir kesepakatan dan pertimbangan G-20 ini, dapat dilihat dengan jelas niat baik G-20 terhadap WTO dalam rangka menyukseskan kegagalan perundingan Putaran Doha. Walau bagaimanapun jika Putaran Doha tetap mengalami kegagalan, maka eksistensi WTO akan semakin terancam. Dengan begini dapat dinilai bahwa eksistensi G-20 sarat akan tujuan untuk menegosiasikan dan meloloskan Putaran Doha agar mencapai kesepakatan.

Analisa ini seperti diungkapkan salah sorang pengamat yang mengatakan bahwa, "Mengamankan G-20 berarti dapat mengamankan Putaran Doha".[28] Dari kondisi ini dapat dilihat betapa kuatnya sinergi antara G-20 dan WTO. G-20 seolah mencoba untuk menguatkan kembali fungsi dan peranan WTO dalam mengatur perdagangan global. Padahal, WTO hingga saat ini masih gagal menemukan kesepakatan perundingan akibat berbagai permasalahan diskriminasi perundingan dan distorsi perdagangan negara maju yang seolah tidak dipermasalahkan oleh WTO.

Kenyataan ini semakin memperberat tantangan G-20 dalam usahanya menciptakan keseimbangan perekonomian global. Alasannya adalah karena G-20 mengakomodir dan mengutamakan dengan jelas, lembaga WTO ini yang terang telah dapat dikatakan belum dapat menciptakan keadilan perdagangan bagi negara miskin dan berkembang.

---

[26] Statement London Summit 2009, diperoleh dari http://www.global-unions.org , diakses 18 November 2009.

[27] Paul Blustein, "Tame Protectionism and Revitalize Trade" Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, hal. 9. diperoleh dari http://www.brookings.edu/global , diakses 18 November 2009.

[28] Ernesto Zedilo, "Save Doha to Save to Save G-20 Summit", Jurnal *Centre for Economic Research (CEPR)*, (London: A Vox EU.org Publication, 2008), hal. 76.

Singkatnya adalah, bagaimana G-20 dapat mengoptimalkan usahanya menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian global, dengan menggandeng mitra-mitra utama lembaga-lembaga yang kehadirannya tidak begitu diharapkan oleh negara miskin dan berkembang. Rasanya tantangan ini cukup beralasan, karena negara miskin dan berkembang hingga saat ini masih merasakan 'trauma' atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas lembaga-lembaga ini. Walaupun pada kenyataannya banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh WTO dalam mengatur arus perdagangan dunia, namun belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya bagi negara berkembang.

Dengan petimbangan-pertimbangan bahwa ketiga lembaga internasional ini memiliki prestasi yang bagus dalam mengatur perekonomian global dengan segenap aturan terstruktur yang dimilikinya, G-20 menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai mitra terpenting dalam eksistensinya. G-20 mencoba untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi global meskipun sepenuhnya menyadari tantangan-tangan berat yang akan dihadapinya seputar masalah multilateralisme ini.

Tantangan selanjutnya adalah benturan kepentingan dan persaingan antara negara-negara anggota. Sebelumnya, peserta G-20 berbeda persepsi soal cara mengakhiri krisis. Terdapat dua kubu yang berbeda pendapat. Kubu AS, Jepang, dan Inggris yang lebih setuju menambah anggaran pemerintah melalui stimulus fiskal. Sedangkan kubu Prancis, Jerman, dan Italia lebih suka mendorong pengetatan sistem keuangan dunia. Selain itu, keengganan Jepang untuk menerima China bergabung sebagai anggota merupakan persoalan penting dalam perjalanan G-20.[29]

Meskipun akhirnya perselisihan antara kedua kubu dapat diakomodir, namun dengan mencermati fenomena ini, penulis melihat bahwasanya persoalan-persoalan seperti ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perjalanan G-20 ke depan. Belum lama mereka bergabung, namun benturan-benturan kepentingan sudah mulai mewarnai kebersamaan mereka.

Kesimpulan

Secara prosedural tujuan utama G-20 untuk memulihkan dan mengantisipasi krisis perlu diapresiasi secara penuh. Tapi, secara teknis berbagai langkah dan upaya yang ditempuh G-20 untuk mencapai hal itu menimbulkan berbagai ambiguitas dalam tatanan

[29] Redaksi, "G-20 Perkuat Peran IMF", *Republika*, 3 April 2009.

internasional. Penyebabnya adalah kesepakatan-kesepakatan G-20 yang secara jelas mengutamakan fungsi dan peranan IMF, Bank Dunia dan WTO sebagai mitra dan bahan pertimbangan utama bagi G-20. Padahal, sebagian besar negara miskin dan berkembang di dunia masih 'trauma' akibat kinerja lembaga-lembaga ini. G-20 membuat IMF dan Bank Dunia memiliki arti strategis dalam upaya mencapai keseimbagan ekonomi global di tengah maraknya pemutusan hubungan dengan lembaga ini yang dilakukan oleh negara miskin dan berkembang. Selain itu, IMF menjadikan WTO sebagai lembaga utama dalam mengatur perdagangan dunia di tengah kegagalan lembaga ini mencapai kesepakatan dalam Putaran Doha – akibat berbagai masalah yang mengitarinya.

Di satu sisi G-20 memiliki pertimbangan-pertimbangan penting dan efektif mengingat otoritas dan pengalaman lembaga-lembaga ini dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian global. Namun di lain sisi, keputusan G-20 mengakomodir lembaga-lembaga ini akan menjadi tantangan berat bagi eksistensi G-20. Betapa tidak, karena G-20 harus berusaha meyakinkan kembali negara-negara miskin dan berkembang yang notabene berjumlah mayoritas dalam panggung ekonomi global. Belum lagi pandangan-pandangan miring sebagian msyarakat internasional atas kinerja lembaga-lembaga ini. Tantangan inilah yang membuat eksistensi G-20 berjalan seolah dalam sebuah dilema. Disamping itu masih ada tantangan lain. Meskipun dapat teratasi, namun persoalan-persoalan seputar kepentingan antara negara anggota turut menambah tantangan eksistensi G-20 ke depan.

Terciptanya keseimbangan pertembuhan perekonomian global ditengah berbagai permasalahan internasional dan tajamnya berbagai tingkat perbedaan negara-negara di dunia adalah sebuah keniscayaan yang entah kapan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, G-20 memerlukan berbagai bentuk formulasi kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif agar tujuannya untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan perekonomian global dapat diwujudkan. Selain itu, kecermatan dan kearifan dari negara-negara anggota adalah bagian terpenting agar benturan kepentingan tidak selalu mewarnai perjalanan kelompok ini dalam mencapai tujuan.

Jika sinerji dengan lembaga-lembaga multilateral ini menjadi tantangan signifikan bagi keberlangsungan G-20, tidak ada salahnya jika G-20 mereformulasi kembali keputusannya agar lebih independen, dimana secara otomatis meminimalisir tantangan seputar ini. Yang jelas, di 'pundak' G-20 terdapat banyak harapan dari berbagai kelompok negara di dunia agar G-20 berhasil dalam

mencapai tujuannya dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi global. Jadi, G-20 harus memilih langkah dan tidakan yang tepat dan efektif agar dapat segera membawa dunia keluar dari krisis finansial global saat ini, dan agar eksistensi forum ini tidak sia-sia.

Daftar Pustaka

Bello, Walden, "WTO, Menghamba Pada Negara Kaya", Jurnal *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

Blustein, Paul, "Tame Protectionism and Revitalize Trade" Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, hal. 9. diperoleh dari http://www.brookings.edu/global

Bradford, Colin, "Mobilize the G-20 to Respond to the Global Economic Crisis, Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, diperoleh dari http://www.brookings.edu/global.

Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Griffiths, Martinn dan Terry, O' Callaghan, *International Relations: The Key Concept*, New York: Routledge, 2002.

Haynes, Jeff, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000.

http://antaranews.com/berita/1253936980/perjanjian-utama-ktt-g20

http://www.global-unions.org

Michael Philip Mc., Globalization, Trend or Project, dalam Global Political Economy Contemporary Theories, edited by Ronen Palan, London: Routledge, 2000.

Noyer, Christian "The G20 and the Role Of Emerging Markets in the New Financial Architecture", tulisan disampaikan pada Money and banking conference 2009, Central Bank of Argentina, Buenos Aires, 31 August-1 September 2009.

Prasad, Eswar, "Stimulate, Reform, Coordinate: A Macroeconomic Agenda for the G-20", Jurnal *Brookings Global Economy and Development*, Edisi Maret 2009, diperoleh dari http://www.brookings.edu/global

Republika¸ 3 April 2009.

Singh, Kavaljit, *Memahami Globalisasi Keuangan*, Jakarta: Yakoma PGI, 1998.

Swelam, Ashraf, "The G-20: Exceeding Expectations, Yet Falling Short", dalam Jurnal *Egypt's International Economic Forum*, Edisi April, 2009.

Setiawan, Bonnie, *Antara Doha dan Cancun: Cengkraman Neoliberal pada tubuh WTO*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

--------., "Krisis Putaran Doha WTO dan Krisis Global", *Global Justice Update*, Tahun ke-6, Edisi Khusus, November 2008.

Spence, J.,E., *Dictionary of International Relations*, England: Penguin Books, 1998

Stiglitz, Joseph, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Jakarta: Ina Publikatama, 2003.

--------., *Making Globalization Work*, London, Penguin Books, 2006.

Tadesco, Laura, dan Richard, Youngs, Jurnal *FRIDE*, No. 18, Edisi September 2009

Welch, Carol, *Panduan Mengenai IMF*, Jakarta: Infid, 2000.

Zedilo, Ernesto, "Save Doha to Save to Save G-20 Summit", Jurnal *Centre for Economic Research (CEPR)*, London: A Vox EU.org Publication, 2008.

TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA PADA G -20

Reinhard Hutapea[1]

Abstract

G-20 belongs to the group of new states as expantion from G-8. G-8 consists of wealth and powerful states,in G-20 consists of developed states such as Argentina, South Africa, Brazilia and Indonesia itself especially. The prominent figur in the expansion is Barack Obama. The next question is how about Indonesian's position at the gorup? To examine it we use capabilities that is a strengthen. The strengthen is owner on political economic scale which is meant by capability undemocracy political system, unefficiently bureaucracy*, unstable law enforcement, economic in appearance only, etc. when capability stranghten up it will make Indonesian's position exceptionally benefiit in G 20, but it strengten up it will become heavier dependently*

Pendahuluan

G-20 adalah perluasan dari Negara-negara yang tergabung dalam G 8. Kalau G 8 sebelumnya adalah club Negara-negara besar, kaya dan kuat, maka pada G 20 lebih beragam dan diperluas hingga negara-negara yang dikategorikan sedang berkembang (NSB/ Dunia lll), seperti Argentina, Brazil, Rusia, India, China, Afsel, Turki, Meksiko dan atau khususnya Indonesia.

Indonesia bersama dengan negara-negara sedang berkembang lainnya mendapat kehormatan masuk dalam kelompok-kelompok negara elit. Suatu hal yang surprised tentunya. Suatu yang sangat didambakan bagi banyak negara dapat duduk bersama-sama dengan kelompok-kelompok elit negara-negara kaya.

Akan tetapi jika dipikirkan lebih jauh, muncul beberapa pertanyaan yang mengganggu. Pertanyaan ini antara lain adalah apakah dikutsertakannya Indonesia dalam kelompok tersebut, apakah karena negeri ini memang sudah layak atau sejajar dengan kelompok-kelompok negara tersebut, khususnya negara-negara yang kaya, kuat

[1] Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

dan besar itu?. Atau sebaliknya, yakni hanya untuk tetap melestarikan atau memperkuat cengkramannya terhadap Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya? Dan sekian pertanyaan lagi

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengemuka karena pihak yang paling kompeten untuk menjawab itu, yakni Departemen Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia belum memberikan jawaban yang final. Deplu melihat G-20 memang suatu forum ekonomi premiere, namun masih mencari-cari definisi yang cocok dengan perkembangan tersebut. Lebih jelasnya ditulis:

> "Sekarang ini Indonesia sudah ditetapkan menjadi negara anggota G-20, dimana G-20 menjadi premiere forum di bidang ekonomi. Oleh karena itu memang menjadi salah satu tugas kita untuk bagaimana mendefinisikan sosok Indonesia yang ingin kita tampilkan di G -20 ini, sehingga kita bisa memiliki ciri keindonesiaan yang jelas dalam G-20 ini". (Diplomasi, No 25 Tahun ll, 15 Nov-14 Des 2009:6)

Tidak jauh dengan pandangan Deplu, pakar politik luar negeri (Rizal Sukma) yang biasanya memberikan pengertian yang tajam, juga tidak dapat memberikan definisi yang pas. Rizal Sukma hanya mengatakan bahwa ada pergeseran dari yang sebelumnya hanya dikuasai G-8 kini bergeser ke G-20, sedangkan masalah keamanan masih seperti sebelumnya, yakni tetap dikuasai para pemegang veto di PBB. Lebih jelasnya beliau menyatakan:

> Jika dulu semua harus diputuskan oleh G-8 sekarang ada dorongan menuju perluasan pemain global karena berbagai persoalan tidak bisa diselesaikan hanya oleh G-8. saya kira G-20 akan semakin penting. Saya kira pergeseran dari G-8 ke G-20 akan menjadi trend dimasa yang akan datang. Akan tetapi pada saat yang sama struktur keamanan masih P-5, tetap sama saja di Dewan Keamanan PBB (Sukma, R Kompas, 2009,…)

Begitu pula pendapat seorang teknokrat ekonomi, Cyrillus Harinowo. Ia (Cyrillus) berpendapat bahwa dalam G-20 itu Indonesia dapat berperan, sebab ada satu menteri, yakni menteri perdagangan

Mari Elka yang cukup kapabel bermain di pentas tersebut. Akan tetapi Mari Elka harus didampingi suatu tim dan lembaga yang kuat. Tim atau lembaga demikian paling tidak ada di kementerian Perdagangan, dan atau khususnya di Departemen Luar Negeri. (Kompas, 29 sept, 09)

Pertanyaan-pertanyaan demikian paling tidak diutarakan melihat realitas hubungan internasional selama ini. Pada umumnya negara-negara dapat bergabung dalam satu kelompok apabila *kepentingannya* sama/atau mendekati. Atau jika meminjam pendapatnya Bruce Russett adalah adanya *kedekatan atau kemiripan socio-cultural* dalam arti luas. Pendekatan-pendekatan seperti ini dalam ilmu hubungan internasional pada umumnya dikemukakan kaum realis.

Suatu persfektif yang sangat pragmatis, yang melihat kekinian adalah segala-galanya (yang terutama), bukan masa-masa yang akan datang yang penuh dengan janji-janji dan harapan-harapan. Masa yang akan datang itu tidak perlu dipikirkan jauh-jauh. Yang penting bagaimana saat ini, apa yang ada saat ini dan segera diselesaikan pada saat ini juga.

Suatu pandangan yang berkebalikan tentunya dengan mereka yang melihat bahwa masa depan itu itu dapat digapai dengan tidak harus bertindak sekarang, tapi sama-sama mempersiapkan diri ke depan. Persfektif ini dikenal dengan persfektif idealis atau liberal. Kaum idealis pada umumnya selalu berpandangan positif dan menerawang jauh ke depan. Selalu menekankan kerjasama dengan semua kalangan. Dengan perkataan lain pendekatannya tidak unilateral, melainkan multilateral

Bila kalangan atau elit-elit G-20 melihat bahwa dunia ini perlu kerjasama pada semua kalangan atau level, maka pendekatan yang muncul mungkin adalah persfektif idealis/liberal. Masyarakat dunia pada umumnya mengharapkan yang seperti itu, yakni ada upaya kebersamaan untuk sama-sama memikirkan masa depan dunia yang semakin jauh dari "*keamanan, ketertiban dan apalagi dari kesejahteraan*". Ketiga nilai ini kalau tidak diwujudkan, tinggal sebatas impian yang indah yang tertulis pada setiap konstitusi atau piagam-piagam yng lain.

Meskipun perang konvensional telah berakhir, namun perang-perang dalam bentuk baru tetap tidak terhindarkan. Perang terhadap terorisme adalah salah satu contohnya. Terorisme, walaupun tidak menyeluruh , namun telah mengganggu keamanan dan ketertiban beberapa negara atau pihak tertentu. Derivasi selanjutnya dari ketidaknyamanan ini adalah terganggunya sendi-sendi lain, seperti dimensi sosial dan atau khususnya dimensi pembangunan ekonomi

Dengan terganggunya pembangunan ekonomi, cita-cita untuk mensejahterakan dunia sebagaimana yang dicanagkan kaum "neoklasik atau pihak liberal" sejak lama semakin jauh dari kenyataan. Pertumbuhan yang diharapkan dapat meretas kemiskinan atau kesengsaraan dengan merata, akan semakin kehilangan momentumnya. Kesejahteraan tinggal sebatas konsep yang indah diatas kertas, namun tidak pernah terealisasi. Apakah G-20 ada harapan untuk perubahan? Inilah yang menjadi masalah sentral dan tujuan tulisan ini.

Keberhasilan Diplomasi Obama?

Bagaimana G-8 berubah menjadi G-20 bukanlah kejadian yang begitu saja terjadi. Ada latar belakang, sejarah atau dalih mengapa perubahan itu terjadi. Bagaimana suatu grup negara-negara elit mau bergabung dengan negara-negara grassroth pasti ada suatu situasi yang mengkondisikan. Selain itu sudah pasti juga ada elit atau tokoh yang berperan dibelakangnya. Situasi ini menurut Syamsul Hadi adalah keterpurukan finansill Amerika Serikat yang sudah mencapai titik krisis. Dan tokoh yang memperjuangkannya adalah Barack Obama, yakni Presiden Amerika Serikat. Lebih jelasnya beliau menyatakan:

> Secara khusus keputusan mengganti G-8 dengan G-20 merupakan keberhasilan diplomasi Barack Obama yang menginginkan pembagian beban dalam tata kelola ekonomi internasional ditengah keterpurukan ekonomi AS. Ini sekaligus merupakan cara Obama mengimbangi Uni Eropa, khususnya Jerman dan Perancis yang terus menekan AS agar lebih memperketat regulasi di sector financil, dengan membatasi

bonus bagi para banker dan eksekutif perusahaan dana cegah resiko (Syamsul Hadi, KPS, 29 Sept 2009)

Keterpurukan ekonomi AS akibat krisis keuangan yang mencekam memaksa Washington mencari terobosan yang radikal agar perekonomian negeri itu normal kembali. Obama yang baru terpilih memang menjadi harapan rakyat AS memperbaiki keadaan yang sudah sangat kritis. Perusahan-perusahaan besar yang selama ini menjadi kebanggaan negeri adikuasa itu satu persatu kollaps. Sebut saja institusi keuangan/bank Lehman, perusahaan asuransi AIG, perusahaan otomotif General Motors dan lain-lainnya mengalami kerugian yang sangat significan

Perusahaan-perusahaan tersebut kalau tidak dibantu sudah jelas akan bangkrut yang berakibat akan melahirkan pengangguran yang besar. Dengan besarnya pengangguran akan menimbulkan ekses social-politik yang cukup serius. Pemerintahan dan administrasi Obama yang mengantisipasi bahaya demikian mengambil kebijakan menalangi perusahan-perusahan yang terpuruk tersebut.

Kebijakan penalangan perusahaan-perusahaan demikian dikenal dengan sebutan "bailout". Permintaan perusahaan-perusahaan untuk di bailout yang menjadi kebijakan Obama demikian diperkuat oleh Kongres. Kongres dengan melalui perdebatan yang sengit akhirnya menyetujui bailout perusahaan-perusahan yang merugi. AS yang sebelumnya dikenal sebagai pendekar liberalisme, bahkan ada yang menyebut "neoliberal" yang artinya menolak peran Negara dalam bidang perekonomian akhirnya menjilat air ludahnya sendiri.

Amerika Serikat berbalik arah. Kembali ke jati diri semula, yakni kembali ke neoklasik sebagaimana yang diteorikan oleh ekonom besar Inggris, John Maynard Keynes. Keynes sebagaimana faktanya mensarankan pendekatan pasar, namun apabila terjadi distorsi pada pasar tersebut, Negara dapat melakukan intervensi. Distorsi yang dimaksud adalah apabila terjadi pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan terhadap mayoritas nasyarakat

Krisis moneter yang dihadapi Amerika Serikat adalah bu[2]kti bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini telah melahirkan distorsi yang cukup akut. Kebijakan ekonomi yang liberal, apalagi yang neoliberal sebagaimana dicetuskan Ronald Reagan pasca Washington Consensus[3], menjadi fakta bahwa kebijakan demikian semakin jauh dari harapan

Meskipun Obama tidak langsung menyerang ideologi ekonomi-politik demikian, namun dari program-programnya sangat jelas bahwa ia (Obama) sudah meninggalkan kebijakan-kebijakan yang terlalu propasar. Mekanisme pasar tetap dipertahankan sejauh itu mendukung cita-cita seluruh masyarakat, tidak untuk pasar itu sendiri . pasar untuk kesejahteraan, bukan pasar untuk pasar

Karena begitu significan program yang ditawarkan oleh Barack Obama, sampai-sampai sebagian kalangan di AS menuduhnya sosialis. Obama diindikasikan telah meninggalkan jati diri AS yang liberal-kapitalis Sinyalemen ini paling tidak dapat kita lihat dari kebijakan ekonomi dan sosialnya.

Dalam bidang ekonomi, Obama dengan jelas dan terang benderang menyatakan akan membantu perusahaan-perusahaan yang sungguh-sungguh menyediakan lapangan kerja yang besar, seperti sektor-sektor riil. Tidak sebagaimana yang sudah lama berlangsung , yakni sector maya, yakni sektor-sektor keuangan, moneter atau financill. Sector-sektor maya yang punya capital besar dalam kenyataannya telah melahirkan krisis. Krisis yang tidak hanya berlangsung di AS , namun derivasinya menjalar ke seluruh dunia.

Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai adikuasa dalam bidang ekonomi, tanpa kecuali satu persatu merasakan dampaknya. Di Jepang, Eropa muncul pengangguran sebagai akibat dari lesunya

---

[2] Washington consensus muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan Negara-negara Amerika Latin membayar utangnya. Kegagalan ini ditengarai karena campur tangan Negara/pemerintah yang sangat besar. Sebagai reaksinya administrasi Ronald Reagan dan Margareth Thatcher memutuskan kebijakan yang tidak mengijinkan Negara campur tangan pada urusan-urusan ekonomi. Berikan semua itu kepada swasta. Semboyannya adalah deregulasi-debirokratisasi, privatisasi dan liberalisasi. Kebijakan ini ditempuh pada akhir 1970-an

[3]

perjalanan ekonomi. Hancurnya daya beli di AS sudah pasti akan mempengaruhi ekspor Negara-negara lain ke Negara tersebut. Perusahaan-perusahaan di Jepang maupun Eropa banyak yang gulung tikar.

Dengan kondisi demikian, tiada lain, tiada bukan memaksa elit-elit Washington mencari ikhtiar radikal. Cara-cara tambal sulam yang sudah lama berlangsung tidak mungkin lagi ditempuh. Elit yang berhasil melakukan terobosan ini adalah Obama. Seorang tokoh yang mungkin karena turunan Afrika/Kenya berani dan tiada beban melakukan terobosan-terobosan yang mungkin tidak lazim dilakukan seorang kulit putih Amerika. Terobosan ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikirannya sewaktu kampanye maupun setelah ia menang. Pada waktu ia dinobatkan sebagai calon Demokrati di Denver dengan lantang ia menyerang kebijakan-kebijakan yang dilakukan George Bush. Untuk jelasnya akan dikutif dibawah ini:

> …..ekonomi kita dalam kekacauan, dan janji Amerika sekali lagi terancam. Malam ini, semakin banyak orang Amerika tidak bekerja dan semakin banyak orang bekerja keras untuk hasil yang semakin berkurang. Semakin banyak diantara anda yang telah kehilangan rumah dan bahkan semakin banyak diantara anda yang sedang menyaksikan nilai-nilai rumah jatuh terjerembab. Semakin banyak diantara anda yang mempunyai mobil yang tidak mampu anda gunakan. Tagihan kartu kredit tidak mampu anda bayar, dan uang kuliah yang berada di luar jangkauan and. Tantangan-tantangan ini tidak semua dibuat oleh pemerintah. Tetapi kegagalan untuk menanggapinya adalah hasil langsung dari politik yang rusak di Washington dan kebijakan-kebijakan George Bush yang gagal (Pidato, 28 Agust 2008:1)

Kehancuran ekonomi yang derivasinya menjalar keseluruh sendi-sendi kehidupan Amerika tersebut ditengarai dengan tegas adalah kekelirian dari kebijakan-kebijakan George Bush sewaktu berkuasa di Washington. Bush telah menerapkan pola yang tidak benar sehingga ekonomi Amerika ambruk. Pola-pola yang tidak benar ini dipidatokan Obama:

> Sekarang, aku tidak percaya bahwa senator Mc Cain tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Amerika. Saya hanya menganggap dia tidak tahu. Kalau tahu, mengapa dia mendefinisikan kelas menengah sebagai seseorang yang menghasilkan lima juta dollar setahun?, bagaimana mungkin dia mengusulkan ratusan milyar keringanan pajak untuk korporasi-korporasi besar dan perusahaan-perusahaan minyak tetapi tidak satu sen dolar pun keringanan pajak bagi lebih dari seratus juta orang Amerika?. Bagaimana mungkin dia menawarkan rencana kesehatan yang benar-benar akan menguntungkan para pembayar pajak, atau rencana pendidikan yang tidak akan membantu keluarga-keluarga membayar pendidikan perguruan tinggi, atau rencana yang menswastakan jaminan social dan menjudikan pensiun anda? (pidato, 28 Agust 2008:2)

Dengan vocal dan militant Obama menilai bahwa Mc Cain tidak paham persoalan. Ketidakpahaman ini adalah pendapat yang mendefinisikan kelas menengah yang berpenghasilan lima juta dollar dengan situasi perekonomian yang terpuruk, sangat tidak rasional Pengistimewaan perusahaan-perusahaan besar yang sudah terang-terangan menciptakan kebangkrutan, sementara rakyat yang sudah sekarat tidak dapat bantuan adalah ahistoris. Demikian pula swastanisasi pendidikan dan jaminan social sangat-sangat tidak pada tempatnya. Pendidikan, khususnya jaminan social harus dikelola oleh Negara, bukan swasta.

Suatu konsep yang berkebalikan. Kalau rezim-rezim sebelumnya cenderung selalu memperkuat swasta, Obama sebaliknya, yakni dominant memperkuat Negara. Pemikran ini sesuai dengan pandangan-pandangan intelektual Amerika semisal Francis Fukuyama, Stiglitz, Krugman dan lain-lain. Meskipun mereka mengakui pasar, tetapi mereka lebih mengutamakan kemakmuran

masyarakat. Dalam khasanah lain sering juga disebut sebagai welfare state atau Keynesian[4].

Untuk mewujudkan hal-hal seperti itu, kata kunci adalah "perubahan". Perubahan itu menurut Obama dimulai dari sistim perpajakan. Sistim perpajakan yang berlangsung selama ini harus direformasi, yakni suatu aturan pajak yang tepat. Diberikan kepada pihak yang tepat, bukan kepada pihak-pihak diluar itu. Kenyataan selama ini adalah bahwa pelaksanaannya tidak seperti itu. Melenceng dari cita-cita atau tujuan semula. Pihak yang seharusnya diberikan peringanan tidak mendapatkannya. Sebaliknya pihak-pihak yang seharusnya tidak memperolehnya malah mendapatkannya.

Mc Cain yang akan meneruskan program George Bush memberikan keringanan pajak bukan kepada perusahaan-perusahaan kecil, tapi sebaliknya kepada perusahaan-perusahaan besar atau korporasi yang sering memindahkan pekerjaan ke luar negeri. Dengan seringnya korporasi-korporasi AS melakukan pemindahan pekerjaan keluar negeri, konsekwensinya adalah akan menimbulkan pengangguran di dalam negeri. Obama dengan tegas akan menghentikannya. Peringanan pajak akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Lebih dari situ, Obama bertekad akan menghapuskan pajak-pajak perolehan modal untuk bisnis kecil dan para pemula bisnis yang akan menciptakan pekerjaan berupah tinggi dan berteknologi tinggi masa depan

Peringanan pajak demikian selanjutnya akan diberikan kepada 95% pekerja-pekerja atau para karyawan tingkat bawah. Sebaliknya kepada pekerja kelas atas atau kelas menengah akan ditingkatkan perolehan pajaknya. Suatu terobosan yang mungkin tidak sekedar

---

[4] John Maynard Keynes adalah ekonom yang neoklasik, yakni yang percaya kepada pasar. Namun apabila terjadi distorsi atau pembiasan dalam pasar tersebut, maka Negara/state dapat melakukan intervensi. Pola ini menjadi ideology IMF sejak didirikan sebelum dicetuskannya consensus Washington yang popular dengan sebutan neoliberal. AS yang menjadi penggagas utama ideology neoliberal, di erta Obama sudah ditinggalkan.

neoklasik atau Keynesian, tapi lebih sesuai dengan konsep-konsep nasionalisme ekonomi atau merkantilis[5].

Sebagai fakta bahwa ekonomi Obama sudah sangat nasionalistik dapat dilihat dari rencananya yang akan menghilangkan ketergantungan kepada minyak. Alternative penggantinya harus diciptakan. Kecenduan kepada minyak adalah langkah sementara, bukan solusi jangka panjang, sebab tidak menyelesaikan masalah:

> Dan demi keamanan ekonomi kita, dan masa depan planet, saya akan membuat suatu tujuan yang jelas sebagai presiden dalam 10 tahun, akhirnya kita akan menyudahi ketergantungan kita kepada minyak dari Timur Tengah. Washington berbicara tentang kecenduan kita kepada minyak selama tiga puluh tahun terakhir, dan John Mc Cain sudah ada disana selama dua puluh enam tahun. selama itu, dia menolak standar-standard efisiensi bahan baker yang lebih tinggi untuk mobil, menolak investasi-investasi untuk energi terbarukan, menolak bahan baker terbarukan. Dan sekarang ini, kita mengimpor tiga kali lipat jumlah minyak seperti pada hari Senator Mc Cain memangku jabatan. Sekarang adalah waktunya mengakhiri kecvanduan ini, dan mengerti bahwa pengeboran minyak kita adalah langkah pengganti sementara, bukan solusi jangkla panjang. Juga bukan menyelesaikan masalah. Sebagai presiden, saya akan membuka cadangan gas alam kita,berinvestasi di dalam teknologi batu bara bersih, dan menemukan cara-cara untuk memanfaatkan secara aman tenaga nuklir. Saya akan membantu pengorganisasian kembali perusahaan-perusahaan otomobil kita, sehingga mobil-mobil irit bahan baker di masa depan dibuat di Amerika. Saya akan mempermudah rakyat Amerika untuk menghasilkan mobil-mobil baru ini. Dan saya akan menginvestasikan 150 milyar dollar untuk dasawarsa berikutnya kepada sumber-sumber enerji yang dapat dihasilkan, dapat diperbaharui – tenaga

[5] Merkantilis dalam ilmu hubungan internasional disebut dengan "realis". Dianggap negative, sebab tidak mau tahu dengan pihak atau bangsa lain, yang penting keinginan atau kepentingannya terpenuhi, terlepas apakah itu diperoleh dengan jalan kekerasan atau cara-cara yang tidak mengikuti kaidah-kaidah universal

angina dan tenaga matahari dan pembangkitan bahan baker bio selanjutnya; investasi yang akan menghasilkan industri-industri baru dan lima juta pekerjaan baru yang memberi upah yang baik dan tidak pernah disubordnasikan ke pihak lain

Mungkin karena program-program demikianlah Obama sampai-sampai disebut sebagai sosialis, kalau bukan komunis. Bagi AS mungkin itu adalah jalan keluar yang tepat, namun bagi mayoritas Negara-negara di dunia ini akan menjadi masalah. Masalah ini paling tidak adalah berkurangnya ekspor negara-negara lain ke AS, sebab Negara adikuasa ini telah melakukan proteksi yang ketat.

Disisi lain untuk memperjuangkan programnya itu Obama sudah pasti akan melobby Negara-negara yang bisa diajak kepada kepentingan tersebut. Negara-negara demikian sudah pasti bukan mitranya selama ini, yakni yang berkumpul dalam G-8 tetapi diluar itu. Negara-negara ini adalah yang punya kepentingan ke AS seperti Indonesia dan Negara-negara sejenis. Kenyataannya diplomasi Obama berhasil.

Tantangan Indonesia

G-20 jelas adalah kesempatan. Kesempatan (tentunya) dengan tanda kutif. Apabila tanda kutif tersebut dilewati negeri ini akan mendapatkan keuntungan. Namun apabila sebaliknya, negeri ini akan terus terjajah secara ekonomi. Persyaratan-persyaratan untuk itu sudah harus dipenuhi. Bagaimana persyaratan-persyaratan ini? Sebagai ilustrasi akan dikemukakan pendapat pakar pertanian dari UGM, M..Maksum dan dari IPB., Husein Sawit

Kedua pakar tersebut menengarai apabila Indonesia tidak menyususn strategi pembangunan industri pertanian yang terintegrsi dengan sector lain, Indonesia hanya akan jadi Negara yang menampung produk olahan dari Negara-negara anggota G-20 (Kps, 28 sept 2009)

Sinyalemen atau tepatnya keraguan itu muncul karena hingga saat ini pembangunan industri pertanian Indonesia belum jelas arahnya. Pembangunan sector pertanian berjalan sendiri, terisolasi dari pembangunan sector lain, seperti jasa, keuangan, indudtri,

perdagangan dan infrastrukur (Husein Sawit dalam Kompas, 28 Sept 2009)

Selain kedua pakar pertanian tersebut, pakar agraria, Gunawan Wiradi menyatakan kegelisahan yang sama. Beliau melihat hingga saat ini belum ada grand design pembangunan nasional yang menyeluruh. Jelasnya ia mengatakan:

> Namun , sejak lengsernya Soeharto sampai sekarang, saya belum melihat adanya grand design pola pembangunan nasional yang menyeluruh. Grand design pembangunan pertanian itu selayaknya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, apakah bangsa Indonesia memang berniat untuk mengubah tata social ekonomi masyarakat atau tidak?. Kedua, jika ya, lorong pandang yang bagaimana yang akan dianut? (Kps, 28 sept 2009)

Keraguan-keraguan demikian masih dapat dijajarkan sekian panjang lagi, yang pasti memang ada masalah yang serius . masalah yang sangat latent, sebab menyangkut pola, strategi atau grand design yang belum jelas. Atau memang tidak punya.?. jika tidak jelas, apalagi tidak punya sudah dapat dibayangkan, Indonesia hanya akan jadi tempat pemasaran produk-produk asing

Kembali kepada pola, strategi dan grand design yang ditengarai tidak jelas, atau mungkin tidak ada sama sekali menjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya. Di era Soeharto, telah dibuat Repelita, Rencana Pembangunan Lima Tahun lengkap dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mengapa tidak berhasil? Tidakkah Repelita itu sudah cukup baik?. Tidakkah itu sudah konsepsional dan komprehensif?

Betapa konsep pembangunan Indonesia sudah cukup baik, dapat dilihat dalam penjabarannya lebih lanjut. Dalam bidang teknologi misalnya Prof Dr BJ.Habibie telah membuat strategi teknologi yang cukup maju. Konsep teknologinya tidak kalah canggih dari negera-negara yang sudah tenologis atau industrialized. Tidak ada lagi yang kurang dari konsep tersebut Untuk lebih jelasnya akan diuraikan seperti apa konsep atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan:

- Tahap pertama, strategi transformasi industri diarahkan untuk menguasai kemampuan teknologi yang sudah ada di Negara maju, dan dikenal sebagai progressive manufacturing plan. Tahap ini dilakukan melalui empat fasa; pengenalan, perakitan, fabrikasi sebagian dan diakhiri dengan fabrikasi penuh.
- Tahap kedua, dikenal sebagai tahap integrasi teknologi. Pada tahap ini, teknologi yang telah dikuasai dimanfaatkan dan diintegrasikan ke dalam proses rancang bangun produk baru dari jenis produk atau jasa yang sama. Upaya ini dapat dilaksanakan sendiri atau dengan bekerjasama dengan mitra yang telah memiliki kemampuan teknologi maju
- Tahap ketiga, adalah rekayasa, perancangan, fabrikasi dan produksi produk teknologi yang sama sekali baru dengan menggunakan teknologi yang paling mutakhir yang sudah ada di dunia. Tahap ini dilaksanakan sendiri setelah memperoleh penguasaan teknologi rekayasa produk, proses produksi dan fabrikasi
- Tahap keempat, adalah tahap diperolehnya kemampuan dalam melaksnakan penelitian dasar untuk menunjang tahap ketiga, agar dapat diciptakan produk baru yang memiliki berbagai keunggulan dan/ atau inovasi lainnya dan memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing di pasaran internasional (Djojodihardjo, Haryono Prof Dr Ir, 2000:6-7)

Jelas suatu grand design yang lebih dari cukup. Apabila tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan konsisten, Indonesia sudah berada dalam tahapan Negara yang sudah industrialaized, sebagaimana Negara-negara lain yang konsekwen melakukannya. Indonesia tidak perlu ketinggalan dari Korea Selatan, China, Brazil dan India yang relative tahun pembangunannnya berdekatan. Atau dengan tetangga seperti Singapura dan Malaysia.Permasalahannya adalah kenapa jauh menyimpang? Mengapa konsep yang sangat rasional itu tidak terlaksana? Dimana letak kesalahannya?

Tinjauannya sudah pasti tidak hitam-putih, dan juga tidak sekedar teknologis, industrialized atau ekonomis, melainkan sudah politis atau mungkin cultural. Salah satu pakar yang melihat kelemahan ini adalah Faisal Basri. Menurut beliau kelemahan yang diidap Indonesia sudah sangat sistemik, sebab menyangkut semua dimensi kehidupan berbangsa bernegara. Lebih jelasnya beliau mengatakan :

> Lantas apa saja kekurangan Indonesia?. sangat banyak!. Mulai dari sistim politik yang tertutup dan otoriter, birokrasi yang kelewat gemuk dan korup, penegakan hukum yang sangat lemah, korupsi disegala bidang, berkembangnya sistem kapitalisme semu yang lebih mencuatkan pola-pola ekonomi rente, struktur perbankan yang manipulatif, sector riil yang kurang mendapatkan perhatian, dan sebagainya (Basri, Faisal, 2009:2-3)

Meskipun Indonesia sering dikategorikan sebagai Negara demokratis ketiga terbesar di dunia, belum pada pengertian substansi. Baru sebatas procedural. Semua perangkat-perangkat demokrasi sudah tersedia, namun belum dalam fungsinya. Birokrasi yang seharusnya pelaksana teknis dan administrative dari keputusan politik belum berujud birokrasi yang melayani, sebagaimana dikatakan Max Weber dengan birokrasi yang legal-rasional.

Penegakan hukum yang dilaksanakan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penegakan hukum diharapkan akan melahirkan keadilan pada masyarakat, nemun dalam prakteknya mereka-mereka yang kuat dan kaya yang merasakan. Rakyat kecil masih tetap seperti dulu, yakni selalu dalam keadaan kalah. Pencuri ayam dihukum, namun pencuri kategori kakap sering tidak dihukum

Pemberantasan korupsi dilaksanakan. Namun dalam aplikasinya masih dominant tebang pilih, atau membalas dendam kepada lawan ekonomi atau lawan politiknya. Pemberantasan yang seharusnya dimulai atau dilakukan dari hulu sebaliknya dimulai dari hilir. Yang ditangkap baru sebatas kelas teri. Bahkan dengan sangat militant George Yunus Aditjondro (2010), menengarai korupsi yang dilakukan rezim saat ini lebih dahsyat dari rezim sebelumnya.

Pendapat ini ditulis dalam bukunya yang cukup controversial "Membongkar Gurita Cikeas"

Seiring dengan korupsi demikian adalah pelembagaan korupsi dalam bidang atau sistem ekonomi. Pelembagaan ini adalah dipentaskannya pola ekonomi yang tidak sebenarnya. Melainkan maya atau ersatz. Dalam kategori Yoshira Kunio (1990) terkenal dengan sebutan "kapitalisme semu"

Kapitalisme Semu.

Praktek perekonomian yang dipentaskan Indonesia sejak Soeharto berkuasa ternyata tidak sesuai dengan sistim ekonomi Indonesia sebagaimana yang ditulis dalam UUD 1945. perekonomian yang dibangun tidak kongkrit atau nyata, melainkan semu. Dengan kata lain bukan perekonomian yang mandiri, yang berdirti diatas kaki sendiri. Melainkan semu atau maya.

Menurut Yoshihara Kunio, kapitalisme semu adalah kapitalisme pengganti atau substitusi, artinya bukan kapitalisme yang tulen, melainkan kapitalisme substitusi yang lebih inferior

Dengan pandangan demikian, Yoshihara mengasumsikan vahwa ada kapitalisme yang tidak semu. Kapitalisme seperti itu adalah adalah kapitalisme yang dinamis yang menggejala di Eropa pada abad ke-19 dan berhasil membawa kawasan ini keluar dari sistim feudal dan masuk ke sisitim kapitalisme industri sehingga melahirkan kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar biasa. Kapitalisme dinamis juga menggejala di Amerika Serikat. Dan kemudian Jepang, dengan hasil yang sama; kemajuan ekonomi dan teknologi yang luar biasa. Juga banyak yang berpendapat bahwa kapitalisme dinamis juga sedang menggejala di keempat naga Asia; Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura

Kapitalisme Semu Ini terjadi menurut Yoshihara karena dua hal. Pertama, di Indonesia campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis. Ini juga yang menimbulkan

timbulnya pencari rente [6]di kalangan birokrat pemerintah, sehingga wiraswastawan yang sesungguhnya tidak dapat berkembang. Sebagai derivasinya pola ekonomi semu ini menimbulkan kekuatan ekonomi pengusaha-pengusaha keturunan Cina, yang melalui koneksinya dengan para birokrat Negara berhasil memperoleh fasilitas-fasilitas khusus bagi usahanya.

Kedua, kapitalisme di Indonesia tidak didasarkan kepada perkembangan teknologi yang memadai. Akibatnya tidak terjadi industrialisasi yang mandiri. Pada hal industrialisasi merupakan yang sangat penting untuk sebuah pembangunan ekonomi yang mandiri. Kekuatan ekonomi yang sudah berhasil, seperti Jepang misalnya tidak terletak pada keahliannya dibidang perbankan, atau usaha real estate, atau usaha jasa lainnya. Semua ini bisa dilakukan secara sama baiknya oleh pengusah-pengusah Asia, tapi pada penguasaan teknologi yang tinggi. Kapitalisme di Indonesia kebanyakan hanya bergerak dibidang jasa. Kalaupun bergerak dibidang industri, ia hanya berperan sebagai "kapitalisme komprador", yakni bertindak sebagai agen industri manufaktur asing dinegerinya sendiri. Semua ini terjadi karena tingkat perkembangan teknologi yang masih rendah

Atas dasar pandangannya itu, maka pada prinsipnya terapi yang ditawarkan Yoshihara adalah, pertama, memperbaiki kualitas campurtangan pemerintah di bidang ekonomi. Kedua meningkatkan kemampuan teknologi

Peluang: Kemauan Politik

Persoalan ekonomi menjadi sangat sentral, sebab penyakit-penyakit yang diidapnya sudah begitu akut. Masalah kapitalisme semu mengemuka pada waktu rezim Soeharto, akan tetapi ketika Soeharto turun dari singgsana kekuasaan, keadaan tidak berubah. Dengan tidak berlebihan dapat dikatakan perekonomian Indonesia pada pasca Soeharto semakin jauh terjerumus kepada ketergantungan kepada asing

---

[6] Untuk lebih mendalami bagaimana mencuatnya perburuan rente ini banyak ditulis oleh Sritua Arif. Beliau sangat intens meneliti bagaimana akhirnya sistim ekonomi Indonesia terjebak dalam perburuan rente tersebut

Pada/Pasca krisis moneter medio 1997, entah dengan pertimbangan apa Indonesia mengundang IMF untuk membenahi ekonomi. Banyak kalangan sesungguhnya tidak setuju kebijakan demikian, seperti Cyrillus Harinowo. Cyrillus dalam beberapa tulisannya menyatakan Indonesia tidak perlu mengundang kekuatan luar membenahi perekonomian. Namun ibarat nasi sudah jadi bubur peringatan Cyrillus tersebut hanya sebatas angin lalu, Indonesia tetap mengundang rezim keuangan internasional tersebut

Pada faktanya resep-resep yang dimajukan IMF tidak membuat perekonomian Indonesia lebih baik, malah sebaliknya semakin tergantung kepada kekuatan-kekuatan perekonomian Asing. Ketergantungan yang sudah pasti tidak ada yang menginginkan, namun sudah terlembaga dengan sistemik sekian dasawarsa. Para reformis yang diharapkan dapat memberikan harapan, sebaliknya ketika mereka masuk kedalam birokrasi-pemerintah, parlemen dan lain-lain lembaga tidak bisa berbuat apa-apa. malah yang terjadi adalah penguatan kepada ketergantungan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang muncul, banyak menguntungkan pihak asing. dengan vulgar Dradjad Wibowo menyebutnya sebagai membabi buta[7] mengikuti consensus Washington plus neoliberalnya. Lalu apa yang dapat dilakukan?

Jawabannya sudah pasti tidak hitam-putih. Berbagai opsi akan muncul. Secara umum sebagaimana diuraikan diatas, khususnya yang ditulis Faisal Basri, maka yang dibenahi adalah sistim pemerintahan, birokrasi, penegakan hukum, peminimalan korupsi, perubahan sistim (?) ekonomi, penyehatan perbankan. Menurut Yoshihara Kunio, adalah perbaikan kualitas Negara dan pembangunan teknologi

Yusuf Kalla dalam berbagai kesempatan memberi jalan keluar yang lebih sederhana. Menurutnya yang penting adalah "keamanan", bukan "demokrasi". China yang tidak demokratis dapat membangun perekonomiannya hingga menjadi raksasa dunia, menjadi argumentasi Kalla menyatakan pendapat tersebut.

---

[7] Drajad Wibowo menyatakan kata-kata yang keras ini ketika menanggapi kenaikan harga BBM dua kali dalam tahun 2005. ia melihat seharusnya itu tidak perlu terjadi, cukup dengan memperketata pembiayaan atau belanja pemerintah

Meskipun seakan-akan berbeda-beda, pendapat-pendapat demikian sesungguhnya menginginkan satu kata kunci yakni "perubahan" (change). Mungkin perubahan pada semua dimensi, sebagaimana dijabarkan Faisal Basri lebih jauh. Semua kebijakan-kebijakan yang berlangsung selama ini sudah waktunya dikaji ulang. Tidak cukup hanya dibidang perekonomian, tapi juga dibidang social-budaya, politik dan lain-lainnya. Syarat untuk itu semua adalah "kemauan politik" (political will). Bila hal itu tidak dilakukan Indonesia hanya menjadi penampungan komoditi-komoditi olahan dari Negara-negara yang bergabung didalamnya. Artinya sama saja melestarikan ketergantungan yang sudah berlangsung

Hal-hal lain yang menjadi catatan penting adalah, apabila Indonesia memang sudah mempunyai political will yang konsisten, masuk kedalam G-20 adalah kesempatan. Kesempatan dalam segala bidang. Paling tidak untuk mendapatkan bantuan, investasi dan kemajuan IPTEK dan Teknologi. Keragaman yang ada pada G-20 apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendatangkan keuntungan. Tekanan Eropa, khususnya Jerman dan Perancis kepada AS dalam bidang finansiil, perang dagang antara China yang begitu expansif dengan anggota-anggota yang lain adalah peluang yang menunggu. Tinggal bagaimana diplomasi Ekonomi-politik yang akan dipentaskan. Berkualitaskah ?

Daftar Pustaka

Aditjondro, G J, 2010, *Membongkar Gurita Cikeas*, Galang Press, Yogyakarta

Basri, F, 2009, *Lansekap Ekonomi Indonesia*, Kencana Group, Jakarta

Djojodihardjo H,2000, Visi, *Strategi dan Kebijakan IPTEK*, BPPT, Jakarta

Hadi, Syamsul, 29 September 2009, dlm *Kompas*, Jakarta

Harinowo C, 2004, *IMF, Penanganan Krisis dan Indonesia,* Gramedia, Jakarta

Kunio Yoshihara, 1988, *The Rise of Ersatz Capitalism*,, Oxford Press, Singapore

Maksum & Husein, dlm *Kompas*, 28 Sept 2009

Obama, Barack, 28 Agustus 2008, Janji Amerika, Pidato, Denver, USA

Nuklir Sebagai Ancaman Keamanan Nasional: Studi Kasus Program Nuklir Iran dan Ancaman Hegemoni Amerika Serikat (2003-2007)

Shinta Ayudya Putri

Abstract

US attention is focused on Iran's nuclear program, which is seeking to acquire nuclear weapons. The President of Iran Mahmoud Ahmadinejad explains that Iran's nuclear program is for peace and civilian purposes. But, US is to distrust. US government fear that Iran also might pass on expertise and weapons technologies to terrorist. It can threats US hegemony and the US ally. US efforts to halt Iran's nuclear program with diplomacy method that involve groups of six. The US President George W. Bush warned Iran with sanctions of UN Security Council if Tehran refuses to halt nuclear program. But, Iran keep continuing its nuclear program. UN Security Council punishes Iran by two resolution on December 2006 and March 2007. It can not to halt Iran's nuclear program.

Keyword: nuclear program, national security, hegemony.

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) muncul sebagai salah satu negara adikuasa yang hampir tidak tersaingi di dunia. Hingga saat ini Amerika Serikat merupakan negara terkuat di dunia secara militer. Awal tahun 1970-an superioritas militer Amerika Serikat menurun karena perbedaan kekuatan militer dibanding Uni Soviet mengecil, keadaan ekonomi dalam negeri memburuk dan keterlibatan dalam perang Vietnam memakan biaya dan tenaga yang besar. (Jackson & Sorensen, 2005:250). Saat ini dominasi Amerika Serikat dihadapkan pada munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti, Iran, Korea Utara, India, dan Pakistan yang semuanya memiliki nuklir. Amerika Serikat merasa khawatir dengan kehadiran mereka karena dapat mengancam kepentingan nasional maupun global Amerika Serikat.

Program pengembangan energi nuklir Iran menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya (Israel) di Timur Tengah. Tujuan pengembangan energi nuklir Iran selain untuk kepentingan nasionalnya juga tidak dapat dipisahkan dari kekhawatiran Iran dan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya terhadap peningkatan kemampuan militer Israel yang

kapabilitasnya sangat besar bahkan telah berada jauh di depan semua negara Arab. Penentangan Israel atas program nuklir Iran, jelas mengundang kebencian Ahmadinejad atas Israel. Apalagi, jelas-jelas Israel bekerja sama dengan Amerika untuk memusuhi Iran. Ahmadinejad merasa bahwa, Israel tak ubahnya dengan Amerika, ingin bersikap tidak adil atas rakyat Iran. Israel yang sudah sejak lama mengembangkan program nuklir, tidak mendapat perlakuan dan pelarangan tegas dari Amerika maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sementara Iran, justru dilarang keras dengan berbagai ancaman berupa embargo dan sanksi militer. (Simanjuntak, 2007:36-37)

Selain itu, upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir juga memancing reaksi dari Amerika Serikat dan sekutunya yang mengancam akan mengenakan sanksi melalui DK PBB terhadap Iran. Satu hal yang sangat ditakutkan oleh Amerika Serikat jika senjata pemusnah massal jatuh ke tangan kelompok teroris seperti Al Qaida yang akan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat dan para sekutunya (Jemadu, 2007:83-4).

Presiden Amerika Serikat George W Bush mengelompokkan Iran sebagai "poros kejahatan" (*axis of evil*) bersama Irak dan Korea Utara. Menurut George W Bush ketiga negara ini adalah negara-negara sponsor terorisme, mereka digolongkan sebagai rezim yang sangat berbahaya yang mengancam dunia dan Amerika Serikat dengan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*) yang begitu dahsyat. Statement yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ini semakin terasa menemukan momentumnya jika dikaitkan dengan apa yang sekarang dilakukan oleh Iran dengan program nuklirnya. Bagi Amerika Serikat predikat sebagai negara sponsor terorisme akan menjadi sangat riskan jika kemudian Iran memiliki kemampuan nuklir yang menurut Amerika Serikat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan antara program nuklir Iran dengan ancaman keamanan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni?

Kerangka Pemikiran

Menurut Kenneth Waltz, negara-negara yang sangat penting dalam menentukan perubahan-perubahan pada struktur internasional adalah negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar.(Jackson & Sorense, 111). Lebih jauh Waltz mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar adalah mereka yang mengatur sistem internasional. Karena kekuatan yang besar

maka tidaklah mengherankan apabila negara-negara besar tersebut juga memiliki kepentingan besar dalam sistem mereka (Ibid.115).

Sementara menurut Robert Gilpin, neorealisme merupakan kombinasi dari studi politik internasional dengan kekuatan ekonomi internasional. Neorealisme merupakan paham yang mengakui adanya integrasi antara politik internasional dengan ekonomi internasional. Neorealisme juga beranggapan bahwa masih ada ruang (meski kecil sekalipun) untuk mengupayakan kerjasama internasional guna mencapai kepentingan keamanan internasional. Kerjasama dalam hal ini merujuk pada koordinasi kebijakan dari berbagai negara untuk mencapai stabilitas dan perdamaian internasional. Paham ini juga mengakui adanya hubungan yang saling menguntungkan antarnegara.(Perwita, 2007:44) Asumsi-asumsi inti dari neorealisme adalah:

1. Negara dan aktor lain berinteraksi dalam lingkungan yang anarki. Artinya tidak ada kewenangan *central* yang dapat memaksakan aturan-aturan dan norma-norma atau melindungi kepentingan besar dari komunitas global.
2. Struktur yang ada dalam sistem adalah *major determinant* dari perilaku aktor.
3. Negara berorientasi pada kepentingannya sendiri, dan sistem yang anarki dan kompetitif mendorong negara untuk menolong dirinya sendiri dengan melakukan kerja sama.
4. Negara adalah aktor rasional, dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.
5. Masalah yang ditimbulkan oleh sistem internasional yang anarki adalah perjuangan untuk kelangsungan hidup.
6. Negara memandang negara lain sebagai musuh yang potensial dan ancaman bagi keamanan nasional mereka. (Lamy,2006:210)

Berkaitan dengan masalah nuklir Iran, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai respon terhadap masalah tersebut tidak pernah terlepas dari kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Iran. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realisme menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, di mana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau

kerjasama. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita, 2005:35)

Hakikat kepentingan nasional menurut Frankel adalah sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegaskan oleh suatu negara. Lebih lanjut Frankel mengatakan, bahwa kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara, dan kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat dalam aplikasinya pada kebijakan-kebijakan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju. Dengan demikian, baik kebijakan maupun rencana yang dituju berorientasi kepada kepentingan nasional (Soeprapto, 1997:144)

Adapun kepentingan nasional yang relatif sama di tiap-tiap negara adalah: keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.(Rudy, 2001:116) Menurut Nuctherlein kepentingan Amerika Serikat dari waktu ke waktu adalah: *Pertama,* mempertahankan negara Amerika Serikat dan sistem konstitusionalnya. *Kedua,* perluasan eksistensi ekonomi Amerika Serikat dan mempromosikan produk-produknya ke luar negeri. *Ketiga,* menciptakan suatu tata dunia baru oleh sistem keamanan yang *favourable*. *Keempat,* mempromosikan nilai-nilai demokrasi pasar bebasnya.(Nuctherlein, 1991:7) Amerika Serikat punya kepentingan besar untuk menaklukan Iran, maka dari itu jalur-jalur penting perdagangan minyak dari wilayah teluk dikuasai. Selain itu Amerika Serikat juga harus melindungi eksistensi Israel di Timur Tengah karena Israel merupakan sekutu penting Amerika Serikat di kawasan tersebut. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memberikan pengakuan atas berdirinya Israel. Dalam pandangan Amerika Serikat, Israel merupakan benteng pertahanan kepentingan dan pengaruhnya di Timur Tengah (Findley, 1995:166)

Terlebih lagi saat ini Iran tengah mengembangkan energi nuklir. Yang oleh Amerika Serikat hal tersebut di pandang sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oleh karena itu, dukungan Israel sangat diperlukan oleh Amerika Serikat. Ancaman merupakan suatu pokok utama dalam persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya pada bentuk dari ancaman tersebut dan bagaimana negara dapat menerima atau memperhatikan, tetapi juga pada suatu intensitas dan pada operasi suatu ancaman.(Rudy, 36-37)

Menurut Barry Buzzan terdapat banyak sekali ancaman termasuk salah satunya adalah serangan senjata nuklir yang memiliki dua karakter yaitu:

1. Tepat mengetahui berapa menit lagi ancaman mungkin dapat tetap dilaksanakan.
2. Sangat tidak menentu yang artinya ancaman mungkin dapat terus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan tidak ada kata kapan.

Lebih lanjut menurut Barry Buzzan, terdapat dua antisipasi yang dapat menanggulangi dan menjaga keamanan nasional masing-masing negara yang dapat dijalankan melalui berupa kebijakan yang antara lain:

1. Kebijakan pasif yaitu dengan menunggu sampai kapan ancaman tersebut terjadi dan kapan ancaman itu menjadi besar atau menjadi luas.
2. Kebijakan yang secara aktif dengan cara mengantisipasinya, yaitu ketika ancaman tersebut menjadi besar. (Ibid)

Negara adidaya seperti AS, dengan kemampuan optimal di segala bidang bukanlah jaminan, bahwa AS lepas dari segala bentuk ancaman, tetapi sebaliknya semakin dalam peranan yang dijalankan suatu negara terhadap hubungan dengan negara lain, semakin banyak pula kontroversi baik dalam perbedaan kepentingan, kecurigaan intervensi terhadap negara lain, maupun kekhawatiran akan timbulnya negara hegemon baru. Presiden AS George W. Bush menilai, bahwa ancaman-ancaman dominan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsanya berasal dari negara-negara 'poros kejahatan' (*axis of evil*) yaitu Iran, Irak dan Korea Utara. Khususnya, Iran dan Korea Utara yang aktif dalam pengembangan proyek nuklir dan rudal serta perdagangan senjata-senjata tersebut yang dapat berlanjut ke arah proliferasi nuklir. Hal tersebut tentu saja mencemaskan keamanan negara-negara di dunia internasional khususnya AS apabila senjata nuklir digunakan untuk menghancurkan kekuatan lawan.

Kredibilitas suatu ancaman juga dipengaruhi oleh kemampuan negara pengancam. Semakin besar kemampuannya biasanya makin berkurang biaya untuk melaksanakan ancaman itu, pada gilirannya kredibilitasnya meningkat. Kemampuan dari belakang suatu ancaman tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militer suatu negara, tetapi juga oleh dukungan *policy influencer* dan dari negara lain dalam sistem itu. (Couplin, 1992:130)

Amerika Serikat pun tidak tinggal diam melihat Iran yang terus melanjutkan program nuklirnya. Berbagai sanksi ekonomi maupun militer telah dijatuhkan kepada Iran oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi DK PBB No.1747 atas desakan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB tidak membuat Iran gentar, malah Iran tetap bergeming untuk melanjutkan program nuklirnya. Resolusi DK PBB No.1747 ini merupakan resolusi yang sudah di perlunak untuk mendapatkan dukungan Rusia dan Cina, dua anggota DK PBB pemegang hak veto dan merupakan sahabat Iran. Sebelumnya AS, Inggris, Perancis dan Jerman menginginkan sanksi yang lebih keras untuk Iran.

Amerika Serikat memandang Iran sebagai musuh yang potensial dan ancaman bagi keamanan nasional mereka. Menurut Barry Buzzan secara umum keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival)*. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prisip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang nyata (*exsistencial threat)* (Perwita & Yani, 2005:122). Keamanan nasional merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang objektif dalam menciptakan kondisi politik nasional dan internasional yang di anggap perlu, berkaitan dengan perlindungan atau perluasan nilai-nilai utama nasional dari keberadaan dan musuh potensial (Buzan, 1992:37)

Berkaitan dengan masalah nuklir Iran upaya AS yang ingin menghentikan pengembangan program nuklir Iran menunjukkan, bahwa AS ingin mempertahankan dominasinya atas negara-negara di Timur Tengah. Iran pun ingin menunjukkan dominasinya di Timur Tengah dengan melakukan pengembangan teknologi nuklir. Pengertian dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya.(Marbun, 2002:140)

Untuk mempertahankan hegemoni di Timur Tengah, AS menempatkan basis militernya di Arab Saudi, dan di Asia Tengah di perbatasan Afghanistan-Uzbekistan dan penyebarannya strategis di perbatasan Georgia dengan Chechnya. Kemajuan ekonomi yang unggul telah memungkinkan AS membangun kekuatan militer yang besar hingga mampu berkuasa secara global. Kekuatan ekonomi dan militer ini selanjutnya bermanfaat untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologi kapitalisme yang diyakini AS merupakan penyelamat kebesarannya. (Shoelhi, 2007:23-4)

Sejak Perang Dunia (PD) I berlangsung hingga PD II berakhir, AS menolak anggapan yang menyatakan AS membutuhkan negara lain. Hal ini disebabkan AS berada pada posisi militer yang berkuasa secara global sesuai dengan keunggulan status ekonominya. Hegemoni di belahan dunia non-komunis selama tahun 1950-1990 layaknya menempatkan AS sebagai sebuah imperium. Dalam waktu singkat, aset ekonomi, militer dan ideologi AS berada pada kekuasaan imperial.

Iran yang sedang melakukan pengembangan energi nuklir ingin melepaskan ketergantungan energi pada Barat dan mengurangi pengaruh AS di kawasan Timur Tengah. Iran di bawah Presiden Ahmadinejad melancarkan perlawanan di tiga fron sekaligus, yaitu di Irak, Lebanon, dan Palestina. Perlawanan Presiden Ahmadinejad ini pun dilandasi kesadaran leluhurnya penghormatan atas hak dan harga diri Iran sebagai negara berdaulat dan rasa tanggungjawab untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan perikeadilan yang beradab. Itulah sebabnya, Iran tampil sangat berani menangkis dan melawan setiap perlakuan yang sewenang-wenang, termasuk melawan kehendak AS agar Iran menutup instalasi nuklirnya.(Ibid.14)

Dalam masalah pengembangan program nuklir Iran, pemerintah Iran yang mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya adalah wujud kepentingan nasional dan politik luar negeri yang dijalankan dan mendapat dukungan luas rakyat Iran. Definisi politik luar negeri adalah tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan suatu negara untuk menghadapi lingkungan eksternalnya. (Holsti, 1988:21) Lebih lanjut menurut Budiono, politik luar negeri merupakan keseluruhan perjalanan keputusan suatu pemerintahan untuk mengatur semua hubungan dengan kalangan luar negeri. Semua bentuk hubungan luar negeri yang dikontrol oleh pemerintah merupakan bagian dari politik luar negeri.(Soeprapto, 202). Pada umumnya kebijakan luar negeri diarahkan untuk memelihara atau mempromosikan kepentingan politik dan ekonomi luar negeri, serta *power*-politik suatu negara. Karena kebijakan atau politik luar negeri terkadang mencerminkan sasaran kepentingan yang luas dan secara spesifik untuk menanggapi situasi atau kondisi tertentu.

Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan kepanjangan dari politik dalam negeri sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrument yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin

dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu negara sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan. Politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang secara efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara tersebut.(Soenarko, 1996:97). Politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. (Mas'oed, 1994:84)

Menurut pakar hubungan internasional, politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kondisi dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasionalnya (Choplin, 130). Politik luar negeri suatu negara dalam kebanyakan hal, ditentukan lebih banyak oleh kondisi politik dalam negeri. AS dan Iran menghadapi masalah dalam negeri yang mendesak untuk diselesaikan. AS menghadapi menghadapi konflik Irak yang berdampak secara ekonomi dan politik di dalam negerinya. Sedangkan Iran kendati pendapatan dari minyak bumi cukup besar, tapi keadaan ekonomi sosial masyarakat Iran masih belum begitu menggembirakan.

Adapun keputusan untuk memperkarakan masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB, setelah sebelumnya IAEA melakukan inspeksi ke berbagai fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Bushehr di tempuh melalui jalan diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional. Diplomasi merupakan salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Harold Nicholson diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi. Dimana negosiasi menekankan pada sifat kompromi yang didasarkan atas asumsi bahwa kompromi lebih menguntungkan. Bagi Nicholson politik luar negeri didasarkan kepada konsepsi umum, kebutuhan atas kepentingan nasional dan diplomasi adalah alat atau metode. (Holsti, 210-3)

Setelah peristiwa invasi AS atas Irak, terjadi perubahan paradigma diplomasi internasional AS. Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, sempat menulis memo kepada Presiden Bush tentang kemungkinan adanya pertemuan langsung dengan Iran untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagaimana diketahui, sejak rezim baru Iran terbentuk, apalagi dengan adanya penyanderaan para diplomat AS di Iran tahun 70-an, kedua belah

pihak tidak pernah melakukan hubungan langsung. Iran menyebut AS *Great Satan,* sedangkan AS menamakan Iran *Axis of Evil* bersama Irak dan Korea Utara. Namun, bila dilihat dari esensi hubungan internasional diplomasi adalah selalu merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. (Ruru, 2006)

Nuklir Iran sebagai Ancaman Hegemoni AS

Pada 11 Januari 2006, Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyatakan kalau Iran akan mengembangkan teknologi nuklir damai. Nuklir yang juga dikembangkan untuk memacu kemajuan dan perkembangan bangsa Iran. kemudian pada April 2006, Presiden Ahmadinejad kembali angkat bicara soal program pengembangan nuklir Iran. Saat itu Presiden Ahmadinejad mengumumkan, bahwa Iran sudah berhasil melakukan pengayaan uranium, untuk selanjutnya deteliti lebih jauh mengenai kemungkinan pengalihannya menjadi bahan bakar nuklir. Sejak saat itu, publik dunia menjadi cemas. Iran kemudian dipandang sebagai bangsa yang perlahan benar-benar berubah. Berpotensi menjadi negara besar, serta memiliki daya tawar yang kuat atas konstelasi politik maupun sosial dunia. (Simanjuntak, 31-2)

Amerika Serikat (AS) bersama para sekutunya, sama sekali tidak percaya atas tujuan damai program pengembangan nuklir Iran tersebut. AS bersama sekutunya, meminta Iran untuk segera menghentikan aktivitas pengembangan nuklirnya (pengayaan uranium). Bagi AS pengembangan nuklir Iran sangat berbahaya. Dari strategi jangka panjang, rencana Iran tersebut dinilai sebagai cara untuk melawan kedigdayaan AS beserta sekutunya. Iran dicurigai merancang teknologi nuklir untuk menghadapi perang di masa depan dengan musuh-musuhnya, termasuk AS.

Presiden George Bush memperingatkan pecahnya Perang Dunia III apabila Iran mendapat senjata nuklir. Presiden George Bush menghimbau para pemimpin dunia untuk mencegah Teheran memiliki senjata tersebut dan menghindari bencana. Tak hanya itu, Presiden George Bush juga mengeluarkan ancamannya itu dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington. Presiden George Bush menyebut Iran yang bersenjata nuklir sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia dan terutama terhadap Israel.

Amerika Serikat (AS) menganggap program nuklir Iran dapat mengancam ambisi hegemoninya di masa yang akan datang. Menurut AS keinginan besar Iran untuk terus melanjutkan program nuklirnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Iran juga akan memanfaatkan program nuklirnya untuk membuat senjata nuklir,

yang dapat digunakan Iran untuk melawan sekutu-sekutu AS dan juga menghancurkan fasilitas-fasilitas kepentingan AS khususnya di kawasan Timur Tengah. AS tentunya tidak ingin ada satu negara pun yang di pandang potensial dapat mengancam hegemoninya. Iran adalah salah satu negara yang dianggap potensial dapat mengancam hegemoni AS dengan program nuklirnya.

Iran memiliki kekayaan sumber daya alam gas dan minyak. Selain itu, Iran juga memiliki beberapa tambang uranium di wilayah Yadz yang bisa di proses menjadi bahan untuk membuat bom nuklir dengan sumber daya manusia yang mereka miliki. Selama ini Iran dikenal sebagai salah satu negara yang gencar melawan dominasi AS di Timur Tengah dan juga negara yang telah lama bermusuhan dengan AS sejak kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979. Oleh sebab itu, AS berusaha menghentikan setiap negara yang di pandang potensial dapat mengancam hegemoninya. AS pun bersikap keras terhadap Iran dan meminta Iran untuk menghentikan program nuklirnya dengan ancaman sanksi jika Iran menolak menghentikannya.

Amerika Serikat (AS) takut jika Iran memiliki senjata nuklir, Iran dapat mengancam dominasi AS di kawasan Timur Tengah. Dalam bidang ideologi, AS tidak ingin Iran membangkitkan agenda Revolusinya. Sejak terpilih sebagai presiden pada 5 Agustus 2005, Presiden Ahmadinejad berupaya keras menjalankan agenda pemerintahan yang kontras dengan Muhammad Khatami. Agenda Presiden Ahmadinejad adalah "Revolusi Ketiga". Salah satu butir penting "Revolusi Ketiga" ialah perlawanan terhadap hegemoni AS dan Israel. Bagi Presiden Ahmadinejad dan kaum revolusioner Iran, program nuklir adalah tiket Iran menuju kemerdekaan dan kemandirian dari hegemoni asing. Presiden Ahmadinejad menegaskan inti "Revolusi Ketiga" yakni Revolusi Islam tahun 2005 ini, semoga Allah menghendaki, akan memotong akar-akar ketidakadilan di dunia. Gelombang Revolusi Islam ini segera akan mencapai seluruh dunia. (Khazim & Hamzah, 2007:159-60)

Kemudian dalam bidang politik, AS takut jika Iran mengekspor revolusinya ke negara-negara Arab. Sejak tergulingnya Reza Pahlevi oleh kekuatan revolusioner pimpinan Imam Khomeini, Iran terus berupaya menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Itulah, sebabnya Iran konsisten memberikan dukungan dan bantuan kepada Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon, serta menunjukkan solidaritas yang kuat dengan seluruh unsur kekuatan Syi'ah di Irak yang kini berkuasa. Mereka semua menentang campur tangan AS dan Israel atas setiap masalah yang

terjadi di Timur Tengah. Irak yang diharapkan menjadi contoh negara demokrasi di Timur Tengah, namun konflik sektarian antara kelompok sunni dan Syi'ah malah memberi gambaran buruk tentang demokrasi yang di bangun dengan kekuatan senjata.

Kemudian dalam bidang ekonomi, di dunia ini ada lima negara penghasil minyak terbesar yaitu, Arab Saudi, Iran, Rusia, Irak dan Venezuela. Mereka inilah yang menentukan harga minyak dunia. Meroketnya harga minyak bumi membuat para produsen minyak ini, kecuali Irak memiliki daya tawar politik yang semakin kuat. AS yang harus mengimpor 60 persen dari total konsumsi minyak semakin sulit posisinya dalam percaturan regional Timur Tengah akibat hubungan yang tidak bersahabat antara Washington dan Teheran. Iran dapat mengatur dan menentukan harga minyak di pasar dunia.

Menurut Krassimir Petrov, seorang pakar ekonomi Rusia lulusan AS, mengatakan bahwa AS menghadapi kerawanan kalau negara-negara penghasil minyak meninggalkan dolar AS (USD) dan minta di bayar dengan euro. Hingga kini, jual beli minyak dilakukan dengan USD sesuai pengaruh AS yang kuat. Hal itu membuat para pengimpor minyak selalu mencari USD dalam jumlah besar karena besarnya konsumsi minyak. Kalau perdagangan minyak dialihkan dari USD ke mata uang euro, dapat dibayangkan betapa kerugian yang dialami AS. Petrov mengatakan, alasan utama mengapa AS begitu keras terhadap Iran sekarang, karena Pemerintah Iran membuka bursa minyak dengan euro sebagai alat pembayarannya. Kalau hal itu berhasil, ada bahaya yang akan diikuti oleh lebih banyak pengekspor minyak karena berkepentingan meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa yang makin kuat ekonominya. (Suryohadiprodjo, 2007)

Kemudian dalam bidang militer, banyaknya tentara AS yang tewas saat bertugas untuk menjaga keamanan di Irak dan Afghanistan akibat di serang oleh kelompok-kelompok yang anti tentara AS dapat melemahkan posisi AS di negara tersebut. Apalagi bila Iran berniat membagi keahlian dan pengetahuan mengenai teknologi nuklir pada kelompok-kelompok yang menentang AS, bisa mengancam posisi AS di kawasan Teluk. Sejak Maret 2003 hingga Januari 2007, lebih dari 3000 tentara AS tewas. Angka tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dialami militer AS paska Perang Vietnam. Sedangkan biaya perang yang harus dikeluarkan mencapai USD 6 miliar per bulan. Selama ini AS curiga Iran turut memicu gejolak kekerasan di Irak dengan mempersenjatai dan melatih berbagai kelompok bersenjata di Irak. Di dalam laporan

Departemen Pertahanan AS kepada Kongres, disebutkan Iran bersama dengan Suriah telah "mengganggu proses politik Irak dengan mendukung kekuatan antipemerintah dan antikoalisi". (Malik, 2007)

Kemudian dalam bidang teknologi, dalam teknologi militer Iran berhasil membuat dan mengembangkan rudal milik sendiri dan senjata-senjata militer lainnya seperti rudal Shahab-3. Dalam teknologi transportasi, Iran sudah memiliki sistem kereta bawah tanah. Iran juga mengembangkan teknologi rekayasa nuklir yang dapat mengkloning berbagai macam hal. Berbagai keberhasilan yang dicapai Iran dalam bidang teknologi dapat membuat teknologi AS tersaingi. AS tentunya tidak ingin Iran menggeser pasar teknologi AS, dan membuat negara-negara lain beralih menggunakan teknologi buatan Iran. Hal tersebut tentu akan mengurangi devisa yang didapatkan AS dari penjualan teknologinya.

Amerika Serikat menganggap kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang paling penuh tantangan, karena di kawasan itu ambisi hegemoninya mendapat perlawanan sengit baik dari Al Qaeda maupun dari Iran dan kubunya. Hubungan AS-Iran sudah lama sensitif, bukan hanya karena riwayat permusuhan panjang dan isu nuklir Iran, tetapi juga atas tuduhan keterlibatan Iran di Irak dan Lebanon. Pemerintahan Presiden George Bush mulai memperlihatkan sikap ofensif dan lebih agresif dengan meningkatkan kehadiran pasukan militer di Teluk Persia. Pada lapisan yang lebih dalam, mulai muncul kekhawatiran tentang kemungkinan pecahnya perang terbuka bila salah satu diantaranya mengambil langkah yang salah. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad tidak gentar terhadap tekanan dan intimidasi AS, tetapi justru memperlihatkan sikap menantang dengan menegaskan siap berkonfrontasi. Pemerintah Iran mengancam untuk menggunakan ekspor minyak sebagai "senjata untuk bertahan" dalam menghadapi tekanan internasional terhadap program nuklir mereka.

Amerika punya kepentingan besar untuk menaklukkan Iran. Maka jalur-jalur penting perdagangan minyak di wilayah Teluk dikuasai. Sejak Roosevelt hingga Bush Junior memimpin AS, diikuti doktrin untuk mengamankan pasokan minyak dari Teluk Persia dengan cara apa saja. Doktrin ini mengkristal semasa Jimmy Carter, yang dihadapan Kongres AS mengatakan, Washington akan menggunakan cara apa pun, termasuk kekuatan militer, untuk memperoleh aliran minyak. Dengan cadangan 65 persen minyak dunia, kawasan Teluk Persia menjadi incaran semua negara.

Selain untuk mengamankan pasokan minyak, nuklir Iran juga mengancam eksistensi Israel yang merupakan sekutu dekat AS di Timur Tengah. AS tentu akan melindungi Israel jika Iran mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudalnya. Israel menyebut kombinasi Shahab-3 dan senjata nuklir bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah. Israel merasa cemas dengan kemampuan Iran menyerang mereka.(Romli, 2000:51). Pemerintahan Israel sudah mengungkapkan persoalan ini kepada beberapa negara Amerika dan Eropa. Israel adalah negara yang paling takut jika Iran memperoleh senjata nuklir. Sebab Iran berulang kali mengancam akan menyerang Israel jika negara-negara Barat khususnya AS, berencana melakukan serangan militer terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran.

Israel merupakan partner regional yang dapat diandalkan untuk menjamin kepentingan AS di Timur Tengah. Selama ini, Israel begitu keras dalam mengecam dan ikut melarang Iran untuk melamjutkan proyek nuklirnya. Bersama AS, Israel tak henti-hentinya untuk menyeret Iran ke Meja Sidang Dewan Keamanan PBB. Israel mendesak, agar Dewan Keamanan dan sejumlah negara lainnya, segera mengecam dan mengutuk kelangsungan program nuklir Iran. Termasuk menjatuhkan sanksi militer, dan embargo besar-besaran dalam sejumlah bidang.

Eksistensi Israel memiliki arti penting bagi AS, dilihat dari beberapa faktor: dalam bidang ideologi, menyebarkan sistem demokratisasi di kawasan Timur Tengah. Dalam bidang politik, yaitu untuk membangun Amerika Serikat sebagai negara yang kuat, oleh karena itu Presiden Bush tidak suka jika ada kekuatan lain yang melebihi AS. Untuk mewujudkannya Presiden Bush mencari sekutu yang tepat yaitu Israel. Kemudian dalam bidang ekonomi, pengalaman pernah di embargo Arab Saudi menjadikan AS harus mencari sumber minyak di negara Timur Tengah yang lain. Amerika Serikat juga membutuhkan Timur Tengah sebagai tempat menjual barang-barang produksinya. Hal ini dilakukan Presiden Bush untuk meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*) negaranya. Kemudian dalam bidang pertahanan, masa pemerintahan Presiden Bush ditandai dengan perang. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keadidayaan negaranya dan uji coba senjata. Di mana keberadaan Israel merupakan partner dan perpanjangan tangan AS agar kepentingannya dapat terwujud.

Iran melalui Presiden Mahmoud Ahmadinejad menentang keras tuduhan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa, nuklir Iran ditujukan untuk membuat senjata nuklir dan untuk menghadapi

perang di masa datang dengan musuh-musuhnya. Presiden Mahmoud Ahmadinejad menjelaskan bahwa nuklir Iran semata-mata diciptakan untuk mendukung proses percepatan pembangunan dan kemajuan bangsa Iran sendiri. "Nuklir kami bukan untuk perang, melainkan untuk pembangunan dan kemajuan rakyat Iran," demikian ungkap Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam meyakinkan publik dunia. Presiden Ahmadinejad jelas semakin marah melihat Amerika Serikat, melarang Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Apalagi saat Presiden George Walker Bush justru mendukung dan menopang program pengembangan nuklir oleh Israel. (Simanjuntak, 20) Di mata Presiden Mahmoud Ahmadinejad, ini adalah standar politik ganda internasional yang jelas-jelas tidak mencerminkan keadilan.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomenei mengatakan bahwa cadangan minyak negara itu akan kering pada saatnya nanti. Sehingga Iran harus mempertahankan dorongan untuk membuat bahan bakar nuklir sebagai satu-satunnya cara menghindarkan ketergantungan energi pada Barat. "Minyak dan gas tidak akan ada untuk selamanya. Jika sebuah negara tidak memikirkan untuk membuat energi yang dibutuhkan di masa datang, negara itu akan tergantung pada dominasi para pencari kekuasaan," ujar Khomenei.

Khomenei mengungkapkan, mereka yang mengatakan Iran tidak membutuhkan teknologi nuklir adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Iran memang telah berulang kali menjelaskan, mereka membutuhkan energi alternatif selain minyak dan gas. Oleh karena itu, mereka tidak melihat alasan mengapa teknologi paling maju di bidang energi tidak boleh mereka gunakan.

Ayatollah Ali Khamenei berikrar, Iran harus meneruskan program nuklirnya. "Ancaman-ancaman tidak akan dapat memaksa rakyat Iran," ujarnya. Khamenei juga mengatakan, ancaman yang paling membahayakan justru adalah kekuatan yang arogan, yaitu negara-negara Barat. Khamenei mengatakan, bangsa Iran tidak akan membiarkan kekuatan arogan itu mendikte negaranya. Pernyataan Khamenei tersebut menunjukkan, bahwa Iran tidak pernah takut terhadap segala bentuk ancaman dan intimidasi yang dilakukan negara-negara Barat agar Iran segera menghentikan program nuklirnya.

Presiden Ahmadinejad berulangkali mengatakan akan mempertahankan program nuklir Iran dengan segala cara. Akses IAEA untuk menginspeksi reaktor nuklir Iran juga sudah di tutup. Hal ini akan memperbesar kecurigaan dunia internasional, terutama AS bahwa Iran mempunyai agenda lain dibalik program pengayaan

uranium. Bahkan, bukan tidak mungkin Iran akan nekat memblokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama transportasi minyak dari Teluk ke seluruh dunia. Bila ini terjadi, AS akan marah karena proyek minyaknya terganggu. AS bisa saja menempuh cara berperang seperti saat menyerang Irak meski tidak ada "restu" PBB.

Sejak berakhirnya Perang Teluk II tahun 1991 dengan segala dampaknya, peta kekuatan dan sistem keamanan di kawasan Teluk sudah berubah total. Pra Perang Teluk II, ada tiga kekuatan yang secara tradisional mendominasi kawasan Teluk Arab, yaitu Iran, Irak dan Arab Saudi. Paska Perang Teluk II, konfigurasi kekuatan yang dominan itu berubah secara mendasar dengan masuknya kekuatan militer AS. Kekuatan Irak praktis sudah lumpuh, dan Iran sama sekali tidak mampu bersaing dengan kekuatan AS, sedang kekuatan Saudi di bawah kontrol penuh AS. (Rahman, 2003:49)

Akan tetapi sejak tahun 1997 dengan tampilnya Khatami dari kubu reformis sebagai Presiden Iran, kebijakan politik luar negeri Iran mulai berubah. Khatami konsisten menerapkan kebijakan peredaan ketegangan dan mengutamakan kerjasama atas hubungan konflik. Pada gilirannya Iran berupaya membatasi peran AS dengan cara memperkuat hubungan Iran-Arab Saudi yang ditandai oleh kesepakatan keamanan dua negara itu tahun 2002. Iran sangat menginginkan memperkuat keberadaan dan pengaruhnya di kawasan Teluk dengan cara menghilangkan faktor yang membawa ketegangan dengan Irak, memperkuat hubungan dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC/*Gulf Cooperation Council)* dan mengurangi pengaruh AS. (Ibid.50)

Saat Presiden Ahmadinejad berhasil membawa Iran kepada program pengembangan nuklirnya, Presiden Bush kian bertambah cemas. Ahmadinejad mengira bahwa, Bush sangat tidak ingin bila Iran mulai belajar banyak tentang nuklir. Karena dengan demikian, Iran mulai dapat belajar menjadi bangsa yang mandiri, sekaligus disegani dunia. Jika itu memang terjadi, bukan tidak mungkin kedigdayaan AS akan benar-benar terancam. Apalagi pada satu kesempatan Presiden Ahmadinejad pernah berkata, kalau Iran akan "menguasai" dunia melalui kemajuan teknologi nuklirnya. (simanjuntak, 48). Program nuklir Iran dianggap mampu menjaga keamanan nasionalnya karena keamanan nasional merupakan bagian dari kepentingan nasional yang tak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan upaya mempertahankan keamanan nasional.

IAEA memperkirakan, dalam empat sampai enam tahun ke depan Iran sudah mampu membuat bom nuklir. Di jelaskan, Iran telah mempunyai akses atas berbagai bahan yang diperlukannya secara ilegal pada masa lalu, dan menyembunyikan eksperimen-eksperimen nuklir mereka. Demikian disampaikan juru bicara IAEA, Melissa Fleming. Fleming juga menambahkan, Iran mempunyai hak untuk menjalankan fasilitas-fasilitas nuklir sepanjang itu dilakukan secara transparan dan legal.

Tepat pada Hari Nasional Energi Nuklir Iran yahun 2007, Presiden Ahmadinejad kembali mengumumkan keberhasilan Iran memproduksi bahan bakar nuklir pada skala industri. Tidak kurang 1000 mesin pemutar baru dioperasikan. Media Barat meragukan kemampuan Iran mengoperasikan mesin pemutar baru sebanyak itu. Pakar di International Institute for Strategic Studies London, Mark Fitzpatrick, menyatakan bahwa Iran masih kesulitan mengoperasikan 164 mesin pemutar, sehingga tidak mungkin mengoperasikan di atas itu. Tapi, pada 18 April 2007, Olli Heinonen, Wakil Direktur Jenderal dan Inspektur Utama IAEA, memberikan konfirmasi kemajuan pesat Iran dalam program nuklir. (Khazim & Hamzah, 164)

Bagi kalangan neokonservatif Amerika, sepanjang Iran masih merupakan Republik Islam, maka Iran akan berambisi memiliki senjata nuklir. Sebelum ambisi itu terwujud, Amerika dan sekutunya akan memaksa Iran memenuhi tuntutan penghentian program nuklir. Kritik Gedung Putih terhadap program nuklir Iran terjadi seiring dengan peningkatan perencanaan dan kegitan mata-mata Amerika di sekitar Teluk Persia.

Dalam satu kutipan, Presiden Bush giat menggalang dukungan dari negara-negara seperti Jerman, Peransis dan Inggris, untuk melayangkan peringatan keras kepada Presiden Ahmadinejad. Menjelaskan bahwa, seluruh publik dunia sepakat untuk melarang Presiden Ahmadinejad (Iran) melakukan pengayaan uranium. Sekalipun Presiden Ahmadinejad beralasan demi kepentingan pembangunan dan kemajuan bangsa Iran, namun di mata Presiden Bush dan sekutunya bukan tidak mungkin jika sewaktu-waktu Iran mengubahnya menjadi basis pengembangan senjata nuklir, yang jelas-jelas dapat mengusik keamanan, perdamaian, serta keselamatan dunia.

Nuklir masih tetap merupakan suatu opsi terbuka, baik karena pertimbangan ekonomi maupun politik. Nuklir seringkali merupakan suatu pilihan yang lebih murah dibanding dengan penggelaran senjata konvensional. Meningkatnya kecanggihan

senjata akan menjadikan perang di masa yang akan datang lebih intens.(Anggoro, 1996:81) Hal tersebut tentu saja dapat mengancam perdamaian dunia.

Alasan AS Ingin Menghentikan Pengembangan Program Nuklir Iran

Peta kekuatan di Timur Tengah sekarang ini sudah berubah dengan tampilnyakekuatan nuklir Iran. Sejak tergulingnya Reza Pahlevi oleh kekuatan revolusioner pimpinan Imam Khomeini, Iran terus berupaya menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Itulah, sebabnya Iran konsisten memberikan dukungan dan bantuan kepada Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon, serta menunjukkan solidaritas yang kuat dengan seluruh unsur kekuatan Syi'ah di Irak yang kini berkuasa. Selain itu, Iran pun tampil lebih perkasa sebagai negara di Timur Tengah yang melakukan program pemgembangan teknologi nuklir.

Mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, pernah mengatakan di Gedung Putih pada bulan September tahun 1997, bahwa sebuah penyelidikan gabungan yang dilakukan AS dan Israel menunjukkan adanya usaha keras pihak Iran untuk memperoleh teknologi senjata nuklir dan rudal balistik. Namun, Iran menyangkal tuduhan itu. menurut laporan rahasia yang di buat Mossad, Rusia diduga telah mengalihkan sebagian rudal nuklirnya ke Iran. Selain itu, Rusia juga giat membantu Iran membangun instalasi tenaga nuklir di Bushehr. (Shoelhi, 160)

Dalam pidato kenegaraan pada Januari 2002, Presiden George Bush menegaskan, AS menganggap program nuklir Iran suatu bahaya yang tidak dapat diterima. Sejak itu, media massa AS mengutip pejabat *Central Intelligence Agency* (CIA) mengatakan, program nuklir Iran lebih besar dari yang diperkirakan semula. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Richard Boucher mengatakan, AS sangat cemas atas usaha intensif Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Boucher menyatakan, mendukung IAEA melakukan pemeriksaan total atas aktivitas program nuklir Iran.

Pemerintah Iran secara resmi membantah telah membangun laboraturium untuk pengelolaan uranium dan air. Namun, oposisi Iran mengungkapkan tentang adanya proyek tersebut. Pemerintah AS melihat bahwa laboraturium bisa digunakan untuk memproduksi uranium skala tinggi yang layak untuk membuat senjata nuklir. Sementara leboraturium pengelolaan air bisa membantu aktivitas reaktor memproduksi plutonium yang bisa pula membuat senjata.

CIA dan Mossad menuduh Iran membangun reaktor nuklir berskala kecil dengan kekuatan masing-masing 10 hingga 30 megawatt. Sementara setiap reaktor nuklir tersebut, yang bekerja dengan uranium dan air, bisa mampu memproduksi 2,5 sampai 3 kilogram plutonium setiap tahunnya. Dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun, reaktor nuklir dengan kapasitas semacam itu diperkirakan bisa memproduksi sebuah senjata atom. Latar belakang itulah menurut CIA dan Mossad dibalik Iran terus berupaya mendekati Cina, Pakistan, dan negara Asia Tengah dalam upaya membangun laboraturium nuklir berskala kecil untuk kebutuhan riset ilmiah.(Grogary, 2007:246-9)

Selama ini kecemasan AS atas program nuklir Iran terfokus pada empat isu. *Pertama*, pusat-pusat riset dan reaktor nuklir yang sedang dalam pembangunan. *Kedua,* rencana Iran membangun program pengelolaan uranium dan terminal penyimpanan bahan plutonium. *Ketiga,* upaya sejumlah agen Iran membeli bahan yang bisa digunakan untuk tujuan ganda, yakni sipil dan militer. *Keempat,* program pengembangan rudal darat ke darat yang membawa kepala nuklir. Sementara kekhawatiran secara geografis ialah bahwa Iran dinilai berada di posisi sangat strategis. Iran berada di pertemuan antara Asia, Timur Tengah, Asia Tengah, dan kawasan teluk kaya minyak. (Rahman, 201)

Upaya Iran untuk terciptanya rezim demokratis tentang isu nuklir mendapat tekanan yang sangat serius dari AS, Inggris dan Perancis, yang kemudian memobilisasi komunitas internasional untuk menolak kehadirannya. Sehingga AS dan sekutunya mendesak DK PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran. (Ibid, 206) IAEA merilis laporan akhirnya pada 22 Februari 2007. Dalam laporannya , IAEA yang beranggotakan perwakilan dari 35 negara menyatakan, Pemerintah Iran terbukti gagal menutup proyek pengayaan uranium di Natanz dan Bushehr paling lambat 21 Februari lalu. IAEA juga mengungkapkan, Iran terbukti menambah 164 mesin pemutar (sentrifugal) uranium baru.

Upaya Diplomasi AS Menghentikan Program Nuklir Iran

Jalur perundingan mulai di buka, sejumlah basis kekuatan negara-negara Eropa-Perancis, Inggris, dan Jerman mulai menawarkan beberapa opsi perundingan damai. Pada 14 Mei 2006, Presiden Ahmadinejad menjawab tawaran tersebut, dengan pernyataan bahwa Ahmadinejad tidak akan menerima tawaran apapun yang intinya meminta Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Presiden Ahmadinejad tetap berkeras tidak akan

menghentikan program nuklirnya. Meski demikian, ketiga negara Eropa tersebut masih tetap berusaha memakai cara lain, dalam membujuk Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

Pada penghujung bulan Mei 2006 *Group of Six* (5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa plus Jerman) melakukan pertemuan di Vienna untuk membahas tentang upaya mengatasi masalah nuklir Iran. Sebelumnya kelompok negara-negara tersebut telah berupaya untuk mendapatkan satu kesatuan posisi dalam menghadapi Iran, tetapi selalu gagal karena adanya perbedaan pendapat antara negara-negara anggota pemegang hak veto di PBB, terutama Rusia dan Cina. Namun dalam pertemuan di Vienna, setelah sebelumnya pemerintahan Presiden Bush di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice, melakukan kampanye diplomatik untuk mendapatkan kesatuan pendapat dari kelompok negara-negara tersebut, terutama mengenai wacana IAEA berpendapat, bahwa Iran pada dasarnya telah melanggar kesepakatan internasional mengenai pengayaan uranium sehingga layak diberi sanksi melalui DK PBB. Namun, Cina dan Rusia cenderung menolak upaya pengenaan sanksi tersebut. (Ruru, 2006)

Dalam pertemuan di Vienna, *Group of Six* berhasil menelurkan suatu paket kebijakan berkaitan dengan upaya merangkul Iran agar mau mengubah kebijakan pengayaan uraniumnya di bawah pengawasan IAEA. Sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Paket kebijakan yang dihasilkan di Vienna, terutama yang diusulkan AS merupakan terobosan baru, bukan saja dilihat dari isi usul AS, melainkan dilihat dari dua hal, yaitu kesediaan AS untuk duduk dalam satu meja perundingan (bersama dengan kelompok 6 dengan Iran), dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya penyelesaian masalah nuklir Iran oleh AS melalui upaya multilateral. (Ibid.)

Pada tanggal 6 Juni 2006, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana menyampaikan proposal paket insentif yang dibuat Amerika, Cina, Inggris, Jerman, Perancis dan Uni Eropa. Tawaran yang disebut "wortel dan tongkat" itu guna membujuk Iran menghentikan kegiatan program nuklirnya. Paket insentif tersebut mencakup:

1. Iran boleh membeli suku cadang pesawat sipil buatan AS dan Eropa.
2. Penghapusan sanksi perdagangan dengan mengizinkan Iran membeli teknologi pertanian buatan AS.
3. Iran boleh membangun reaktor nuklir air ringan dan bahan bakar nuklir.

4. Dukungan bagi keanggotaan Iran di WTO (*World Trade Organization)*
5. Iran boleh melakukan pengayaan uranium.
6. Bantuan program energi nuklir untuk kepentingan sipil. (*Tempo*, 8 Juni 2006)

Iran merespon baik paket insentif itu. "Hanya, kami perlu mempelajari proposal itu lebih dulu," kata Ali Larijani, Ketua tim runding nuklir Iran."Baru kami berikan jawaban. Masih banyak hal yang perlu diklarifikasi dan diperjelas karena ada yang mengandung makna ganda," ujarnya. Iran tentunya ingin hak-haknya sebagai bangsa dihargai sebelum memberikan jawaban atas tawaran paket insentif dari *Group of Six* tersebut.

Presiden Bush menilai jawaban Larijani itu sebagai langkah yang positif. "Kami menunggu kalau mereka menerima tawaran kami secara serius,"katanya. Tapi, "pilihan ada di tangan mereka. Saya ingin menyelesaikan masalah nuklir Iran lewat jalur diplomatik," ujarnya. Sebelumnya, AS memperingatkan Iran: penolakan proposal berarti hukuman dari PBB. Washington ingin Iran menjawab tawaran Barat dalam beberapa minggu kedepan. Tapi pejabat Gedung Putih meragukan respon Iran datang hanya dalam hitungan minggu.

IAEA juga berulang kali menekan Teheran untuk menjelaskan tentang tudingan intelijen Barat yang menginformasikan tentang program pembuatan senjata nuklir dan mendesak Teheran agar bersedia bekerjasama secara transparan dengan para penyelidik. Sebelumnya pada November 2003, Iran mengijinkan IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir mereka di Isfahan dan Natanz. IAEA mengatakan tidak ada bukti soal program senjata nuklir. Iran pun sempat menghentikan program pengayaan uranium sebagai hasil kesepakatan dengan Uni Eropa (UE-3). Namun, pada Agustus tahun 2005 Iran memulai kembali kegiatan di pembangkit nuklir Isfahan. IAEA pun menyerukan kepada Iran untuk menghentikan semua program nuklirnya dan mengancam akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.(Hamid Baedi-Nejad, 2005:64)

Uni Eropa (UE) pun mengancam akan melakukan pengetatan sanksi jika Iran tidak merespon paket insentif yang ditawarkan UE terkait penutupan proyek nuklir Iran. Sejumlah sanksi baru UE itu termasuk pembekuan aset di bank terbesar Iran Bank Melli dan larangan visa bagi sejumlah pejabat senior di Pemerintahan Iran. Teheran menganggap pemberlakuan sanksi baru

UE, akan merusak upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. (Jacobson, 2005:69)

Iran juga mendapat ancaman kekerasan jika mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan *Group of Six* dalam menyelesaikan masalah program nuklirnya. Dalam bidang ekonomi, seperti ancaman yang dilakukan UE yang akan membekukan aset di Bank Melli. Kemudian dalam bidang politik, larangan pemberian visa bagi sejumlah pejabat senior Pemerintahan Iran. Kemudian dalam bidang militer, seperti ancaman serangan udara yang akan dilakukan AS terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Namun, Teheran menganggap serangan udara ke fasilitas-fasilitas nuklir mereka hanyalah "operasi psikologis". Jika AS benar-benar melakukan serangan udara, hal tersebut hanya akan menambah keras sikap Iran dalam perselisihan dengan Barat mengenai program nuklirnya. Satu serangan militer akan menyulut diluncurkannya program darurat Iran untuk membuat senjata nuklir dengan dukungan seluruh rakyat Iran, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

Iran berkomitmen bahwa masalah nuklir Iran dapat diperundingkan dengan jalan diplomasi. Perundingan tentang nuklir, bagi Presiden Mahmoud Ahmadinejad sebenarnya dapat didialogan dengan tiga negara Eropa Jerman, Inggris, dan Perancis secara maksimal dan transparan. Apalagi Rusia menawarkan diri kepada Iran untuk melakukan pengayaan uranium. (Milani, 2005:330).Meskipun demikian, sepertinya upaya perdamaian belum juga menemukan titik cerah, apalagi diperuncing oleh pernyataan-pernyataan Presiden George Bush yang sangat politis dan ambisius.

Hasil Implementasi Diplomasi AS

Presiden Mahmoud Ahmadinejad, bersumpah tidak akan mundur sejengkal pun menghadapi intimidasi dari pihak manapun untuk menghentikan program nuklir negaranya. Pernyataan Ahmadinejad ini disampaikan setelah lewat sehari batas waktu yang ditetapkan PBB mengenai penghentian operasi nuklir Iran. DK PBB menuntut Iran menghentikan aktivitas nuklir pada 31 Agustus 2006, dengan ancaman sanksi. Hal tersebut semakin menegaskan, bahwa Pemerintah Iran akan tetap melanjutkan program nuklirnya walaupun harus menerima sanksi dari DK PBB. Iran tampaknya telah siap menerima segala risiko yang akan diterima karena menolak menghentikan aktivitas nuklirnya.

Pemerintah Iran tampaknya juga telah siap menghadapi Sidang Dewan Keamanan PBB yang akan membahas program

nuklirnya. Iran terancam terkena sanksi karena tidak mengidahkan peringatan DK PBB untuk menghentikan program uraniumnya. DK PBB berkomitmen untuk memberi paket insentif jika Iran mau menghentikan program nuklirnya. (Zimme, 2008:9)

Juru Bicara Pemerintah Iran Gholam Hossein Elham mengatakan, Teheran menunggu reaksi logis dan adil dari negara-negara sponsor paket insentif yang ditawarkan. Namun jika tidak, Iran siap menghadapi situasi apapun dan akan bereaksi seperlunya. Pernyataan tersebut menunjukkan Iran siap melakukan aksi balasan jika paket insentif yang ditawarkan mengabaikan hak-hak Iran. Iran dapat saja menarik aset-asetnya dari negara-negara Barat dan mengalihkannya ke negara lain, yang tentu saja dapat berdampak pada ekonomi dunia.

Iran pun tidak mengindahkan seruan DK PBB untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya. Sebelumya pada November 2006, laporan rahasia IAEA menyatakan Iran tetap melakukan pengayaan uranium dan menghentikan investigasi meski berhadapan dengan risiko sanksi. Iran memulai eksperimen kedua atas 164 sentrifugal, mengasupi gas uranium untuk diperkaya. Berdasarkan laporan IAEA, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2006 DK PBB menjatuhkan sanksi kepada Iran melalui Resolusi DK PBB Nomor 1737 yaitu,

1. Memerintahkan seluruh bangsa menghentikan pemasokan bahan dan teknologi yang dapat berkontribusi pada program nuklir Iran.
2. Bila dalam 60 hari IAEA yang berwenang mengawasi program nuklir Iran, menyatakan Iran masih terus menjalankan program yang dilarang tersebut, DK PBB akan bersidang untuk menjatuhkan sanksi baru. Iran pun menyebut resolusi tersebut sebagai ilegal.

Batas waktu 60 hari yang diberikan DK PBB bersamaan dengan penjatuhan sanksi terhadap Iran jatuh pada 21 Februari 2007. Beberapa jam sebelum batas akhir untuk menghentikan program pengayaan uranium yang ditetapkan DK PBB terlewati Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki mengajak AS untuk menyelesaikan pertikaian melalui dialog. Mottaki menegaskan, dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan pertikaian. Namun, Iran tetap siap menghadapi kemungkinan serangan AS. Mottaki mengatakan AS memiliki dua opsi, pertama menggunakan kekerasan, kedua kerjasama. Iran siap menghadapi keduanya dan tentu saja akan lebih senang penyelesaian melalui kerjasama.

Dari Washington dilaporkan, juru bicara Gedung Putih Tony Snow, meragukan niat Iran dengan mengatakan, "Apakah Anda percaya bahwa itu tawaran yang serius?". Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice membuat pernyataan lebih lunak. Rice mengatakan, para diplomat AS, Rusia, dan Eropa punya keinginan yang sama, yakni mendorong Iran agar kembali ke meja perundingan. "Kami menegaskan lagi bahwa kami akan menggunakan saluran yang ada dan DK untuk mencapai tujuan," ujar Rice. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian masalah nuklir Iran masih ingin menggunakan jalur perundingan untuk segera mencari jalan terbaik mengatasi masalah tersebut.

Saat batas waktu yang ditentukan berakhir, Iran melalui Presiden Ahmadinejad mengatakan "kami terus melanjutkan pembangunan nuklir yang memang menjadi hak Teheran. Keberhasilan dalam pengembangan teknologi ini sangat penting untuk pembangunan di Iran. Lebih baik jika kami menghentikan semua aktivitas selain proyek nuklir selama 10 tahun daripada menutup teknologi yang menjadi kebanggaan rakyat,"ujar Presiden Ahmadinejad. Menurut laporan BBC, partai reformis radikal Islamic Revolutionary Mujahidin Organization sempat mengkritik kebijakan Presiden Ahmadinejad tersebut, secara resmi partai ini mendesak Pemerintah Iran mematuhi perintah PBB. Mereka menilai proyek nuklir Teheran akan mengancam stabilitas dalam negeri serta menghancurkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah pertama kalinya partai di Iran "berani" menentang keputusan Presiden Ahmadinejad.

Sementara itu, IAEA segera merilis laporan akhir terkait proyek nuklir, di Teheran. Direktur Jenderal IAEA Mohammed El Baradei mengatakan, laporan tersebut diantaranya menjelaskan sikap penolakan Iran terhadap sanksi DK PBB. Laporan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan sebagai landasan dasar DK PBB dalam mengambil keputusan lebih lanjut. "Sikap Iran sudah jelas. Mereka menolak untuk mematuhi sanksi DK PBB," tegas El Baradei.

Setelah perundingan alot selama 10 hari, enam negara besar akhirnya menyepakati draf resolusi berisi sanksi baru bagi Iran karena negara ini tetap menolak menghentikan program pengayaan nuklirnya. Draf sanksi baru yang disepakati pada 15 Maret 2007 kemudian diajukan kepada 10 negara anggota tidak tetap DK PBB untuk pemungutan suara pekan depan. Sanksi baru itu merupakan penambahan atas sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya pada Desember tahun lalu. Meskipun tidak menginginkan sanksi yang keras, Moskow dan Beijing menyepakati sanksi baru itu. (Luzyanin,

2007) Namun, utusan Cina Wang Guangya, mengatakan anggota DK PBB masih bisa mengubah isi draf tersebut.

Rusia dan Cina merupakan negara anggota tetap DK PBB dan juga merupakan teman dekat Iran. AS dan Eropa tentunya membutuhkan dukungan Rusia dan Cina untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran. Selama ini Rusia dan Cina banyak membantu Iran dalam membangun fasilitas-fasilitas nuklirnya dan sistem pertahanan Iran. Rusia dan Cina tentunya tidak ingin Iran mendapat sanksi yang lebih keras dari DK PBB, sebab dapat mengancam sejumlah investasi yang mereka tanam di Iran.

AS dan Eropa, yang sebenarnya menginginkan sanksi keras bagi Iran, akhirnya menyetujui paket sanksi lebih lunak guna meraih dukungan Cina dan Rusia. Utusan AS Alejandro Wolff menambahkan, sanksi yang diperlunak dimaksudkan untuk menjaga kesatuan dukungan di DK PBB atas sanksi baru. AS dan Eropa tentunya tidak ingin melihat anggota dewan terpecah dalam penyusunan sanksi baru bagi Iran. Draf resolusi tersebut menekankan kesediaan komunitas internasional untuk bekerja secara positif demi solusi diplomatik.

Akhirnya pada 25 Maret 2007, seluruh 15 anggota DK PBB menyetujui sanksi baru bagi Iran karena menolak penghentian aktivitas pengayaan uranium sesuai dengan Resolusi Nomor 1737 DK PBB, yang dikeluarkan pada 23 Desember 2006. setelah berdiskusi alot selama tiga minggu, lima anggota tetap DK PBB-AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan Cina menjatuhkan sanksi tambahan berupa:

1. Pemblokiran seluruh ekspor senjata dari dan ke Iran.
2. Membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran, termasuk Bank Sepah Internasional dan tiga perusahaan yang terkait Garda Revolusi.
3. Melarang semua negara dan lembaga keuangan Internasional membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan dan pinjaman keuangan kepada Iran.
4. Pencekalan terhadap beberapa pejabat Iran dan anggota Garda Revolusi ke luar negeri.
5. Resolusi ini memberi tenggat 60 hari bagi Iran untuk memenuhi permintaan DK PBB atau akan mendapatkan sanksi lebih jauh. (Al Hadar, 29 Maret 2007)

Malaysia yang saat ini menjadi Ketua OKI meminta Iran tidak mengabaikan sanksi-sanksi baru dari DK PBB. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berharap, Iran

mempertimbangkan implikasi-implikasi dari sanksi yang dikenakan itu. Kementerian Luar Negeri Rusia, meminta masyarakat internasional tidak mengambil risiko dengan meningkatkan ketegangan di sekitar Iran dan menunggu AS melakukan upaya-upaya yang didasari itikad baik untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran.

Selain upaya dari *Group of Six*, Indonesia sebagai salah satu negara anggota tidak tetap DK PBB selain Qatar dan Afrika Selatan semula menolak resolusi itu karena pembangunan energi nuklir Iran untuk tujuan damai. Hingga menit-menit terakhir menjelang *voting*, berlangsung negosiasi intensif dengan Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar. Ketiga negara itu ingin ada pernyataan tentang zona bebas nuklir Timur Tengah dalam mukadimah resolusi. Namun, aspirasi ketiga negara itu kalah dengan kepentingan negara-negara besar, terutama AS. Dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran Pemerintah Indonesia tetap memilih jalan diplomasi dan negosiasi. "Apa pun penyelesaiannya tentu saja harus melalui diplomasi dan negosiasi. Itu satu hal yang prinsip," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Desra Percaya.

Uni Eropa pun menawarkan jalan perundingan. Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana segera menawarkan jalan perundingan kepada Iran. (Gogary, 216) "Pintu perundingan telah di buka. Saya berharap kami dapat bersama-sama menemukan cara pemecahannya,"katanya. Solana mengatakan negara-negara yang terlibat dalam masalah ini telah menugasinya melanjutkan kontak dengan juru runding Iran, Ali Larijani. "Untuk melihat apakah kami dapat duduk bersama-sama. Kami ingin melihat keberhasilan Iran sepenuhnya terintegrasi dengan komunitas internasional. Secara khusus Uni Eropa menginginkan hubungan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Iran. Ini adalah negeri yang berpotensi besar dan kami adalah mitranya, "kata Solana.

Pernyataan Ketua Kebijakan Luar Negeri UE Javier Solana menunjukkan, bahwa Iran adalah negara yang penting untuk dijadikan mitra oleh UE. Iran memiliki sumber daya alam gas dan minyak yang membuat banyak negara tertarik untuk membelinya. Iran memiliki beberapa mitra dagang utama di Eropa seperti Jerman, Italia, Perancis dan Austria.

Kurangnya kerjasama yang komprehensif dan transparan dengan IAEA, yang menyatakan bahwa Iran telah gagal memenuhi kewajibannya dalam *Safeguard Agreement,* yaitu mekanisme IAEA untuk memastikan bahwa bahan nuklir tidak akan dialihkan kepenggunaan untuk membuat senjata nuklir. Hal tersebut juga

bersamaan dengan pelanggaran perjanjian Iran dengan Uni Eropa yang mengakibatkan kegagalan perundingan, seolah menunjukkan bahwa hasrat untuk memiliki teknologi nuklir guna kepentingan damai hanyalah kedok bagi kepentingan untuk memiliki senjata nuklir. Iran ingin agar dunia percaya, bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk membuat senjata nuklir. Aktivitas Iran dalam program pengayaan uranium yang memungkinkan dirinya memperoleh senjata nuklir diperparah dengan interaksi masalah ini dengan upaya yang sedang berjalan untuk mencegah proliferasi di kawasan Timur Tengah. Israel telah memiliki senjata nuklir, dan Suriah kemungkinan memiliki program senjata kimia.

Senjata nuklir ditakuti sekaligus digemari karena dayanya yang dapat menimbulkan *mass destruction* (kerusakan masal). Daya ledak senjata nuklir dan jangkauannya sangat luas. Jepang pada Perang Dunia II menyerah kalah kepada sekutu karena di bom atom oleh AS yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Memperkuat kemampuan militer dengan mengembangkan atau menguasai senjata nuklir, tampaknya menjadi trend abad ini. (Romli, 54)

Teheran menegaskan tidak akan berunding dengan negara-negara Barat mengenai program nuklirnya jika ada syarat penghentian pengayaan uraniumnya. Hal tersebut tentunya akan mempertegas sikap negara-negara Barat yang terlibat dalam perundingan program nuklir Iran untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut kepada Iran. Teheran hingga saat ini juga tetap mengabaikan sanksi-sanksi yang di jatuhkan DK PBB. (Digli, 2008:89)

Persenjataan nuklir sendiri memperlihatkan dimensi paradoksal dari kemampuan manusia, disatu sisi persenjataan nuklir memperlihatkan kehebatan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di pihak lain pencapaian tersebut justru mencelakakan peradaban umat manusia. Eskalasi nuklir Iran sendiri semakin sensitif sebagai komplikasi atas terpilihya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden. (Ar-Rusydi, 2006:20)

Dalam setiap pertikaian internasional, negara-negara yang terlibat hanya dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama,* memilih jalan diplomasi dn negosiasi atau jalan politik untuk memecahkan sengketa yang terjadi. *Kedua,* memilih jalan kekerasan atau jalan militer yang menuntut korban personil dan materiil. Akan tetapi kedua jalan itu berakhir pada ujung yang sama, yakni pada meja perundingan.

Diplomasi atau negosiasi dapat berjalan bertele-tele dan memerlukan energi dan waktu lama, tetapi akhirnya penyelesaian terakhir berada di meja perundingan juga. Demikian pula bila perang atau konfrontasi militer diambil sebagai solusi atas sengketa imternasional. Setelah dua negara atau lebih bertarung di medan pertempuran, para wakil dari masing-masing negara yang bersengketa akhirnya juga menuju meja perundingan perdamaian.. (Rais, 1990:131)

Militer AS bersikeras bahwa Iran akan mampu memproduksi persenjataan nuklir dalam lima hingga delapan tahun kedepan. Menurut laporan *The Washington Post*, dalam rentang inilah pemerintahan Bush mempunyai waktu untuk memutuskan melancarkan serangan udara terhadap instalasi nuklir Iran. Namun, menurut beberapa sumber di Departemen Pertahanan AS, rentang waktu ini dinilai terlalu lama dan terlalu meremehkan Iran. Mereka beranggapan bahwa Iran mampu mengembangkan teknologi nuklirnya lebih cepat daripada yang diperkirakan.

"Pemerintah AS bersikap sangat jelas mengenai pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan Iran. Presiden Bush dan Departemen Luar Negeri sedang melakukan kerjasama dengan komunitas internasional, termasuk IAEA dan PBB untuk menyelesaikan masalah Iran ini melalui jalur diplomatik,"kata petinggi Angkatan Udara AS Mayor Patrick Ryder. Serangan udara merupakan rencana jangka panjang AS terhadap Iran. untuk rencana jangka pendek, AS akan berusaha keras untuk menjatuhkan sanksi bagi Iran melalui DK PBB.

Amerika berani bersikap arogan karena saat ini tidak ada lagi kekuatan adidaya yang bisa mengancam atau menghalangi sepak terjangnya yang tidak mengidahkan tata karma politik yang sebelumnya diagung-agungkan oleh Amerika dan sekutunya. Keruntuhan gedung WTC adalah momentum bagi Amerika untuk bisa melihat dengan jelas negara mana yang mendukung Amerika secara terang-terangan dan negara mana yang tidak mendukungnya. Sejak itulah Amerika menginginkan seluruh negara yang ada di dunia menyatakan sikapnya secara terang-terangan agar memudahkan sterategi politik internasional Amerika. Sebuah majalah Al-Wa're menuliskan bahwa Amerika memiliki prinsip dasar lain yaitu seluruh kebijakan politik Amerika diarahkan dalam rangka menjaga kepentingan dan eksistensi Amerika di seluruh dunia. Negara manapun yang menghalang-halangi meskipun sekutunya sendiri akan dimasukkan sebagai musuh besar Amerika dan berhak dihukum Amerika.

Beberapa terobosan penting yang dilakukan AS melalui pendekatan. *Pertama,* menancapkan hegemoni tunggal dalam seluruh percaturan politik, ekonomi, maupun militer di seluruh dunia. *Kedua,* AS tidak akan memberikan toleransi bagi negara manapun untuk memiliki dan mengembangkan persenjataan militernya yang akan membahayakan eksistensi dan kepentingan AS di masa mendatang.

Kesimpulan

Sejak Iran mengeluarkan agenda proyek nuklir untuk pembangkit energi, negara adikuasa Amerika Serikat (AS) yang dipimpin *ambicius president,* George W Bush menolak dengan alasan bahwa program pengembangan nuklir Iran bukan ditujukan untuk kepentingan damai, melainkan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction).* AS menganggap hal tersebut dapat mengancam hegemoninya, terutama di Timur Tengah seperti dalam bidang ideologi, AS takut jika Iran membangkitkan kembali agenda revolusinya. Kemudian dalam bidang politik, kekhawatiran jika Iran meyebarkan agenda revolusinya khususnya ke negara-negara Islam. Kemudian dalam bidang ekonomi, adanya upaya Iran untuk membuka bursa minyak dengan mata uang euro dari yang sebelumnya dengan mata uang dolar, sehingga ada kekhawatiran AS hal ini akan diikuti oleh banyak pengekspor minyak. Dalam bidang militer, ada indikasi keterlibatan Iran dalam mendukung kelompok Hamas dan Hizbullah untuk memerangi pasukan AS di Irak dan Afghanistan, sehingga dapat melemahkan posisi pasukan AS. Kemudian dalam bidang teknologi, kemajuan Iran dalam bidang ini dapat menjadi pesaing bagi teknologi buatan AS karena Iran sudah dapat membuat dan mengembangkan teknologi buatan sendiri, seperti rudal dan sistem kereta bawah tanah. Melihat berbagai ancaman yang dapat menghalangi ambisi hegemoninya, Presiden Bush mengajak komunitas internasional untuk menangani masalah nuklir Iran dan segera menghentikannya.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad pun berusaha melawan pernyataan politik Presiden Bush. Ketegasan sikap Iran akan program pengembangan nuklirnya membuat frustasi invasi politik yang terus digencarkan Presiden Bush. Untuk mempertahankan ambisi hegemoninya AS bersama para sekutunya terus mencari cara untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Bersama *Group of Six* (lima anggota tetap PBB plus Jerman), Uni Eropa menawarkan sejumlah paket insentif kepada Iran agar bersedia

menghentikan program pengembangan nuklirnya. AS dan para sekutunya juga mengancam akan membawa masalah nuklir Iran ke DK PBB dan memberikan sanksi jika Iran menolak paket insentif yang ditawarkan. Sanksi-sanksi tersebut berupa pembekuan aset-aset Iran di Eropa dan ancaman serangan militer ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Presiden Ahmadinejad pun siap melakukan perundingan dengan semua negara yang mempersoalkan nuklir Iran, termasuk Amerika Serikat. Hal tersebut, semata-mata ditempuh untuk menghindarkan konflik soal isu nuklir Iran.

Walau mendapat "hukuman" keras dari Dewan Keamanan PBB, Iran tetap bersikukuh melanjutkan program pengembangan nuklirnya. Iran tetap tidak akan mundur salangkah pun, walau separuh dunia telah sepakat menjatuhkan sanksi yang begitu berat. Presiden Mahmoud Ahmadinejad begitu gencar menentang penolakan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran. Presiden Mahmoud Ahmadinejad menjelaskan, bahwa nuklir Iran semata-mata diciptakan untuk mendukung proses percepatan pembangunan dan kemajuan bangsa Iran sendiri. Oleh karena itu, Presiden Mahmoud Ahmadinejad giat mencari dukungan dari negara-negara lain untuk mendukung program damai nuklir Iran.

Presiden Ahmadinejad berhasil mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Rusia, Cina, Kuba, Venezuela, Suriah dan Korea Utara. Presiden Ahmadinejad berhasil meyakinkan negara tersebut mengenai tujuan damai nuklir Iran. Bahkan Rusia dan Cina juga turut membantu proyek nuklir Iran di Bushehr. Negara-negara tersebut mengatakan bahwa pengembangan nuklir damai merupakan hak bangsa Iran, asalkan tidak digunakan untuk tujuan militer dan membuat senjata pemusnah masal seperti yang selama ini dituduhkan Barat serta Iran dapat bersikap transparan saat harus berhadapan dengan IAEA.

Perseteruan Presiden Mahmoud Ahmadinejad dengan para rivalnya, terutama Amerika Serikat kemungkinan besar masih akan terus berlanjut. Presiden Mahmoud Ahmadinejad sudah bertekad akan tetap melanjutkan program pengembangan nuklir Iran, sekalipun Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan tinggal diam. Demikian juga Amerika Serikat dan para sekutunya, tetap akan terus mencari cara untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Jalan terbaik menyelesaikan isu nuklir Iran adalah jalan diplomasi, karena solusi damai masalah nuklir Iran melalui negosiasi diplomasi merupakan aspirasi bersama masyarakat internasional dan menjadi kepentingan seluruh pihak terkait.

Daftar Pustaka

I. Buku

Anggoro, Kusnanto.1996. "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin". Dalam Zainuddin Djafar (ed). *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan.* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Buzan, Barry. 1992. "The Idea of The State and National Security". In Richard Little and Michael Smith (eds). *Perspective on World Politics.* USA and Canada: Routledge Choplin, William D. 1992. *Introduction to International Politics: An Theoritical Overview.* (terjemahan). Bandung: CV. Sinar Baru.

Departemen Luar Negeri. 1983. *Kecenderungan Timur Tengah Tahun 1980-an.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri.

Dipoyudo, Kirdi. 1981. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia.* Jakarta: CSIS.

El-Gogary, Adel. 2007. *Ahmadinejad The Nuclear Savior of Tehran.* Jakarta: Pustaka Iman.

Findley, Paul. 1995. *Diplomasi Munafik ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan Amerika-Israel.* (terjemahan). Bandung: Mizan.

Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Unit Analisis 2.* Jakarta: Erlangga.

Husaini, Adian. 2002. *Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris yang Pragmatis.* Jakarta: Pustaka Progressif.

Jackson, R., dan George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jamadu, Aleksius. 2007. "Analisis Konflik Internal dari Perspektif Ilmu Hubungan Internasional". Dalam Yulius P. Hermawan (ed). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Khazim, Musa dan Alfian Hamzah. 2007. *Iran: Skenario Penghabisan.* Jakarta:Ufuk Press.

Labib, Muhsin, *et. al*. 2006. *Ahmadinejad: David di Tengah Angkara Goliath Dunia.* Jakarta: Hikmah Populer.

Lamy, Steven L. 2006. "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism". In John Baylis and Steven Smith (eds). *The Globa ization of World Politics: An Introduction to International Relations.* Oxford: Oxford University Press.

Marbun, B. N. 2002. *Kamus Politik.* Jakarta: Sinar Harapan.

Mas'oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: LP3ES.

Maulana Ar-Rusydi, Mirza. 2007. *Mahmoud Ahmadinejad: Singa Persia Vs Amerika Serikat.* Yogyakarta: Garasi.

Moaddab, H. E. Shaban Shahidi. 2005. “Indonesia and Iranian Nuclear Issue”.Dalam Indiana Kartini (ed). *Indonesia and Iran’s Nuclear Issue.* Jakarta: LIPI Press.

M. Romli, Asep Syamsul. 2000. *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Ke kuatan Islam.* Jakarta: Gema Insani.

Nuchterlein, Donald E. 1991. *American Recommited: US National Interest InRestructured World.* Kentucky: The University of Kentucky.

Perwita, Anak Agung Banyu. 2007. “Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neorealisme dalam Hubungan Internasional Kotemporer”.Dalam Yulius P. Hermawan (ed). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

——dan Yanyan M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahman, Musthafa Abd. 2003*a*. *Iran Paska Revolusi: Fenomena Kubu Reformis dan Konservatif.* Jakarta: Kompas.

——2003*b*. *Geliat Irak Menuju Era Pasca-Saddam (laporan dari lapangan).* Jakarta: Kompas.

Rais, Amien. 1990. *Timur Tengah dan Krisis Teluk: Sebuah Analisa Kritis.* Surabaya: Amarpress.

Rudy, T. May. 2001. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.* Bandung: Refika Aditama.

Shoelhi, Mohammad. 2003. *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika.* Jakarta: Pustaka Zaman.

——2007. *Di Ambang Keruntuhan Amerika.* Jakarta: Khazanah Ilmu.

Simanjuntak, D. Danny H. 2007. *Ahmadinejad Menentang Amerika: Dari Nukl ir Iran Hingga Penyangkalan Holocaust.* Yogyakarta: Narasi.

Soenarko, Soesiswo. 1996. “Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri”. Dalam Zainuddin Djafar (ed). *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan.* Jakarta: PT. Pustaka Jaya.

Soeprapto, R. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

II. Jurnal

Barnaby, Frank, “The Nuclear Arsenal In The Middle East”, *Journal of Pale stine Studies*, Spring 2002.

Jacobson, Michael, “Sanctions Against Iran: A Promissing Struggle”, *The Washington Quarterly*, Washington: Summer 2008 Vol. 31.

Luzyanin, Sergei, “What To Do”, *Russia In Global Affairs*, Published: Foreign Policy Research Foundation 2007 Vol 5 No. 2.

Milani, Abbas, “Russia and Iran”, Current History, *A Journal of Contemporary World Affairs*, October 2007 Vol 106 No 702.

Nejad, Hamid Baedi, "Khatami's Nuclear Policy", *The Iranian Journal of Intternational Affairs*, The Institute for Political and International Studies (IPIS), Spring 2005 Vol XVIII No. 1.
Shen, Dingli, "Can Sanctions Stop Proliferation?", *The Washington Quarterly*, Washington: Summer 2008 Vol. 31.
Zimme D. Peter, "Time for Iran to Face More Sanctions", *Boston Globe*, Boston, Mass: Summer 2008.

III. Artikel

Alhadar, Smith, *Sanksi DK PBB bagi Iran*, Kompas, 29 Maret 2007.
Andrea, Faustinus, *Nuklir dan Arogansi Negara Besar*, Tempo, 13 Mei 2005.
Malik, Dedy Djamaluddin, *Irak, Api Tak Kunjung Padam*, Harian Seputar Indonesia, 10 Februari 2007.
Ruru, Bacelius, *PLN AS: Multilateralisme vs Unilateralisme*, Harian Seputar Indonesia, 3 Juni 2006.
Suryohadiprojo, Sayidiman, *Kerawanan dalam Tubuh Amerika*, Harian Seputar Indonesia, 16 Juli 2007.

IV. Situs Internet

http://www.yahoo.com, "Teknologi Senjata: Iran Mengubah Rudal Menjadi Peluncur satelit", Di akses pada tanggal 27 Januari 2007 Jam 12.30.
http://www.google.co.id/imghp?hi=id&tab=wi, di akses pada tanggal 15 Juli 2008 Jam 11.00.
www.Global Security.org.
http://www.upload.wikipedia.org/wikipedia/commons.jpeg, di akses pada tanggal 15 Juli 2008 Jam 11.00.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

- **Maksud dan Tujuan**

Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain.

- **Ruang Lingkup**

Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.

- **Bahasa**

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.

- **Bentuk Naskah**

Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3cm dari Kanan dan kiri kertas, atas dan bawah kertas berjarak 2,5cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom.

- **Isi Naskah**

Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instasi: Abstrak (100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan (berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian (alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada).

- **Judul Karangan dan Nama Pengarang**

Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan.

- **Tabel dan Gambar**

Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,… dst).

- **Daftar Pustaka**

Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.

- **Alamat Redaksi**

Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252